



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran (TA) 2019 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2019.

Pemerintah Kota Balikpapan sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut merupakan gabungan laporan dari 36 entitas akuntansi yang merupakan unit pemerintahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Entitas akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2019 diklasifikasikan menurut urusannya antara lain:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial;
2. Urusan Wajib *Non* Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip;
3. Urusan Pilihan yang terdiri dari: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan;
4. Penunjang Urusan yang terdiri dari: Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Pendukung Urusan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
6. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

7. Wilayah yang terdiri dari: Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur.

LKPD Kota Balikpapan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan SAP Berbasis Akrua. Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapan TA 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* antara lain: masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama TA 2019.

LKPD Kota Balikpapan TA 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas. LKPD Kota Balikpapan TA 2019 disusun dengan tujuan menyediakan informasi mengenai:

1. posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

LKPD Kota Balikpapan disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Balikpapan;
15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian target kinerja APBD

Bab III: Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bab V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.2.1. Perubahan SAL
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Pos Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1. Perubahan Ekuitas
 - 5.7. Pengungkapan Informasi Lainnya
- Bab VI : Penutup**

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan sebagai berikut.

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,42%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,29%.
3. Gini Ratio sebesar 0,32%.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,11%.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,20%.
6. Tingkat Inflasi sebesar 3,13%.
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB/ADHB) sebesar Rp83.604.887,60.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan *non* pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kota Balikpapan (%)	2,64	2,42	(0,22)
2	Kota Balikpapan (Ribuan Orang)	17.008 juta	15.780 juta	(1.288 juta)
3	Provinsi Kalimantan Timur (%)	6,03	5,94	(0,09)
4	Nasional (%)	13,10	12,60	(0,50)
5	Peringkat Provinsi	10	10	-
6	Peringkat Nasional	6	6	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selalu berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi dan nasional serta menjadi kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kemiskinan yang sudah rendah kemudian masih dapat dikendalikan lagi bahkan hingga menurun menjadi 2,42% ini merupakan hasil dari berjalannya program kerja penanggulangan kemiskinan di masing-masing OPD yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) seperti: Program *Online* Informasi Penduduk Miskin, Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Kecil dan Rumah Tangga, dan Bantuan dari Program Nasional Perlindungan Sosial yang Diterima Penduduk Miskin Kota Balikpapan. Jenis Program Perlindungan Sosial Persentase Rumah Tangga yang Menerima Raskin/Rastra/BPNT sebesar 3,85%, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 2,65%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 5,67%, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 1,23% dari total rumah tangga di Kota Balikpapan. Program tersebut dapat mengangkat pendapatan masyarakat miskin lebih tinggi dibanding dengan kenaikan garis kemiskinan Kota Balikpapan. Selain itu, dengan stabilisasi, peningkatan perekonomian kota, dan pengendalian inflasi daerah turut mendorong penurunan jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan hingga lima tahun terakhir.

Usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ke depannya lebih berat karena kondisi penduduk miskin saat ini sudah sangat sedikit/kecil sebesar 2,42% atau dapat dikategorikan bahwa penduduk miskin Kota Balikpapan dapat dikategorikan sangat miskin. Besaran pendapatan penduduk miskin Kota Balikpapan jauh dari garis kemiskinan dan hal ini dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,26 yang menjauh dari angka 0,06. Hal tersebut berarti pendapatan rata-rata penduduk miskin cukup jauh dibanding dengan batas garis kemiskinannya. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mendekati angka 0,06 yang berarti pendapatan rata-rata antar penduduk miskin tidak beda nyata atau kurang lebih saja.

Untuk itu, program pengentasan kemiskinan ke depan lebih mengarah kepada bantuan modal dan pembinaan yang mengarah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin sesuai dengan kondisi kegiatan perekonomian seperti: bantuan teknis dan modal kerja bagi usaha pertanian berupa pembinaan kepada petani untuk komoditas yang ekonomis dengan panca usaha tani, bagi usaha lainnya seperti industri mikro kecil dengan bantuan teknik dan design produk serta bantuan pinjaman modal. Hal tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dari instansi terkait termasuk dengan lembaga keuangan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan	0,67	0,26	(0,41)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,85	0,91	0,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	(0,16)
4	Peringkat Provinsi	4	1	(3)
5	Peringkat Nasional	66	7	(59)

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan	0,26	0,06	(0,20)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur	0,20	0,21	(0,01)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	(0,07)
4.	Peringkat Provinsi	5	1	(4)
5	Peringkat Nasional	169	21	(148)

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja.

TPT Kota Balikpapan dalam kurun waktu dua tahun terakhir masih berada di atas atau lebih tinggi dari tingkat TPT provinsi dan nasional.

Sesuai dengan data dari BPS Kota Balikpapan, TPT Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 7,29%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	9,52	7,29	(2,23)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	6,91	6,6	(0,31)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,5	5,34	(0,16)
4	Peringkat Provinsi	9	9	-
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

TPT Kota Balikpapan Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 7,29%, sedangkan TPT Kota Balikpapan Tahun 2018 sebesar 9,52% atau lebih rendah 2,23% dibandingkan dengan angka TPT Tahun 2018.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) merupakan alat analisa yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan

- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kota Balikpapan realisasi pencapaian Gini *Ratio* Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebesar 0,32 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. Pada Tahun 2019, BPS Kota Balikpapan tidak mengeluarkan data terkait Gini *Ratio* dikarenakan kurangnya *sample* penelitian.

Tabel 5 Gini Ratio Kota Balikpapan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kota Balikpapan	0,32	n/a	-
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	0,34	0,34	-
3	Tingkat Nasional	n/a	n/a	-
3	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	-
4	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: *bps.go.id*

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. rendah (<60);
2. sedang ($60 \leq IPM < 70$);
3. tinggi ($70 \leq IPM < 80$); dan
4. sangat tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Kota Balikpapan Realisasi pencapaian IPM Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 80,11 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kota Balikpapan	79,81	80,11	0,30
2	Provinsi Kalimantan Tinur	75,83	76,61	0,78
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	0,53
4	Peringkat Provinsi	3	2	(1)
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	-

Sumber Dokumen: *BPS Kota Balikpapan*

Realisasi pencapaian IPM Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 80,11 poin, dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 79,81 poin yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,3 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau/dan standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan

hidup saat lahir mencapai 74,41 tahun pada Tahun 2019, lebih lama 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang berada pada 74,18 dengan harapan lama sekolah 14,12 tahun. Sementara Standar Hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp14.791,00 atau meningkat Rp234,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM Kota Balikpapan pada saat ini berada pada urutan 2 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan

No	Uraian	Kota Balikpapan			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	3,84	4,95	4,78	2,67	n/a
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,2	5,2	2,67	n/a
3	Peringkat Provinsi	3	3	n/a	n/a	n/a
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Selama kurun waktu Tahun 2017 s.d 2019 perekonomian Kota Balikpapan mengalami peningkatan sebesar 1,11% dari Tahun 2017 s.d 2018 dan mengalami penurunan sebesar 0,17%. Pada periode Tahun 2017 s.d 2018 pertumbuhan perkonomanian Kota Balikpapan adalah sebesar 0,10% dan pada kurun waktu Tahun 2018 s.d 2019 data laju pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan belum tersedia di laman resmi BPS Kota Balikpapan. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Balikpapan menempati urutan ke-3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

2.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Gallopung Inflation*) sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, laju berkisar antara 10%-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) mencakup hitungan mulai dari 30%-100% setahun. Pada

tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Inflasi Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir lebih rendah dari pada inflasi provinsi dan nasional. Pencapaian inflasi yang rendah dan stabil disebabkan oleh terkendalinya inflasi bahan makanan sebagai upaya dari TPID Kota Balikpapan dan Satgas Pangan dalam program pengendalian inflasi daerah.

Sesuai dengan data pada BPS, tingkat inflasi Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar 1,88% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kota Balikpapan

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Balikpapan (%)	3,13	1,88	(1,25)
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (%)	3,24	1,66	(1,58)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a
5	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Balikpapan

Struktur perekonomian Kota Balikpapan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(Dalam jutaan rupiah)				
No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	693.061,50	746.262,50	782.014,60
2	Pertambangan dan Penggalan	35.262,90	35.529,90	35.935,20
3	Industri Pengolahan	43.657.280,80	45.442.815,10	47.472.116,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66.169,70	69.496,30	76.027,20
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang	54.639,50	55.725,60	58.994,40
6	Konstruksi	8.943.483,40	9.510.131,50	10.176.792,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.155.721,30	6.551.791,70	6.936.740,60
8	Transportasi dan Pergudangan	5.978.044,80	6.283.542,00	6.337.254,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.108.885,60	1.240.300,30	1.343.770,80
10	Informasi dan Komunikasi	2.644.528,90	2.780.444,90	3.004.061,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.394.776,20	2.517.790,50	2.612.608,20
12	Real Estate	1.321.553,40	1.382.661,70	1.410.669,50
13	Jasa Perusahaan	198.591,40	205.647,70	207.752,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	894.679,30	940.397,40	1.000.206,70
15	Jasa Pendidikan	1.008.511,90	1.087.881,80	1.137.683,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385.003,40	409.277,60	431.695,60
17	Jasa Lainnya	491.885,00	534.098,90	580.565,50
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	76.032.079,10	79.793.795,40	83.604.887,60

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	n/a	n/a	n/a
20	PDRB Provinsi	165.652,00	174.882,00	n/a
21	PDRB Nasional	51.881,00	55.987,00	n/a
22	Peringkat Provinsi	n/a	n/a	n/a
23	Peringkat Nasional	n/a	n/a	n/a

2.2. Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan TA 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2016 s.d 2021. RPJMD Kota Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu "Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Berkemajuan Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman". RPJMD juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, Renstra Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJP Nasional. Tujuannya untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapan setiap tahun.

APBD TA 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat". Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD; dan
3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dana Perimbangan dari pusat masih menjadi tumpuan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai sumber utama pendanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 dengan tetap langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber PAD, maka Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan strategi di antaranya dengan melakukan perluasan pembayaran pajak dan retribusi melalui bank, melakukan penambahan gerai dalam rangka mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah, menerapkan aplikasi *Payment Online*, melakukan operasi sisir dan pengawasan objek pajak daerah, melakukan *update* data PBB-P2, melakukan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah, dan melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan baru.

Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 diproyeksikan dari pendapatan sebesar Rp2.527.027.291.918,00 dan dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp291.635.286.428,00. Penerimaan Pendapatan direncanakan bersumber dari PAD sebesar Rp688.424.448.700,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.835.602.843.218,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp3.000.000.000,00.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk tetap memprioritaskan dan fokus terhadap belanja daerah yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah di Tahun 2019 dialokasikan untuk 3 pos pengeluaran yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp1.943.252.515.152,00, Belanja Modal sebesar Rp831.783.646.194,00, dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp11.241.417.000,00.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun TA berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pos Penerimaan Pembiayaan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya, sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan dimungkinkan adanya alokasi untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD, PDAM dan pada Bank Pembangunan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada TA 2019 dialokasikan sebesar Rp291.635.286.428,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2018. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp29.225.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Balikpapan TA 2019.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Urusan Pendidikan**
Urusan Pendidikan pada TA 2019 setelah perubahan mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp246.618.191.950,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp230.957.178.210,35 atau 93,65%.
- b. **Urusan Kesehatan**
Urusan Kesehatan pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp236.253.985.525,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp183.976.871.435,68 atau 77,87%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan Tahun 2019 dilaksanakan oleh: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- c. **Urusan Perumahan Dan Fasilitas Umum**
Urusan Perumahan dan Fasilitas Umum pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp657.309.642.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp579.070.311.238,10 atau 88,10%. Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan dan Fasilitas Umum Tahun 2019 dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.
- d. **Urusan Lingkungan Hidup**
Urusan Lingkungan Hidup pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp148.202.520.562,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp90.357.685.199,71 atau 60,97%.
- e. **Urusan Ketertiban Dan Ketentraman**
Urusan Ketertiban dan Ketentraman pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp2.898.473.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.447.017.148,00 atau 84,42%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketertiban dan Ketentraman Tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Satpol PP, Kesbangpol, dan Seluruh Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. **Urusan Perlindungan Sosial**
Urusan Perlindungan Sosial pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp20.960.814.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp18.430.876.789,80 atau 87,93%. Program dan kegiatan pada Urusan Sosial Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- g. **Urusan Ekonomi**
Urusan Ketenagakerjaan pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp167.844.274.713,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp139.725.371.112,90 atau 83,25%.

- h. **Urusan Pariwisata dan Budaya**
Urusan pariwisata dan budaya pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp32.781.982.400,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp27.770.626.532,19 atau 84,71%.
- i. **Urusan Pelayanan Umum**
Urusan Pelayanan Umum pada TA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp319.188.108.655,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp267.211.380.302,26 atau 83,72%.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara rinci dapat dijelaskan dalam LKPJ Walikota Balikpapan Tahun 2019. Selama pelaksanaan APBD Tahun 2019, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari sisi Pendapatan, dapat disimpulkan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
- b. Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- d. Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi Pendapatan Asli Daerah.
- e. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.

Sementara dari sisi belanja, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan pengadaan/pembangunan di enam bulan terakhir. Perlu koordinasi dan sinkronisasi seluruh pihak sehingga perencanaan, kelengkapan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan dapat dikerjakan saat memasuki triwulan kedua; dan
- b. pelaksanaan anggaran yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan. Perlunya peningkatan pemahaman dan kecermatan dalam penyusunan anggaran sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif demi menghindari tidak teralisasinya anggaran yang telah tersusun atau bahkan permasalahan hukum dikemudian hari.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam aktifitasnya Entitas Laporan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk kemudian digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang berjumlah 36 OPD. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan yang terdiri dari 36 entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

- a. LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu Tahun periode.
- b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) pada tahun pelaporan.

PENDAPATAN-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BELANJA-LRA

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU.
- c. Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN-LRA

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- i. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun anggaran tertentu.
- j. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

- a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan

sedemikian rupa pada CaLK sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- a. LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- b. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas Tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BEBAN

- a. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode Tahun berkenaan.
- c. Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- d. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

- f. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- a. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

POS LUAR BIASA

- a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- b. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat transaksi.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*), Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

- Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 10 Klasifikasi Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Belanja Dibayar Dimuka

- Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan.

Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan meliputi:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak disajikan sebagai persediaan.
- e. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- f. Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang

akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- h. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
 - 2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali deviden) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- i. Dasar investasi Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BPD Kalimantan Timur.
 - 2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.
 - 3) Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 2) Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- f. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- i. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan mengikuti masa manfaat aset induknya.
- j. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- k. Penyusutan aset tetap dimulai saat perolehan dan siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*)

Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aset Lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a. Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namun manfaatnya akan diberikan di periode berikutnya.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- b. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Luar Negeri

- a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- b. Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pemerintah.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris. Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

- a. Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan dan Aset lain-lain.

- c. Aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- d. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Pendapatan Transfer
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Subsidi
 - 4) Belanja Hibah
 - 5) Belanja Bantuan Sosial
 - 6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi)
 - 2) Penjualan aset tetap
- b. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
 - 1) Belanja Modal
 - 2) Penyertaan Modal

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- a. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pinjaman
 - 2) Penerimaan dari Utang Obligasi
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Pokok Pinjaman
 - 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:
 - 1) Penerimaan PFK
 - 2) Penerimaan Panjar
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pengeluaran PFK
 - 2) Pengeluaran panjar

Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari Laporan Arus Kas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 11 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pendapatan	2.527.027.291.918,00	2.469.528.492.671,23	97,72	2.230.736.621.233,10
2.	Belanja	2.786.277.578.346,00	2.405.320.741.662,33	86,33	2.119.971.369.743,75
3.	Transfer	3.160.000.000,00	3.141.232.527,00	99,41	998.806.796,00
4.	Pembiayaan	262.410.286.428,00	262.765.199.606,15	100,14	181.868.841.735,20
5.	SILPA	0,00	323.831.718.088,05	0,00	291.635.286.428,55

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 untuk pendapatan:

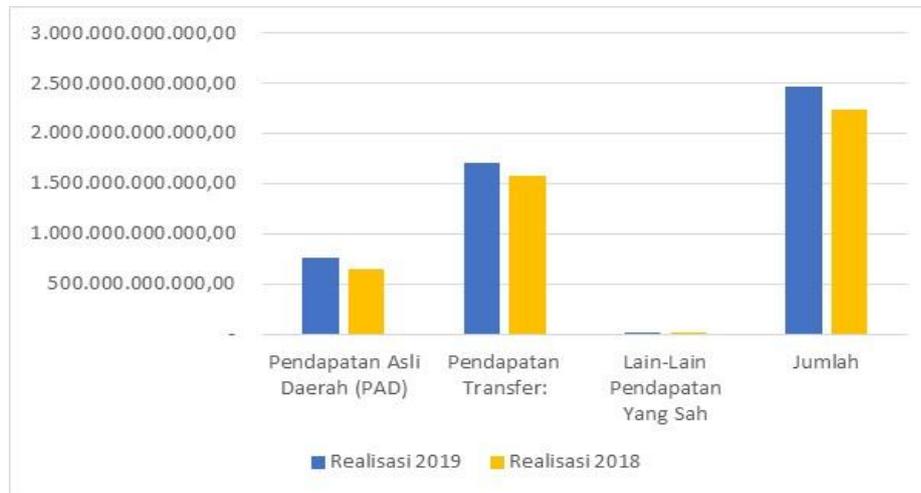
5.1 PENDAPATAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp2.527.027.291.918,00	Rp2.469.528.492.671,23	Rp2.230.736.621.233,10

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2019 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.527.027.291.918,00 dengan realisasi sebesar Rp2.469.528.492.671,23 atau 97,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp238.791.871.438,13 atau 10,70%. Realisasi dan target masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2019 dan TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah (PAD) Asli	688.424.448.700,00	764.087.241.241,05	110,99	646.868.407.485,10
2.	Pendapatan Transfer: Lain-Lain	1.835.602.843.218,00	1.702.441.251.430,18	92,75	1.580.568.213.748,00
3.	Pendapatan Sah Yang	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
Jumlah		2.527.027.291.918,00	2.469.528.492.671,23	97,72	2.230.736.621.233,10

Grafik 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2018



5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Rp688.424.448.700,00 Rp764.087.241.241,05 Rp646.868.407.485,10

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	501.950.000.000,00	565.236.192.479,07	112,61	474.455.854.717,30
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	69.023.618.000,00	55.680.497.069,87	80,67	55.054.750.772,39
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.100.000.000,00	16.870.674.739,20	119,65	14.360.001.940,84
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	103.350.830.700,00	126.299.876.952,91	122,20	102.997.800.054,57
JUMLAH		688.424.448.700,00	764.087.241.241,05	110,99	646.868.407.485,10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah pada TA 2019 ditetapkan sebesar Rp688.424.448.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp764.087.241.241,05 atau 110,99%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar Rp646.868.407.485,10, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp117.218.833.755,95 atau 18,12%.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018



5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2019 Rp501.950.000.000,00	Realisasi 2019 Rp565.236.192.479,07	Realisasi 2018 Rp474.455.854.717,30
--	---	--	--

Pendapatan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019		Realisasi 2019			Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
		(Rp)	Murni (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%		
1.	Pajak Hotel	41.900.000.000,00	43.557.896.443,00	2.848.495.183,59	46.406.391.626,59	110,76	4.506.391.626,59	44.215.141.346,00
2.	Pajak Restoran	89.500.000.000,00	103.115.142.340,00	646.269.064,00	103.761.411.404,00	115,93	14.261.411.404,00	83.249.949.477,00
3.	Pajak Hiburan	24.000.000.000,00	25.529.756.968,00	319.572.260,00	25.849.329.228,00	107,71	1.849.329.228,00	24.237.334.052,00
4.	Pajak Reklame	9.000.000.000,00	9.425.903.830,00	296.288.975,00	9.722.192.805,00	108,02	722.192.805,00	9.223.028.948,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	119.000.000.000,00	122.278.066.579,00	209.664.839,00	122.487.731.418,00	102,93	3.487.731.418,00	114.417.353.678,00
6.	Pajak Parkir	17.500.000.000,00	19.593.847.248,00	23.694.900,00	19.617.542.148,00	112,10	2.117.542.148,00	19.930.159.455,00
7.	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	2.616.940.301,00	51.718.670,60	2.668.658.971,60	106,75	168.658.971,60	2.512.142.075,60
8.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	57.647.000,00	0,00	57.647.000,00	115,29	7.647.000,00	43.765.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	4.581.201.450,00	0,00	4.581.201.450,00	101,80	81.201.450,00	849.201.125,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	99.000.000.000,00	86.496.537.041,00	14.548.540.068,00	101.045.077.109,00	102,07	2.045.077.109,00	90.186.192.508,00

No.	Uraian	Anggaran 2019		Realisasi 2019			Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
		(Rp)	Murni (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%		
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	95.000.000.000,00	129.039.009.318,88	0,00	129.039.009.318,88	135,83	34.039.009.318,88	85.591.587.052,70
Jumlah		501.950.000.000,00	546.291.948.518,88	18.944.243.960,19	565.236.192.479,07	112,61	63.286.192.479,07	474.455.854.717,30

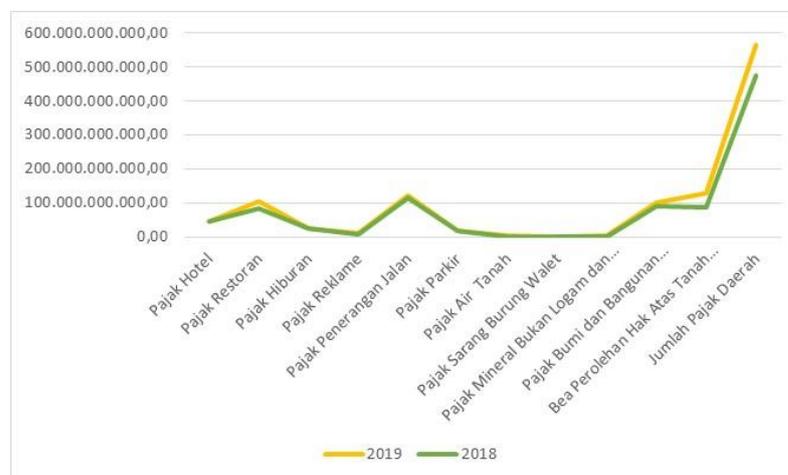
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Pajak daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp501.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp565.236.192.479,07 yang menandakan terdapat pelampauan target penerimaan sebesar Rp63.286.192.479,07 atau 112,61%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp90.780.337.761,77 atau 19,13% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp474.455.854.717,30.

Dari rincian diatas dapat dilihat pula bahwa terjadi kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 sebesar Rp46.406.391.626,59 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp44.215.141.346,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp2.191.250.280,59 atau 4,96%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Hotel, meningkatnya tingkat hunian hotel, dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala.
- Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp103.761.411.404,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp83.249.949.477,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp20.511.461.927,00 atau 24,64%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Restoran dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Restoran seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala.
- Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp25.849.329.228,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp24.237.334.052,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp1.611.995.176,00 atau 6,65%. Kenaikan tersebut karena meningkatnya omset Wajib Pajak Hiburan terutama tontonan film/bioskop dan karaoke, dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Hiburan seiring dengan intensifikasi serta pengawasan secara berkala.
- Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp9.722.192.805,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp9.223.028.948,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp499.163.857,00 atau 5,41%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Reklame dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak reklame meningkat seiring dengan kegiatan intensifikasi (penyisiran).
- Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 sebesar Rp122.487.731.418,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp114.417.353.678,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp8.070.377.740,00 atau 7,05%. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan tarif dasar listrik oleh PT PLN (Persero) yang berimbas pada kenaikan pajaknya.
- Realisasi Pajak Parkir Tahun 2019 sebesar Rp19.617.542.148,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp19.930.159.455,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp312.617.307,00 atau 1,57%. Penurunan tersebut karena adanya penurunan omset pada parkir PT Angkasa Pura dengan indikasi terjadi penurunan jumlah penumpang karena pembukaan Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda.

- g. Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2019 sebesar Rp2.668.658.971,60 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.512.142.075,60 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp156.516.896,00 atau 6,23%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Air Tanah dan adanya kegiatan intensifikasi serta pengawasan bersama Dinas Lingkungan Hidup secara berkala.
- h. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019 sebesar Rp57.647.000,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp43.765.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp13.882.000,00 atau 31,72%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
- i. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 sebesar Rp4.581.201.450,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp849.201.125,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp3.732.000.325,00 atau 439,47%. Kenaikan tersebut karena seiring dengan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan pada PT Pertamina dan proyek jalan tol.
- j. Realisasi Pajak PBB P2 Tahun 2019 sebesar Rp101.045.077.109,00 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp90.186.192.508,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp10.858.884.601,00 atau 12,04%. Kenaikan tersebut karena adanya perbaikan basis data dan updating data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- k. Realisasi Pajak BPHTB Tahun 2019 sebesar Rp129.039.009.318,88 dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp85.591.587.052,70 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp43.447.422.266,18 atau 50,76%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya transaksi jual beli atau peralihan hak lain atas tanah dan/atau bangunan.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018



5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp69.023.618.000,00	Rp55.680.497.069,87	Rp55.054.750.772,39

Merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Murni (Rp)	Realisasi 2019			Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
				Pembayaran Piutang (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%		
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.470.918.000,00	1.564.679.301,00	0,00	1.564.679.301,00	106,37	93.761.301,00	1.452.805.575,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.500.000.000,00	13.436.268.083	378.217.000,00	13.814.485.083,00	89,13	(1.685.514.917,00)	13.121.193.433,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.000.000.000,00	2.363.973.000,00	0,00	2.363.973.000,00	23,64	(7.636.027.000,00)	2.731.115.600,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	6.500.000.000,00	5.137.148.370,00	372.242.850,00	5.509.391.220,00	84,76	(990.608.780,00)	5.245.859.204,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.000.000.000,00	2.604.825.000,00	0,00	2.604.825.000,00	65,12	(1.395.175.000,00)	2.732.760.000,00
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000.000,00	917.187.447,97	804.156.385,36	1.721.343.833,33	98,36	(28.656.166,67)	1.137.769.117,45
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000,00	198.032.200,00	0,00	198.032.200,00	99,02	(1.967.800,00)	195.353.400,00
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	797.120.000,00	663.602.400,00	29.892.000,00	693.494.400,00	87,00	(103.625.600,00)	1.004.371.200,00
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.990.000.000,00	6.215.221.677,54	437.609.094,00	6.652.830.771,54	83,26	(1.337.169.228,46)	6.414.262.837,94
10.	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.380.500,00
11.	Retribusi Terminal	33.840.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	31,03	(23.340.000,00)	22.724.500,00
12.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	72.500.000,00	238.125.000,00	0,00	238.125.000,00	328,45	165.625.000,00	126.903.000,00
13.	Retribusi Rumah Potong Hewan	487.000.000,00	315.139.500,00	0,00	315.139.500,00	64,71	(171.860.500,00)	376.486.250,00
14.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000.000,00	468.932.500,00	0,00	468.932.500,00	93,79	(31.067.500,00)	527.212.000,00
15.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.200.000.000,00	3.571.650.000,00	64.950.000,00	3.636.600.000,00	86,59	(563.400.000,00)	3.155.300.000,00
16.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	52,20	(7.170.000,00)	6.295.000,00
17.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.915.276.400,00	15.360.893.661,00	0,00	15.360.893.661,00	102,99	445.617.261,00	16.123.603.555,00
18.	Retribusi Izin Trayek	257.240.000,00	95.280.000,00	0,00	95.280.000,00	37,04	(161.960.000,00)	140.750.000,00
19.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	84.723.600,00	244.881.600,00	0,00	244.881.600,00	289,04	160.158.000,00	221.985.600,00
20.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	250.000.000,00	179.260.000,00	0,00	179.260.000,00	71,70	(70.740.000,00)	177.620.000,00
Jumlah		69.023.618.000,00	53.593.429.740,51	2.087.067.329,36	55.680.497.069,87	80,67	(13.343.120.930,13)	55.054.750.772,39

Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 pendapatan retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp69.023.618.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.680.497.069,87 yang menandakan bahwa pendapatan retribusi tersebut tidak mencapai target yang diharapkan dengan nilai sebesar (Rp13.343.120.930,13) atau 80,67%. Realisasi pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2019 mengalami peningkatan senilai Rp625.746.297,48 atau 1,13% dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp55.054.750.772,39.

Dari rincian realisasi di atas terdapat kenaikan dan penurunan nilai retribusi yang cukup signifikan antara Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mengalami peningkatan sebesar Rp583.574.715,88 atau 51,29% dari tahun sebelumnya karena upaya penagihan piutang tahun-tahun sebelumnya yang cukup intensif.
2. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi mengalami penurunan sebesar (Rp310.876.800,00) atau (30,95%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena beberapa ketetapan tagihan baru diterbitkan pada akhir Tahun 2019 sehingga wajib retribusi baru melunasinya pada tahun berikutnya.
3. Retribusi izin mendirikan bangunan mengalami penurunan sebesar (Rp762.709.894,00) atau (4,73%) dari tahun sebelumnya karena penurunan jumlah pemohon penerbitan IMB pada Tahun 2019 yang berjumlah 1.019 pemohon dibandingkan dengan Tahun 2018 yang berjumlah 1.202 pemohon.

Dari rincian realisasi di atas pula dapat dijelaskan bahwa terdapat kelebihan/kekurangan pencapaian target retribusi cukup signifikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Terminal hanya terealisasi sebesar Rp10.500.000,00 atau 31,03% dari target sebesar Rp33.840.000,00 karena penarikan sewa kios yang ada di terminal tidak dapat dipungut maksimal karena beberapa kios masih dalam tahap renovasi sehingga belum beroperasi.
2. Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi sebesar Rp95.280.000,00 atau 37,04% dari target sebesar Rp257.240.000,00 karena banyaknya angkutan kota yang beralih fungsi menjadi taksi *online* dan *online* pribadi sehingga armada trayek angkutan umum berkurang secara signifikan.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hanya terealisasi Rp2.363.973.000,00 atau 23,64% dari target sebesar Rp10.000.000.000,00 karena masih terdapat titik lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak lain oknum tertentu. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi masalah ini dengan mengadakan razia gabungan dengan Sabara Polda terkait untuk pembinaan dan melakukan pendekatan secara preventif.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp72.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp238.125.000,00 atau 328,45%. Perolehan realisasi yang cukup signifikan dari target ini karena banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir terutama ketika mengadakan acara di Gedung Serbaguna.
5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ditargetkan sebesar Rp84.723.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp244.881.600,00 atau 289,04%. Perolehan realisasi yang cukup signifikan dari target ini karena ada perpanjangan lima belas tenaga kerja asing dari perusahaan yang bersangkutan.

Grafik 4
Komposisi Realisasi Pendapatan retribusi daerah Tahun 2019 dan 2018



5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp14.100.000.000,00	Rp16.870.674.739,20	Rp14.360.001.940,84

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 dianggarkan sebesar Rp14.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.870.674.739,20 atau 119,65%. Pendapatan tersebut berasal dari laba/deviden atas penyertaan modal pada BUMD yaitu:

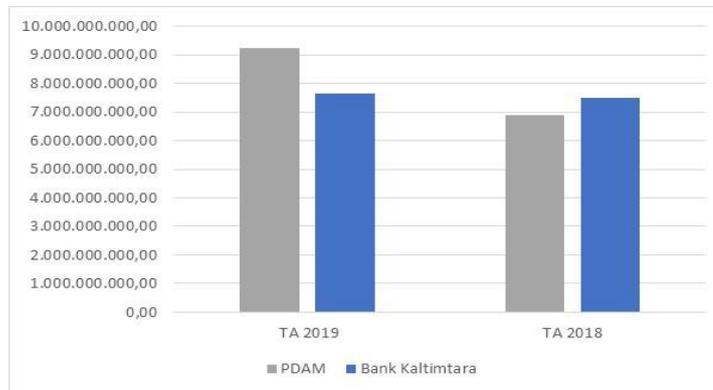
- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timurtara dengan dasar pembagian laba selaku pemegang 3,26% dari total saham hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
- PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2019 ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.510.672.798,36 atau 17,48% dari TA 2018 yang berjumlah Rp14.360.001.940,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih / Kurang (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1.	PDAM	6.500.000.000,00	9.236.586.822,40	142,10	2.736.586.822,40	6.884.333.478,00
2.	Bank Kalimantan Timurtara	7.600.000.000,00	7.634.087.916,80	100,45	34.087.916,80	7.475.668.462,84
	Jumlah	14.100.000.000,00	16.870.674.739,20	119,65	2.770.674.739,20	14.360.001.940,84

Grafik 5
Komposisi Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2019 dan 2018



5.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2019 Rp103.350.830.700,00	Realisasi 2019 Rp126.299.876.952,91	Realisasi 2018 Rp102.997.800.054,57
--	---	--	--

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp103.350.830.700,00 dengan realisasi sebesar Rp126.299.876.952,91 yang menandakan terdapat kelebihan pencapaian target sebesar Rp22.949.046.252,91 atau 22,20%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.302.826.898,34 atau 22,62% dari TA 2018 yang berjumlah Rp102.997.800.054,57. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran cicilan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2019 dan 2018

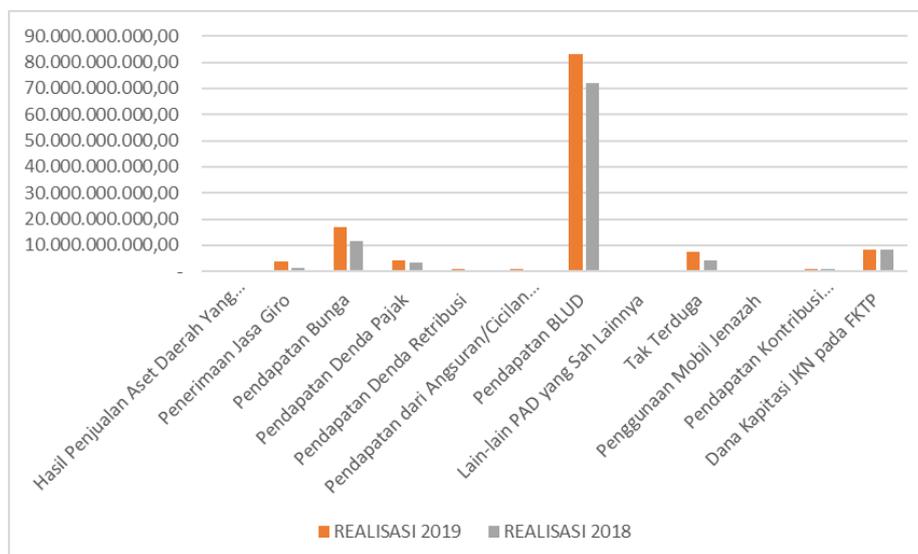
KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	55.689.300,00	-	55.689.300,00	48.897.300,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	3.825.006.822,37	153,00	1.325.006.822,37	1.285.315.916,89
3.	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	16.718.952.155,35	238,84	9.718.952.155,35	11.458.664.346,23
4.	Pendapatan Denda Pajak	2.600.000.000,00	4.175.511.246,00	160,60	1.575.511.246,00	3.382.246.824,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi	500.000.000,00	697.939.155,00	139,59	197.939.155,00	653.714.272,02
6.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	400.000.000,00	1.025.203.782,00	256,30	625.203.782,00	401.310.698,00
7.	Pendapatan BLUD	78.158.894.000,00	82.981.771.555,08	106,17	4.822.877.555,08	72.066.719.151,13

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
8.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	3.835.541,13	-	3.835.541,13	6.815.453,64
9.	Tak Terduga	2.000.000.000,00	7.603.324.928,98	380,17	5.603.324.928,98	4.256.862.982,66
10.	Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel	1.000.000.000,00	966.734.060,00	96,67	(33.265.940,00)	966.734.060,00
11.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.191.936.700,00	8.245.908.407,00	89,71	(946.028.293,00)	8.470.519.050,00
	Jumlah	103.350.830.700,00	126.299.876.952,91	122,20	22.949.046.252,91	102.997.800.054,57

Dari rincian realisasi di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kelebihan pencapaian target pendapatan cukup signifikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan bunga ditargetkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp16.718.952.155,35 atau 238,84%. Perolehan realisasi yang cukup signifikan dari target ini karena perolehan bunga deposito Pemerintah Kota Balikpapan yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp150.000.000.000,00 dan Bank Tabungan Negara (BTN) senilai Rp75.000.000.000,00.
2. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.025.203.782,00 atau 256,30%. Perolehan realisasi yang cukup signifikan dari target ini karena pada Tahun 2019 mulai dilakukan pembayaran atas uang muka dan cicilan atas penjualan rumah dinas di kompleks Praja Bakti Kelurahan Gunung Samarinda Baru yang diputuskan melalui Keputusan Wali Kota Balikpapan tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 188.45-397/2018 tentang Penetapan Harga Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya yang Akan Dipindahtangankan Dalam Bentuk Penjualan Kepada Penghuni yang Sah.
3. Pendapatan Tak Terduga ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.603.324.928,98 atau 380,17%. Realisasi pendapatan yang melebihi target diantaranya berasal dari pengembalian atas pembayaran pekerjaan, pengembalian atas temuan pemeriksaan aparat pengawas, pengembalian atas potongan absen dan honor pegawai, denda keterlambatan dan lain sebagainya yang tidak dapat diprediksi.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 dan 2018



5.1.2 Pendapatan Transfer Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Rp1.835.602.843.218,00 Rp1.702.441.251.430,18 Rp1.580.568.213.748,00

Merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan menerima alokasi pendapatan transfer melalui dua entitas yaitu Pemerintah Pusat melalui APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pendapatan transfer Kota Balikpapan Tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2019 dan 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.167.112.811.353,00	1.061.676.408.488,00	90,97	(105.436.402.865,00)	1.096.230.492.809,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	189.951.578.000,00	185.455.780.904,18	97,63	(4.495.797.095,82)	167.488.330.939,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	321.988.453.865,00	298.759.062.038,00	92,79	(23.229.391.827,00)	266.019.978.000,00
4.	Bantuan Keuangan	156.550.000.000,00	156.550.000.000,00	100,00	-	50.829.412.000,00
Jumlah		1.835.602.843.218,00	1.702.441.251.430,18	92,75	(133.161.591.787,82)	1.580.568.213.748,00

Dari tabel sebelumnya dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Transfer pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.835.602.843.218,00 dengan realisasi sebesar Rp1.702.441.251.430,18 yang menandakan target yang tidak tercapai sebesar (Rp133.161.591.787,82) atau 92,75%. Pendapatan Transfer mengalami peningkatan Rp121.873.037.682,18 dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp1.580.568.213.748,00 atau 7,71%.

Grafik 7
Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan 2018



5.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Rp108.964.295.000,00 Rp68.155.340.656,00 Rp123.953.578.235,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp108.964.295.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.155.340.656,00 yang menandakan terdapat target yang tidak tercapai berjumlah sebesar (Rp55.798.237.579,00) atau 62,55%. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar (Rp55.798.237.579,00) atau (45,02%) dari TA 2018 yang berjumlah Rp123.953.578.235,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019				LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
			MURNI (Rp)	KURANG SALUR (Rp)	JUMLAH (Rp)	%		
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	8.411.593.000,00	6.272.612.202,00	1.551.107.254,00	7.823.719.456,00	93,01	(931.813.212,00)	8.755.532.668,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	100.552.702.000,00	60.331.621.200,00	0,00	60.331.621.200,00	60,00	(54.866.424.367,00)	115.198.045.567,00
Jumlah		108.964.295.000,00	66.604.233.402,00	1.551.107.254,00	68.155.340.656,00	62,55	(55.798.237.579,00)	123.953.578.235,00

Grafik 9

Komposisi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018



5.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Anggaran 2019 **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp502.771.697.353,00 **Rp456.723.178.388,00** **Rp469.470.265.663,00**

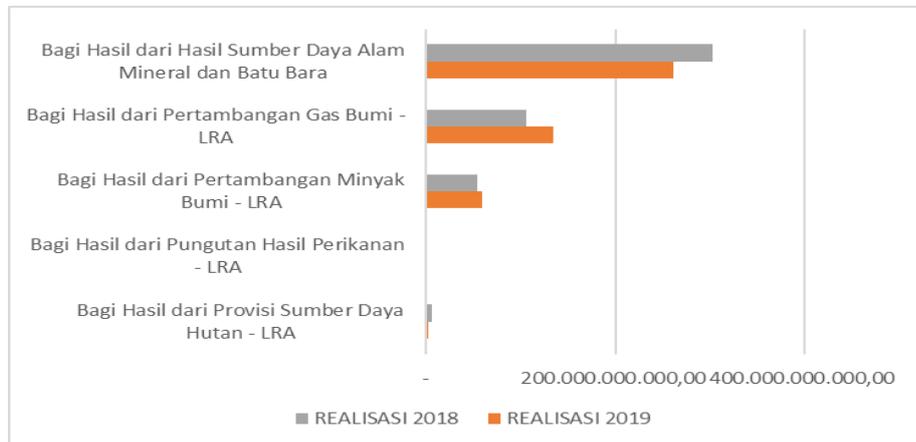
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2019 dianggarkan sebesar Rp502.771.697.353,00 dengan realisasi sebesar Rp456.723.178.388,00 yang menandakan terdapat kekurangan pencapaian target sebesar (Rp46.048.518.965,00) atau 90,84%. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar (Rp12.747.087.275,00) atau (2,72%) dari TA 2018 yang berjumlah Rp469.470.265.663,00. Rincian Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA terdiri dari:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019				LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
			MURNI (Rp)	KURANG SALUR (Rp)	JUMLAH (Rp)	%		
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.154.953.000,00	1.892.971.800,00	0,00	1.892.971.800,00	60,00	(1.261.981.200,00)	5.826.218.444,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	0,00	590.155.800,00	60,00	(393.437.200,00)	701.234.591,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	75.223.872.000,00	41.373.129.600,00	17.948.682.358,00	59.321.811.958,00	78,86	(15.902.060.042,00)	54.539.323.240,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	154.439.803.000,00	84.941.891.650,00	49.081.593.226,00	134.023.484.876,00	86,78	(20.416.318.124,00)	106.094.112.160,00
5	Bagi Hasil dari Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	268.969.476.353,00	208.494.965.700,00	52.399.788.254,00	260.894.753.954,00	97,00	(8.074.722.399,00)	302.309.377.228,00
JUMLAH		502.771.697.353,00	337.293.114.550,00	119.430.063.838,00	456.723.178.388,00	90,84	(46.048.518.965,00)	469.470.265.663,00

Grafik 10

Komposisi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2019



5.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum

Anggaran 2019 **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp445.818.661.000,00 **Rp439.818.664.000,00** **Rp410.543.293.000,00**

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kota Balikpapan memanfaatkan Dana Alokasi Umum seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran gaji ASN dan anggota DPRD. Pada Tahun 2019, Pemerintah Pusat memutuskan kebijakan untuk kegiatan Dana Kelurahan yang bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana untuk mendukung kegiatan tersebut ditransfer ke Pemerintah Kota Balikpapan melalui alokasi rekening DAU. Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp445.818.661.000,00 dengan realisasi sebesar Rp439.818.664.000,00 yang menandakan terdapat kekurangan pencapaian target sebesar (Rp5.999.997.000,00) atau 98,65%. Realisasi DAU tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp29.275.371.000,00 atau 7,13% dari Tahun 2018 yang berjumlah Rp410.543.293.000,00.

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2019 dan TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019		%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
				TAMBAHAN (Rp)	JUMLAH (Rp)			
1.	Dana Alokasi Umum	445.818.661.000,00	433.818.667.000,00	5.999.997.000,00	439.818.664.000,00	98,65	(5.999.997.000,00)	410.543.293.000,00
Jumlah		445.818.661.000,00	433.818.667.000,00	5.999.997.000,00	439.818.664.000,00	98,65	(5.999.997.000,00)	410.543.293.000,00

5.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Anggaran 2019

Realisasi 2019

Realisasi 2018

Rp109.558.158.000,00 Rp96.979.225.444,00 Rp92.263.355.911,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus terbagi atas dua klasifikasi yaitu DAK fisik dan DAK Non Fisik dimana pengelolaan dan pelaporannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada Tahun 2019, Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp109.558.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.979.225.444,00 yang menandakan terdapat kekurangan pencapaian target sebesar (Rp12.578.932.556,00) atau 88,52%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.715.869.533,00 atau 5,11% dari TA 2018 yang berjumlah Rp92.263.355.911,00. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

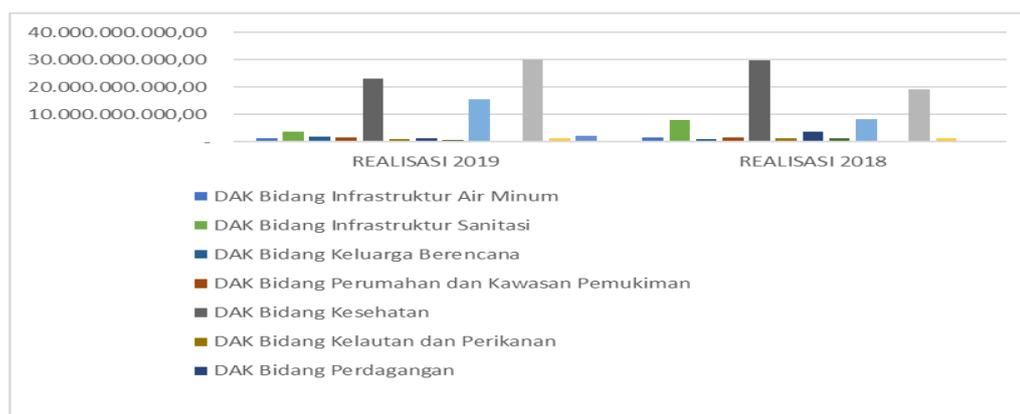
Tabel 23 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2019 dan TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019		%	LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
				KURANG SALUR (Rp)	JUMLAH (Rp)			
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	15.260.990.000,00	13.344.211.068,00	0,00	13.344.211.068,00	87,44	(1.916.778.932,00)	13.562.690.692,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	866.486.000,00	662.623.605,00	0,00	662.623.605,00	76,47	(203.862.395,00)	2.180.025.925,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.261.011.000,00	1.243.811.902,00	0,00	1.243.811.902,00	98,64	(17.199.098,00)	1.673.782.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3.794.825.000,00	3.789.741.250,00	0,00	3.789.741.250,00	99,87	(5.083.750,00)	7.890.400.000,00
5	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.191.961.000,00	1.959.522.613,00	0,00	1.959.522.613,00	164,4	767.561.613,00	1.000.524.450,00

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019			LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
				KURANG SALUR (Rp)	JUMLAH (Rp)	%		
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.413.831.000,00	1.413.830.000,00	0,00	1.413.830.000,00	100	(1.000,00)	1.396.105.500,00
7	DAK Bidang Kesehatan	27.939.105.000,00	23.084.705.658,00	0,00	23.084.705.658,00	82,63	(4.854.399.342,00)	29.882.200.029,00
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.154.344.000,00	808.040.800,00	0,00	808.040.800,00	70,00	(346.303.200,00)	1.133.628.250,00
9	DAK Bidang Perdagangan	1.625.959.000,00	1.276.208.800,00	0,00	1.276.208.800,00	78,49	(349.750.200,00)	3.506.884.000,00
10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	610.578.000,00	567.138.000,00	0,00	567.138.000,00	92,89	(43.440.000,00)	1.304.472.400,00
11	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)	19.575.748.000,00	15.485.386.634,00	0,00	15.485.386.634,00	79,1	(4.090.361.366,00)	8.078.907.800,00
12	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.988.550,00
13	DAK Bidang Pendidikan	31.354.729.000,00	30.072.466.204,00	0,00	30.072.466.204,00	95,91	(1.282.262.796,00)	19.087.772.725,00
14	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.484.291.000,00	1.247.238.910,00	0,00	1.247.238.910,00	84,03	(237.052.090,00)	1.228.973.590,00
15	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.024.300.000,00	2.024.300.000,00	0,00	2.024.300.000,00	100,00	0,00	0,00
Jumlah		109.558.158.000,00	96.979.225.444,00	0,00	96.979.225.444,00	88,52	(12.578.932.556,00)	92.263.355.911,00

Grafik 11

Komposisi Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan 2018



5.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp189.951.578.000,00	Rp185.455.780.904,18	Rp167.488.330.939,00

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp189.951.578.000,00 dengan realisasi sebesar Rp185.455.780.904,18 yang menandakan terdapat kekurangan pencapaian target anggaran sebesar (Rp.4.495.797.095,82) atau 97,63%. Pendapatan transfer ini mengalami kenaikan sebesar Rp17.967.449.965,18 atau 10,73% dari TA 2018 yang berjumlah Rp167.488.330.939,00 dengan rincian sebagai berikut:

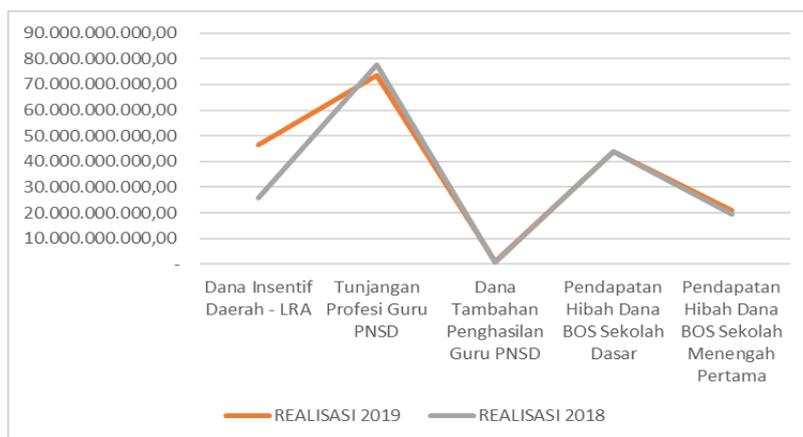
Tabel 24 Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / (KURANG) (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah - LRA	46.534.186.000,00	46.534.186.000,00	100,00	-	26.000.000.000,00
2.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	79.484.344.000,00	73.499.195.041,00	92,47	(5.985.148.959,00)	77.656.618.639,00
3.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.187.648.000,00	865.898.000,00	72,91	(321.750.000,00)	646.800.000,00
4.	Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah Dasar	43.318.400.000,00	43.782.619.453,18	101,07	464.219.453,18	43.790.712.300,00
5.	Pendapatan Hibah Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.427.000.000,00	20.773.882.410,00	106,93	1.346.882.410,00	19.394.200.000,00
Jumlah		189.951.578.000,00	185.455.780.904,18	97,63	(4.495.797.095,82)	167.488.330.939,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dana Tambahan Penghasilan Guru direalisasikan sebesar Rp865.898.000,00 atau 72,91% dari target sebesar Rp1.187.648.000,00. Dana yang disalurkan merupakan hasil verifikasi jumlah guru yang tidak memiliki sertifikasi yang penyalurannya melalui permohonan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Keuangan RI.

Grafik 12

Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian) Tahun 2019 dan 2018



5.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi **Anggaran 2019** **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp478.538.453.865,00 **Rp455.309.062.038,00** **Rp316.849.390.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp478.538.453.865,00 dengan realisasi sebesar Rp455.309.062.038,00 sehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target anggaran senilai (Rp23.229.391.827,00) atau 95,15%. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp138.459.672.038,00 atau 43,70% dari TA 2018 yang berjumlah Rp316.849.390.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 25 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
TA 2019 dan 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	321.988.453.865,00	298.759.062.038,00	92,79	(23.229.391.827,00)	266.019.978.000,00
2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	156.550.000.000,00	156.550.000.000,00	100,00	0,00	50.829.412.000,00
Jumlah		478.538.453.865,00	455.309.062.038,00	95,15	(23.229.391.827,00)	316.849.390.000,00

5.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi **Anggaran 2019** **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp321.988.453.865,00 **Rp298.759.062.038,00** **Rp266.019.978.000,00**

Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi didasari pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

**Tabel 26 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
TA 2019 dan 2018**

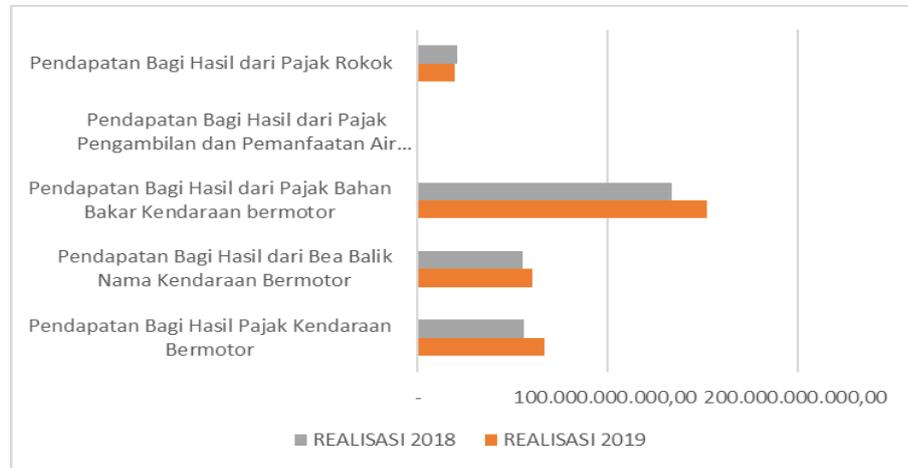
NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 KURANG SALUR (Rp)	JUMLAH (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	65.438.452.194,00	54.259.424.000,00	12.172.819.999,00	66.432.243.999,00	101,52	993.791.805,00	55.624.090.000,00
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	69.223.412.421,00	51.039.546.000,00	9.299.009.000,00	60.338.555.000,00	87,16	(8.884.857.421,00)	55.396.124.000,00
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	160.907.444.261,00	126.820.316.000,00	25.475.594.000,00	152.295.910.000,00	94,65	(8.611.534.261,00)	133.889.411.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	868.432.417,00	431.332.000,00	57.534.001,00	488.866.001,00	56,29	(379.566.416,00)	431.044.000,00
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25.550.712.572,00	15.561.860.036,00	3.641.627.002,00	19.203.487.038,00	75,16	(6.347.225.534,00)	20.679.309.000,00
JUMLAH		321.988.453.865,00	248.112.478.036,00	50.646.584.002,00	298.759.062.038,00	92,79	(23.229.391.827,00)	266.019.978.000,00

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp321.988.453.865,00 dengan realisasi sebesar Rp298.759.062.038,00 sehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target anggaran senilai (Rp23.229.391.827,00) atau 92,79%. Pendapatan ini mengalami

kenaikan sebesar Rp32.739.084.038,00 atau 12,31% dari TA 2018 yang berjumlah Rp266.019.978.000,00.

Grafik 13

Komposisi Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2019 dan 2018



5.1.2.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya	Anggaran 2019 Rp156.550.000.000,00	Realisasi 2019 Rp156.550.000.000,00	Realisasi 2018 Rp50.829.412.000,00
---------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

Bantuan Keuangan merupakan dana yang ditransfer dari entitas lain (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) yang peruntukannya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi Kalimantan Timur ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi TA 2019 adalah sebesar Rp156.550.000.000,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp105.720.588.000,00 atau 207,99% dari TA 2018 yang berjumlah Rp50.829.412.000,00 seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 27 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	156.550.000.000,00	156.550.000.000,00	100,00	0,00	50.829.412.000,00
Jumlah		156.550.000.000,00	156.550.000.000,00	100,00	0,00	50.829.412.000,00

Grafik 14
Komposisi Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya
Tahun 2019 dan 2018



5.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp3.300.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan program bantuan dari Pemerintah Pusat dengan AusAID untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM Kota Balikpapan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (Rp300.000.000,00) atau (9,09%) dari TA 2018 yang berjumlah Rp3.300.000.000,00.

Tabel 28 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00	3.300.000.000,00
	Jumlah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00	3.300.000.000,00

5.2 Belanja Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp2.786.277.578.346,00	Rp2.405.320.741.662,33	Rp2.119.971.369.743,75

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode TA yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga dimana pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.786.277.578.346,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.405.320.741.662,33 atau 86,33%. Realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp285.349.371.918,58 atau meningkat sebesar 13,46% dari Tahun 2018 yang berjumlah sebesar Rp2.119.971.369.743,75 seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

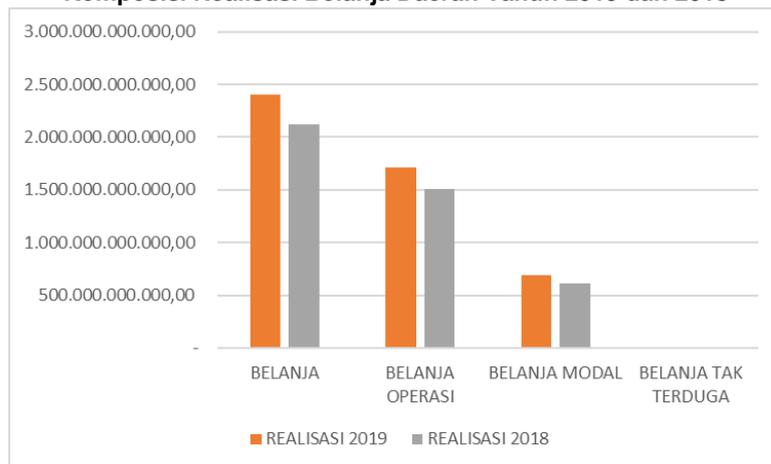
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.943.252.515.152,00	1.715.684.334.151,31	88,29	1.508.174.657.439,17	207.509.676.712,14
2.	Belanja Modal	831.783.646.194,00	687.770.681.357,02	82,69	608.340.577.920,58	79.430.103.436,44
3.	Belanja Tak Terduga	11.241.417.000,00	1.865.726.154,00	16,60	3.456.134.384,00	(1.590.408.230,00)
Jumlah		2.786.277.578.346,00	2.405.320.741.662,33	86,33	2.119.971.369.743,75	285.349.371.918,58

Rincian Belanja untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 1** sedangkan rincian belanja per kode rekening dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Grafik 15

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2018



5.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2019 **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp1.943.252.515.152,00 **Rp1.715.684.334.151,31** **Rp1.508.174.657.439,17**

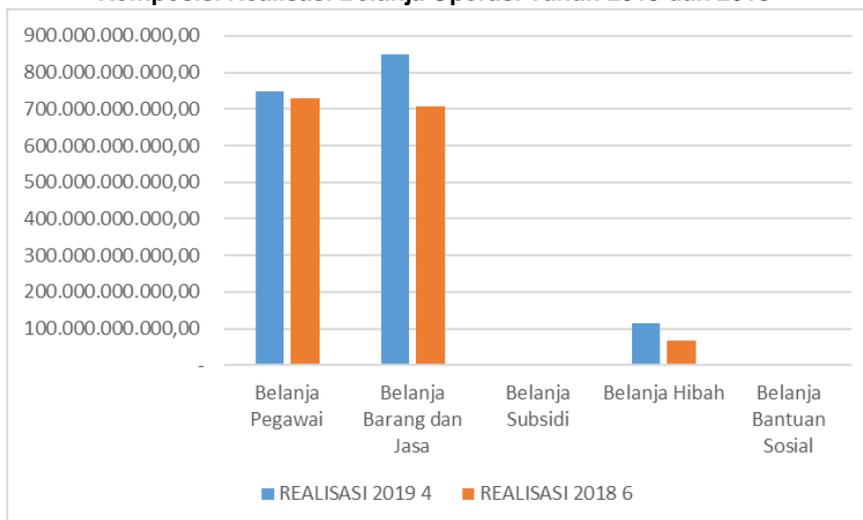
Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja subsidi. Pada Tahun 2019 Belanja Operasi dianggarkan Rp1.943.252.515.152,00 dan dapat direalisasikan Rp1.715.684.334.151,31 atau 88,29%.

Realisasi belanja operasional bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp207.509.676.712,14 atau 13,76 % seperti yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019		%	REALISASI 2018 (Rp)
				PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)		
1.	Belanja Pegawai	805.361.963.997,00	716.011.205.422,24	33.781.323.803,10	749.792.529.225,34	93,10	726.387.818.545,85
2.	Belanja Barang dan Jasa	995.350.373.311,00	837.375.260.000,50	10.566.364.611,47	847.941.624.611,97	85,19	711.557.984.716,32
3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100,00	800.000.000,00
5.	Belanja Hibah	137.867.676.844,00	114.721.353.514,00	0,00	114.721.353.514,00	83,21	68.336.760.377,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	3.672.501.000,00	2.228.826.800,00	0,00	2.228.826.800,00	60,69	1.092.093.800,00
Jumlah		1.943.252.515.152,00	1.671.336.645.736,74	44.347.688.414,57	1.715.684.334.151,31	88,29	1.508.174.657.439,17

Grafik 16
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018



Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran 2019 Rp805.361.963.997,00	Realisasi 2019 Rp749.792.529.225,34	Realisasi 2018 Rp726.387.818.545,85
--------------------------------	---	--	--

Realisasi Belanja Pegawai merupakan realisasi belanja gaji, tunjangan Pegawai Negeri Sipil, penerimaan Kepala Daerah dan Anggota DPRD, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta Uang Lembur di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada Tahun 2019 Belanja Pegawai dianggarkan senilai Rp805.361.963.997,00 dan direalisasikan sebesar Rp749.792.529.225,34 atau 93,10%. Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp23.404.710.679,49 atau 3,22% dari TA 2018. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

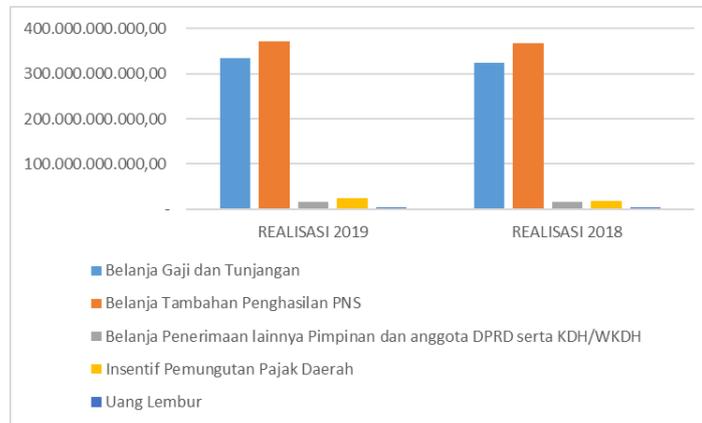
NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	350.950.696.087,00	333.769.435.726,40	95,10	323.884.507.835,40
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	396.163.987.910,00	372.017.153.335,00	93,90	368.286.925.784,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	16.229.100.000,00	15.403.600.000,00	94,91	15.610.090.000,00
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	37.094.206.000,00	24.367.328.163,94	65,69	18.606.294.926,45
5.	Uang Lembur	4.923.974.000,00	4.235.012.000,00	86,01	0,00
Jumlah		805.361.963.997,00	749.792.529.225,34	93,10	726.387.818.545,85

Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah hanya terealisasi sebesar Rp24.367.328.163,94 atau 65,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp37.094.206.000,00 karena:

1. Tidak dilakukan pencairan atas insentif pemungutan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan mengingat rekomendasi BPK Tahun 2018 bahwa kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di Balikpapan tidak termasuk objek pajak.

2. Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 bahwa besaran insentif ditetapkan melalui APBD TA berkenaan. Penganggaran insentif di triwulan IV yang dianggarkan di tahun berjalan direalisasikan di triwulan I TA berikutnya.

Grafik 17
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018



5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **Anggaran 2019** **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp995.350.373.311,00 **Rp847.941.624.611,97** **Rp711.557.984.716,32**

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp995.350.373.311,00 dan direalisasikan sebesar Rp847.941.624.611,97 atau 85,19%. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD selama tahun berjalan. Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp136.383.639.895,65 atau 19,17% dari tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.603.365.117,00	31.902.871.164,00	87,16	22.949.709.998,00
2.	Belanja Bahan/Material	31.438.630.133,00	27.888.028.314,68	88,71	19.942.872.075,00
3.	Belanja Jasa Kantor	101.111.877.512,00	81.048.067.142,00	80,16	80.822.208.209,20
4.	Belanja Premi Asuransi	8.471.179.625,00	3.853.830.250,00	45,49	4.323.026.325,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.700.680.250,00	37.665.080.119,00	74,29	35.597.952.138,75
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.353.972.450,00	14.028.236.005,00	85,78	11.913.035.794,00
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.486.378.550,00	1.701.275.598,00	68,42	1.679.917.000,00
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.721.898.000,00	1.534.210.800,00	89,10	1.738.086.300,00
9.	Belanja Sewa Alat Berat	3.509.220.000,00	3.506.807.662,37	99,93	0,00
10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.505.174.100,00	6.027.655.863,00	80,31	6.541.719.214,00
11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.195.419.900,00	76.857.075.952,95	84,28	59.306.922.271,00
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.800.469.000,00	2.593.180.599,00	92,60	1.321.154.100,00
13.	Belanja Pakaian Kerja	8.107.305.000,00	6.219.117.310,00	76,71	4.780.825.320,00
14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.039.645.000,00	3.753.910.850,00	92,93	4.002.686.447,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.828.125.141,00	80.760.171.635,87	93,01	64.774.798.862,12
16.	Belanja Pemeliharaan	100.091.981.250,00	89.420.683.822,47	89,34	48.864.133.440,00

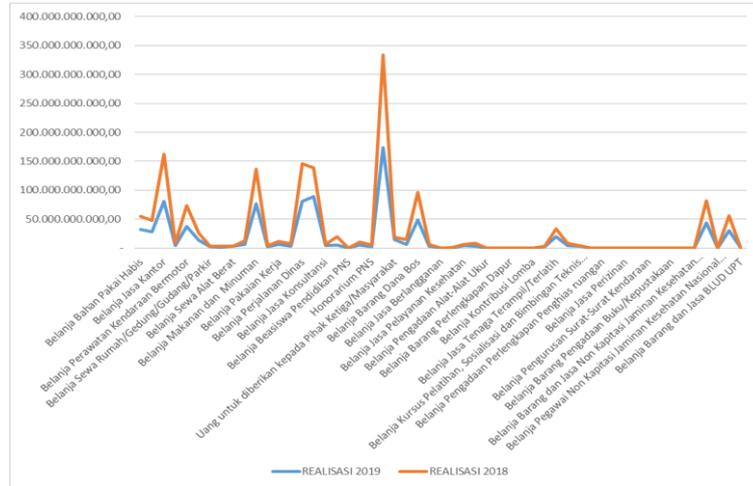
NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
17.	Belanja Jasa Konsultansi	6.815.887.000,00	4.080.407.720,00	59,87	2.134.090.260,00
18.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.128.023.250,00	4.893.870.024,56	68,66	15.276.231.195,00
19.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	343.500.000,00	200.378.203,00	58,33	122.305.909,00
20.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.340.001.500,00	5.565.661.423,00	75,83	4.990.991.515,49
21.	Honorarium PNS	3.989.775.000,00	2.724.685.000,00	68,29	2.780.350.000,00
22.	Honorarium Non PNS	184.001.729.308,00	173.327.214.180,35	94,20	163.659.579.778,00
23.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.212.230.000,00	14.723.740.000,00	96,79	4.273.100.000,00
24.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	6.459.028.000,00	5.853.018.530,00	90,62	8.899.782.754,00
25.	Belanja Barang Dana Bos	51.585.733.530,00	49.219.198.898,00	95,41	46.672.598.712,00
26.	Belanja Barang KAPITASI JKN	4.262.853.870,00	3.322.794.319,31	77,95	2.642.891.985,22
27.	Belanja Jasa Berlangganan	407.369.000,00	304.988.598,00	74,87	311.086.293,00
28.	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	609.406.700,00	471.234.584,00	77,33	334.332.385,00
29.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.352.432.200,00	3.964.427.730,80	91,09	2.776.049.034,00
30.	Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	5.124.100.000,00	3.660.293.534,34	71,43	4.313.711.036,08
31.	Belanja Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.300.000,00	1.140.000,00	87,69	0,00
32.	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	56.965.200,00	49.490.000,00	86,88	5.300.000,00
33.	Belanja Barang Perlengkapan Dapur	218.700.800,00	211.304.360,00	96,62	15.222.000,00
34.	Belanja Penyelesaian Perkara Hukum	320.000.000,00	212.000.000,00	66,25	94.500.000,00
35.	Belanja Kontribusi Lomba	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	50.000.000,00
36.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	2.908.145.000,00	2.644.834.250,00	90,95	948.753.750,00
37.	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	25.545.173.900,00	20.260.713.983,20	79,31	13.159.738.133,00
38.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	6.973.223.950,00	4.771.475.038,76	68,43	4.108.794.010,93
39.	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	7.094.502.020,00	2.841.620.535,00	40,05	1.755.700.400,00
40.	Belanja bahan Perlengkapan Kamar	27.335.000,00	24.092.000,00	88,14	0,00
41.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	13.820.000,00	13.095.000,00	94,75	0,00
42.	Belanja Pengadaan Alat-alat perbengkelan	14.685.000,00	9.150.250,00	62,31	0,00
43.	Belanja Jasa Perizinan	6.080.000,00	4.748.592,00	78,10	8.123.592,00
44.	Belanja Barang Alat Kesehatan	140.275.000,00	138.674.250,00	98,86	0,00
45.	Belanja Pengurusan Surat-Surat Kendaraan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46.	Belanja Barang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	335.000.000,00	330.859.774,23	98,76	0,00
47.	Belanja Barang Pengadaan Buku/Kepustakaan	379.494.900,00	25.900.900,00	6,83	0,00
48.	Belanja Tim Pemandu Haji Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	130.000.000,00
49.	Belanja Barang dan Jasa Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	18.055.000,00	0,00	0,00	0,00
50.	Belanja Pegawai BLUD dan Kapitasi JKN	52.607.538.815,00	43.971.983.735,00	83,58	37.583.312.699,30
51.	Belanja Pegawai Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	116.921.000,00	0,00	0,00	0,00
52.	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	46.862.038.440,00	30.351.675.041,08	64,77	25.562.354.339,44
53.	Belanja Barang dan Jasa BLUD UPT	898.728.900,00	801.751.069,00	89,21	390.037.440,79
Jumlah		995.350.373.311,00	847.941.624.611,97	85,19	711.557.984.716,32

Dari rincian di atas dapat diberikan beberapa penjelasan terkait belanja sebagai berikut:

1. Belanja Premi Asuransi sebesar Rp3.853.830.250,00 terdiri atas Belanja Premi Asuransi Jiwa senilai Rp17.100.000,00 untuk anggota Tagana (Taruna Siaga Bencana) sebanyak 95 orang pada Dinas Sosial dan Belanja Iuran Peserta BPJS Kesehatan yang peruntukannya untuk pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI) periode Januari s/d Desember 2019 senilai Rp3.836.730.250,00 pada Dinas Kesehatan.
2. Belanja Sewa Alat Berat sebesar Rp3.506.807.662,37 pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas belanja sewa eskavator sebesar Rp516.906.495,11, sewa bulldoser sebesar Rp722.860.648,13, sewa *water tank* sebesar Rp130.015.233,35, sewa *grader* sebesar Rp851.856.482,40, sewa *dump truck* sebesar Rp783.560.462,30, sewa *vibro roller* sebesar Rp501.608.341,08.
3. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp76.857.075.952,95 mengalami peningkatan sebesar Rp17.550.153.681,95 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp59.306.922.271,00 atau 129,59%. Peningkatan dari tahun sebelumnya secara signifikan terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Kota, RS Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kecamatan Balikpapan Tengah.
4. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp80.760.171.635,87 mengalami peningkatan sebesar Rp15.985.372.773,75 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64.774.798.862,12 atau 124,68%. Peningkatan dari tahun sebelumnya secara signifikan terdapat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, DKUMKMP, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan.
5. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp89.420.683.822,47 mengalami peningkatan sebesar Rp40.556.550.382,47 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp48.864.133.440,00 atau 183,00%. Peningkatan secara signifikan terdapat pada OPD RS Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD, Satpol PP, DP3AKB, Dinas Lingkungan Hidup, DKUMKMP dan Inspektorat. Terdapat realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.162.808.135,03 yang dilakukan pada objek bukan milik Pemerintah Kota Balikpapan melainkan milik kementerian/lembaga.
6. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp14.723.740.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.450.640.000,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.273.100.000,00 atau 344,57%. Peningkatan secara signifikan terdapat pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dimana belanja tersebut diperuntukkan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi atau meraih juara pada kejuaraan Porprov Tahun 2018.
7. Belanja Barang Perlengkapan Dapur sebesar Rp211.304.360,00 mengalami peningkatan sebesar Rp196.082.360,00 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.222.000,00 atau 1.388,15%. Peningkatan secara signifikan terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.
8. Belanja Penyelesaian Perkara Hukum sebesar Rp212.000.000,00 merupakan belanja proses penyelesaian perkara dan pemberian bantuan hukum atas perkara di Tahun 2018 dan Tahun 2019.

9. Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebesar Rp2.644.834.250,00 merupakan belanja untuk diklat kepemimpinan II, III dan IV serta diklat prajabatan yang dikelola pada kegiatan OPD BKPSDM.
10. Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih sebesar Rp20.260.713.983,20 merupakan belanja untuk jasa tenaga ahli, jasa narasumber, jasa instruktur/pelatih, jasa tenaga lepas, dan jasa keamanan yang terdapat pada kegiatan-kegiatan OPD.

Grafik 18
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018



Informasi lain yang dapat disampaikan mengenai Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2019 adalah terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa kode rekening belanja per kegiatan di 5 (lima) OPD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 33 Kelebihan Pembayaran pada 5 (Lima) OPD

No	OPD	Kegiatan	Rekening Belanja	Pagu Rekening (Rp)	Realisasi (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	BPBD	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan	Belanja Penggantian Suku Cadang	468.344.000,00	472.633.353,00	(4.289.353,00)	Telah Disetor di Tahun 2020
2	Dinas Sosial	Dinas/Operasional Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Cadangan Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.385.000,00	30.655.846,00	(9.270.846,00)	Telah Disetor di Tahun 2020
3	DKUMKP	Operasional UPT SIKS	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.400.000,00	4.550.400,00	(150.400,00)	Telah Disetor di Tahun 2020
4	BPKD	Pengelolaan Gedung dan Kantor (Gedung Gabungan Dinas-Dinas/GADIS)	Belanja listrik	1.044.000.000,00	1.060.602.235,00	(16.602.235,00)	Belum ada penyetoran
		Pengelolaan Gedung dan Kantor (DOME)	Belanja air	72.000.000,00	74.215.971,00	(2.215.971,00)	Belum ada penyetoran
5	Satpol PP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik	132.000.000,00	135.458.411,00	(3.458.411,00)	Belum ada penyetoran

5.2.1.3 Belanja Subsidi **Anggaran 2019** **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp1.000.000.000,00 **Rp1.000.000.000,00** **Rp800.000.000,00**

Belanja Subsidi direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dari target yang dianggarkan. Belanja Subsidi diperuntukkan bagi peningkatan pembangunan Kota Balikpapan melalui Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Belanja Subsidi jika dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 25% atau sebesar Rp200.000.000,00 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp800.000.000,00. Belanja Subsidi diperuntukkan bagi anak-anak sekolah yang memanfaatkan Bis Sekolah yang dikelola oleh Perusda Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Bis Sekolah diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kota Balikpapan meraih anugerah Wahana Tata Nugraha. Dana subsidi dipergunakan Perusda Manuntung Sukses Kota Balikpapan untuk membiayai operasional bis sehingga biaya transport untuk anak-anak sekolah menjadi terjangkau.

Perhitungan penggunaan subsidi yang diperuntukkan untuk operasional bus sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Biaya yang diperlukan untuk operasional bus sekolah adalah Rp1.077.850.170,94.
2. Biaya rata-rata per siswa adalah Rp10.111,30 yang didapat dari pembagian seluruh biaya sebesar Rp1.077.850.170,94 dengan asumsi jumlah karcis terjual dari 106.598 siswa.

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	800.000.000,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	800.000.000,00

5.2.1.4 Belanja Hibah **Anggaran 2019** **Realisasi 2019** **Realisasi 2018**
Rp137.867.676.844,00 **Rp114.721.353.514,00** **Rp68.336.760.377,00**

Belanja Hibah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp137.867.676.844,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp114.721.353.514,00 atau 83,21%. Realisasi Belanja Hibah meningkat sebesar Rp46.384.593.137,00 atau 67,88% dari realisasi TA 2018 yang berjumlah sebesar Rp68.336.760.377,00. Belanja Hibah diperuntukkan bagi peningkatan dan partisipasi masyarakat/lembaga/organisasi dalam pembangunan dan pendidikan Kota Balikpapan. Realisasi Belanja Hibah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	15.469.483.750,00	12.376.500.000,00	80,01	8.517.000.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	93.104.950.000,00	79.706.040.860,00	85,61	37.062.117.751,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	29.293.243.094,00	22.638.812.654,00	77,28	22.757.642.626,00
	Jumlah	137.867.676.844,00	114.721.353.514,00	83,21	68.336.760.377,00

Grafik 19
Komposisi Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 dan 2018



5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp3.672.501.000,00	Rp2.228.826.800,00	Rp1.092.093.800,00

Belanja Bantuan Sosial diperuntukkan bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Pada Tahun 2019 bantuan sosial direalisasikan sebesar Rp2.228.826.800,00 atau 60,69%. Realisasi bantuan sosial naik sebesar Rp1.136.733.000,00 dari realisasi TA 2018 yang berjumlah sebesar Rp1.092.093.800,00, kenaikan yang cukup signifikan tersebut dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang sumber dananya diperoleh melalui alokasi DAK Reguler 2019.

Tabel 36 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.672.501.000,00	2.228.826.800,00	60,69	1.092.093.800,00
Jumlah		3.672.501.000,00	2.228.826.800,00	60,69	1.092.093.800,00

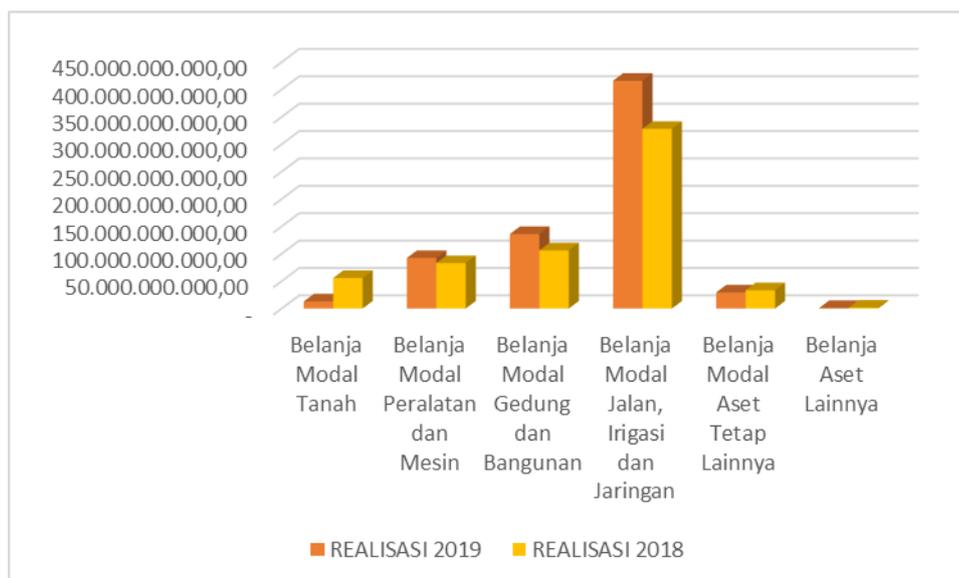
5.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp831.783.646.194,00	Rp687.770.681.357,02	Rp608.340.577.920,58

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya Pemerintah Kota Balikpapan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Pada Tahun 2019 belanja modal dianggarkan sebesar Rp831.783.646.194,00 dan direalisasikan sebesar Rp687.770.681.357,02 atau 82,69%. Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp79.430.103.436,44 atau 13,06% dibandingkan dengan TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019		%	REALISASI 2018 (Rp)
				PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)		
1.	Belanja Modal Tanah	63.292.031.750,00	13.023.016.543,24	0,00	13.023.016.543,24	20,58	55.810.737.585,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.615.791.979,00	92.286.750.125,68	0,00	92.286.750.125,68	87,38	83.075.215.847,10
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.239.368.490,00	136.068.318.925,39	0,00	136.068.318.925,39	81,85	106.275.034.611,15
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	460.874.628.830,00	415.921.306.815,97	0,00	415.921.306.815,97	90,25	328.086.131.679,59
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.216.764.645,00	29.376.833.846,74	0,00	29.376.833.846,74	85,86	33.474.330.857,74
6.	Belanja Aset Lainnya	1.545.060.500,00	1.094.455.100,00	0,00	1.094.455.100,00	70,84	1.619.127.340,00
Jumlah		831.783.646.194,00	687.770.681.357,02	0,00	687.770.681.357,02	82,69	608.340.577.920,58

Grafik 20
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018



Informasi lainnya yang perlu diungkapkan mengenai realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah terdapat beberapa kegiatan konstruksi pada beberapa OPD yang fisiknya tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak sampai TA 2019 berakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Kegiatan Konstruksi yang Fisiknya Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak Sampai Akhir Tahun Anggaran Berakhir pada Dinas Pekerjaan Umum

No	Kegiatan	Sisa Kontrak (Rp)
1.	Pembangunan penambahan ruang kerja Irban, ruang arsip dan musholla Inspektorat	395.174.392,13
2.	Pembangunan VIP Room BSCC Dome	626.961.259,52
3.	Landscape dan peningkatan stadion Batakan	142.289.372,30
4.	Pembangunan pagar keliling Stadion Batakan	285.268.328,67
5.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl. Jend. Sudirman RT.19 Kel. Damai Bahagia	87.384.211,73
6.	Pembangunan saluran drainase tersier Ruhui Rahayu II	41.604.691,56
7.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong inlet Bendali Wonorejo	76.649.190,47
8.	Peningkatan jalan Baturatna Kel. Karang Joang	126.319.565,87

No	Kegiatan	Sisa Kontrak (Rp)
9.	Peningkatan jalan Ruhui Rahayu	772.536.735,00
10.	Peningkatan jalan Ruhui Rahayu II	168.855.183,87
11.	Peningkatan jalan menuju Kampus ITK Balikpapan	282.150.687,28
12.	Peningkatan jalan Wolter Monginsidi Kel. Baru Ulu	209.317.990,50
13.	Pemeliharaan trotoar dan median Jl. Sudirman	694.050.000,00
Jumlah		3.908.561.608,90

Tabel 39 Kegiatan Konstruksi yang Fisiknya Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak Sampai Akhir Tahun Anggaran Berakhir pada Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Kegiatan	Sisa Kontrak (Rp)
1.	Perbaikan taman kawasan RSS Damai III	24.400.040,42
2.	Perbaikan taman samping Masjid At-Taqwa	15.347.056,64
Jumlah		39.747.097,06

Tabel 40 Kegiatan Konstruksi yang Fisiknya Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak Sampai Akhir Tahun Anggaran Berakhir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Kegiatan	Sisa Kontrak (Rp)
1.	Pembangunan gudang bahan baku SIKT (3 unit) DAK TA 2019	2.023.615.471,90
2.	Supervisi pembangunan gudang bahan baku SIKT (3 unit) DAK TA 2019	135.685.500,00
Jumlah		2.159.300.971,90

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1 Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Tanah	Rp63.292.031.750,00	Rp13.023.016.543,24	Rp55.810.737.585,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp63.292.031.750,00 dan direalisasikan sebesar Rp13.023.016.543,24 atau 20,58% yang menandakan terdapat penurunan sebesar (Rp42.787.721.041,76) atau (76,67%) dari realisasi TA 2018 sebesar Rp55.810.737.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019			REALISASI 2018 (Rp)
				PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	
1.	Belanja Modal Pengadaan Kolan Ikan	1.150.990.000,00	587.143.575,24	0,00	587.143.575,24	51,01	1.035.695.000,00
2.	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	2.683.131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.249.999,00
3.	Belanja modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	18.531.673.500,00	8.851.562.000,00	0,00	8.851.562.000,00	47,76	14.998.623.000,00
4.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	40.926.237.000,00	3.584.310.968,00	0,00	3.584.310.968,00	8,76	32.610.169.586,00
Jumlah		63.292.031.750,00	13.023.016.543,24	0,00	13.023.016.543,24	20,58	55.810.737.585,00

Rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain yang peruntukannya untuk pengadaan Taman Bekapai tidak dapat direalisasikan dari anggaran senilai

Rp2.683.131.250,00 karena status tanah Bekapai yang masih dalam proses pengukuran ulang tanah oleh BPN. Pengadaan ini kembali dianggarkan di Tahun 2020.

2. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung yang salah satunya adalah rencana pengadaan tanah untuk Bangunan Institut Teknologi Kalimantan tidak dapat direalisasikan karena masa berlaku penetapan lokasi berakhir di Desember 2019 sehingga tidak sempat melakukan mekanisme pembayaran.
3. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung yang antara lain adalah pengadaan di wilayah Kelurahan Teritip yang proses pembayarannya dialokasikan dan dialihkan di APBN melalui BWS III Kalimantan Timur sedangkan untuk pengadaan di lokasi Embung Aji Raden tidak terlaksana pembayarannya karena panitia pengadaan tanah baru sampai pada tahapan pembuatan peta bidang dan identifikasi tanam tumbuh.

Grafik 21
Komposisi Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan 2018



5.2.2.2 Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan dan
Mesin Rp105.615.791.979,00 Rp92.286.750.125,68 Rp83.075.215.847,10

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp105.615.791.979,00 dan direalisasikan sebesar Rp92.286.750.125,68 atau 87,38%. Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp9.211.534.278,58 atau 11,09% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp83.075.215.847,10 dengan rincian sebagai berikut:

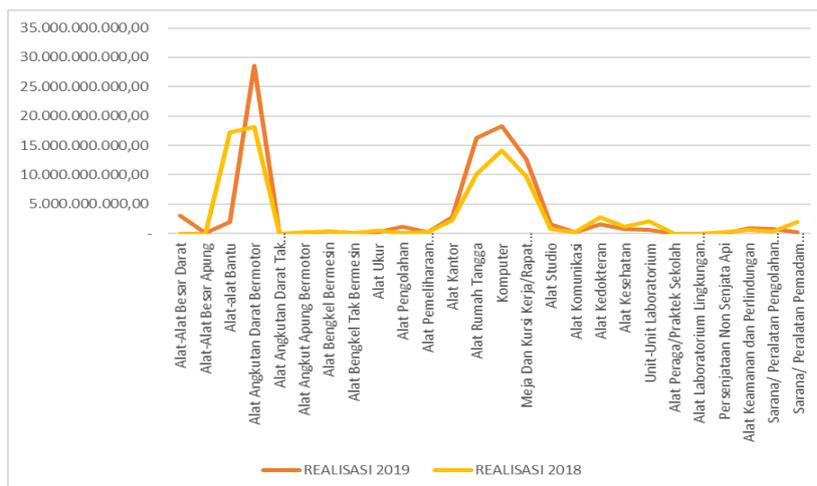
Tabel 42 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)		REALISASI 2019		%	REALISASI 2018 (Rp)
		MURNI (Rp)	PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)			
1.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	3.307.750.000,00	3.065.686.000,00	0,00	3.065.686.000,00	92,68	0,00
2.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	100.000.000,00	99.726.000,00	0,00	99.726.000,00	99,73	0,00
3.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	2.046.392.000,00	1.902.041.650,00	0,00	1.902.041.650,00	92,95	17.269.008.200,00
4.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.723.987.850,00	28.617.124.139,23	0,00	28.617.124.139,23	82,41	18.122.963.150,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	MURNI	REALISASI 2019		%	REALISASI 2018
		SETELAH PERUBAHAN (Rp)		(Rp)	PEMBAYARAN UTANG (Rp)		
5.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.500.000,00	4.214.000,00	0,00	4.214.000,00	93,64	0,00
6.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.150.000,00
7.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	302.338.676,00	289.008.500,00	0,00	289.008.500,00	95,59	371.910.000,00
8.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	23.650.000,00	21.276.560,00	0,00	21.276.560,00	89,96	23.042.000,00
9.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	186.044.200,00	178.380.450,00	0,00	178.380.450,00	95,88	493.454.000,00
10.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	1.519.948.500,00	1.219.467.880,00	0,00	1.219.467.880,00	80,23	60.863.000,00
11.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	335.204.232,00	254.597.500,00	0,00	254.597.500,00	75,95	173.593.500,00
12.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.636.176.000,00	2.749.750.745,00	0,00	2.749.750.745,00	48,79	2.276.146.436,00
13.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.706.736.171,00	16.341.589.872,50	0,00	16.341.589.872,50	92,29	10.153.533.647,00
14.	Belanja modal Pengadaan Komputer	18.945.879.850,00	18.328.770.774,00	0,00	18.328.770.774,00	96,74	14.157.166.981,00
15.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.182.187.000,00	12.616.066.013,00	0,00	12.616.066.013,00	95,71	9.739.627.000,00
16.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.759.834.500,00	1.593.993.245,00	0,00	1.593.993.245,00	90,58	704.813.200,00
17.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	306.550.000,00	280.838.970,00	0,00	280.838.970,00	91,61	233.401.200,00
18.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.062.444.650,00	1.622.836.950,95	0,00	1.622.836.950,95	78,69	2.777.061.576,10
19.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	818.966.600,00	785.899.224,00	0,00	785.899.224,00	95,96	1.146.572.280,00
20.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	607.426.750,00	573.798.249,00	0,00	573.798.249,00	94,46	2.081.619.427,00
21.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.000,00
22.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
23.	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.123.250,00
24.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	878.097.000,00	834.399.400,00	0,00	834.399.400,00	95,02	562.918.000,00
25.	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Peralatan Pengolahan Sampah	998.578.000,00	748.914.033,00	0,00	748.914.033,00	75	386.038.500,00

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
26.	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Peralatan Pemadam Kebakaran	163.100.000,00	158.369.970,00	0,00	158.369.970,00	97,1	1.934.789.500,00
Jumlah		105.615.791.979,00	92.286.750.125,68	0,00	92.286.750.125,68	87,38	83.075.215.847,10

Grafik 22
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan 2018



5.2.2.3 Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018

Gedung dan Bangunan Rp166.239.368.490,00 Rp136.068.318.925,39 Rp106.275.034.611,15

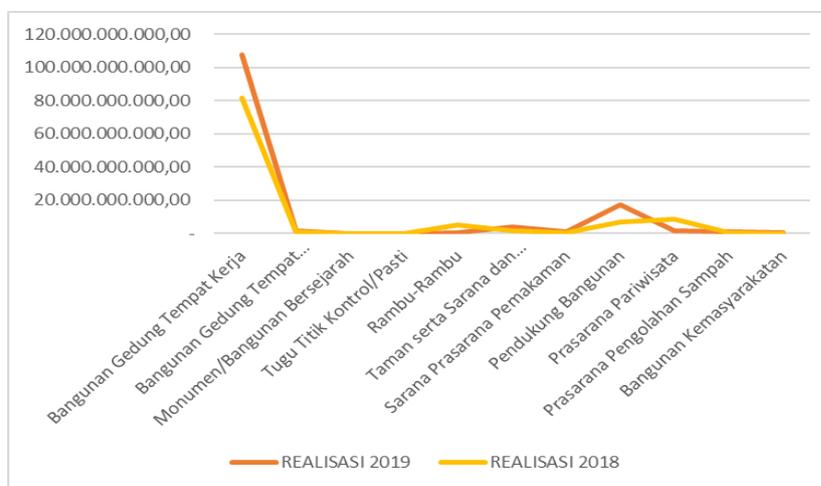
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp166.239.368.490,00 dan direalisasikan sebesar Rp136.068.318.925,39 atau 81,85% yang menandakan terdapat peningkatan sebesar Rp29.793.284.314,24 atau 28,03% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp106.275.034.611,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	130.349.679.145,00	107.586.925.170,41	0,00	107.586.925.170,41	82,54	81.728.994.253,15
2.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.638.000.000,00	1.603.963.000,00	0,00	1.603.963.000,00	97,92	1.300.142.109,00
3.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	79.000.000,00	77.659.800,00	0,00	77.659.800,00	98,3	0,00
4.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	300.000.000,00	94.097.940,81	0,00	94.097.940,81	31,37	155.940.000,00
5.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	600.400.000,00	596.171.675,00	0,00	596.171.675,00	99,3	4.955.240.840,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Taman serta Sarana dan Prasarananya	4.965.153.000,00	4.241.486.409,19	0,00	4.241.486.409,19	85,43	1.673.479.555,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Pemakaman	1.300.529.000,00	1.175.435.061,64	0,00	1.175.435.061,64	90,38	649.806.200,00

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
8.	Belanja Modal Pengadaan Pendukung Bangunan	19.486.693.795,00	17.623.835.201,56	0,00	17.623.835.201,56	90,44	6.860.739.904,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pariwisata	4.512.000.000,00	1.405.854.990,19	0,00	1.405.854.990,19	31,16	8.543.833.000,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Prasarana Pengolahan Sampah	1.421.700.000,00	1.312.323.676,59	0,00	1.312.323.676,59	92,31	406.858.750,00
11.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kemasyarakatan	1.586.213.550,00	350.566.000,00	0,00	350.566.000,00	22,1	0,00
Jumlah		166.239.368.490,00	136.068.318.925,39	0,00	136.068.318.925,39	81,85	106.275.034.611,15

Grafik 23
Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan 2018



5.2.2.4 Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp460.874.628.830,00 Rp415.921.306.815,97 Rp328.086.131.679,59

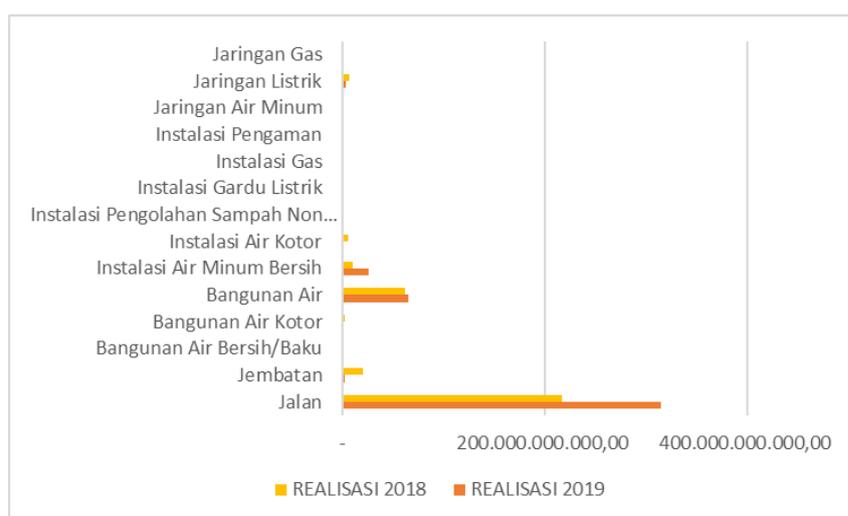
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp460.874.628.830,00 dan direalisasikan sebesar Rp415.921.306.815,97 atau 90,25% yang menandakan terdapat peningkatan sebesar Rp87.835.175.136,38 atau 26,77% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp328.086.131.679,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja modal Pengadaan Jalan	342.050.443.850,00	315.037.295.160,58	0,00	315.037.295.160,58	92,1	217.226.808.233,00
2.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	3.771.350.400,00	2.536.083.698,95	0,00	2.536.083.698,95	67,25	21.117.483.406,59
3.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	220.000.000,00	213.475.800,00	0,00	213.475.800,00	97,03	348.531.000,00
4.	Belanja modal	450.000.000,00	442.200.000,00	0,00	442.200.000,00	98,27	3.053.680.500,00

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
5.	Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja modal	81.023.535.930,00	65.932.341.762,24	0,00	65.932.341.762,24	81,37	62.469.614.875,00
6.	Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja modal	27.261.011.000,00	26.198.756.580,34	0,00	26.198.756.580,34	96,1	10.815.998.915,00
7.	Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih Belanja modal	893.141.000,00	760.296.530,79	0,00	760.296.530,79	85,13	5.842.182.000,00
8.	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Belanja modal	39.252.400,00	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	99,87	59.840.000,00
9.	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Belanja modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.800.000,00
10.	Pengadaan Instalasi Gas Belanja modal	177.000.000,00	173.855.000,00	0,00	173.855.000,00	98,22	0,00
11.	Pengadaan Instalasi Pengaman Belanja modal	135.000.250,00	130.585.600,00	0,00	130.585.600,00	96,73	57.750.000,00
12.	Pengadaan Jaringan Air Minum Belanja modal	616.000.000,00	493.586.247,27	0,00	493.586.247,27	80,13	28.052.750,00
13.	Pengadaan Jaringan Listrik Belanja modal	3.677.894.000,00	3.412.562.745,00	0,00	3.412.562.745,00	92,79	6.729.390.000,00
14.	Pengadaan Jaringan Gas Belanja modal	560.000.000,00	551.067.690,80	0,00	551.067.690,80	98,4	0,00
Jumlah		460.874.628.830,00	415.921.306.815,97	0,00	415.921.306.815,97	90,25	328.086.131.679,59

Grafik 24
Komposisi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019



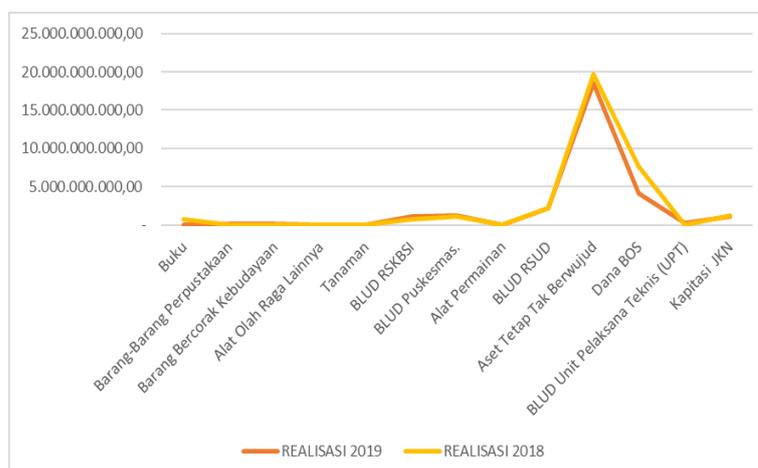
5.2.2.5 Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Aset Tetap Lainnya	Rp34.216.764.645,00	Rp29.376.833.846,74	Rp33.474.330.857,74

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp34.216.764.645,00 dan direalisasikan sebesar Rp29.376.833.846,74 atau 85,86% yang menandakan terdapat penurunan sebesar (Rp4.097.497.011,00) atau (12,24%) dari realisasi TA 2018 sebesar Rp33.474.330.857,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019 PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Belanja modal Pengadaan Buku	124.800.000,00	85.886.900,00	0,00	85.886.900,00	68,82	716.461.552,00
2.	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	181.450.000,00	157.854.000,00	0,00	157.854.000,00	87,00	0,00
3.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	165.707.200,00	161.723.000,00	0,00	161.723.000,00	97,60	70.850.000,00
4.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	21.800.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	87,16	0,00
5.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	100.000.000,00	97.240.000,00	0,00	97.240.000,00	97,24	0,00
6.	Belanja Modal BLUD RSKBSI	1.657.500.000,00	1.159.577.487,00	0,00	1.159.577.487,00	69,96	724.423.808,00
7.	Belanja Modal BLUD	1.834.559.125,00	1.252.767.660,00	0,00	1.252.767.660,00	68,29	1.118.632.926,99
8.	Puskesmas Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan	156.857.300,00	93.018.750,00	0,00	93.018.750,00	59,30	37.437.400,00
9.	Belanja Modal BLUD RSUD	3.203.500.000,00	2.257.163.240,00	0,00	2.257.163.240,00	70,46	2.250.931.840,00
10.	Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud	20.380.341.750,00	18.532.544.979,50	0,00	18.532.544.979,50	90,93	19.669.422.196,75
11.	Belanja Modal Dana BOS	4.700.638.470,00	4.129.360.849,74	0,00	4.129.360.849,74	87,85	7.674.235.004,00
12.	Belanja Modal BLUD Unit Pelaksana Teknis (UPT)	395.977.800,00	309.570.800,00	0,00	309.570.800,00	78,18	0,00
13.	Belanja Modal Kapitasi JKN	1.293.633.000,00	1.121.126.180,50	0,00	1.121.126.180,50	86,66	1.211.936.130,00
Jumlah		34.216.764.645,00	29.376.833.846,74	0,00	29.376.833.846,74	85,86	33.474.330.857,74

Grafik 25
Komposisi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018



5.2.2.6 Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Aset Lainnya	Rp1.545.060.500,00	Rp1.094.455.100,00	Rp1.619.127.340,00

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengadaan *software/aplikasi* di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp1.545.060.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.094.455.100,00 atau 70,84% yang menandakan terdapat penurunan sebesar (Rp524.672.240,00) atau (32,40%) dari realisasi TA 2018 sebesar Rp1.619.127.340,00.

Tabel 46 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	MURNI (Rp)	REALISASI 2019		%	REALISASI 2018 (Rp)
				PEMBAYARAN UTANG (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)		
1.	Aset Lain-lain	1.545.060.500,00	1.094.455.100,00	0,00	1.094.455.100,00	70,84	1.619.127.340,00
Jumlah		1.545.060.500,00	1.094.455.100,00	0,00	1.094.455.100,00	70,84	1.619.127.340,00

5.2.3 Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp11.241.417.000,00	Rp1.865.726.154,00	Rp3.456.134.384,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp11.241.417.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.865.726.154,00. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2019 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar (Rp1.590.408.230,00) atau (46,02%).

Belanja Tidak Terduga TA 2019 direalisasikan untuk rehabilitasi dan bantuan atas bencana yang terjadi di Kota Balikpapan selama Tahun 2019 serta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dan PBB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2019 serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB dan PBB

No	Uraian	Jumlah
1.	Penanganan Bencana Kebakaran pemukiman di Jl.Sulawesi RT.51, RT.52 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah	Rp407.525.000,00
2.	Supervisi dan Penanganan Bencana Tanah Longsor di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota	Rp1.370.660.000,00
3.	Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Daerah BPHTB atas nama Purwanto Budi Utomo	Rp12.000.000,00
4.	Pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama PT. Wijaya Karya Realty	Rp1.746.154,00
5.	Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB pemenang lelang atas nama Edwin Adiwinata	Rp73.795.000,00
Jumlah		Rp1.865.726.154,00

5.2.4 TRANSFER

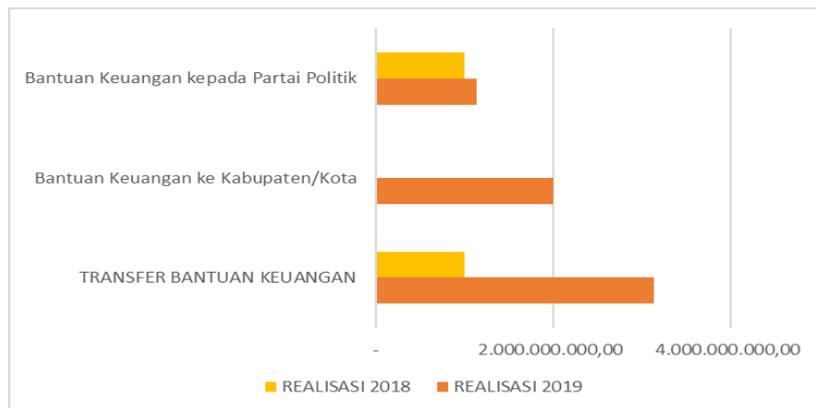
5.2.4.1 Transfer/Bantuan Keuangan	Anggaran 2019 Rp3.160.000.000,00	Realisasi 2019 Rp3.141.232.527,00	Realisasi 2018 Rp998.806.796,00
--	---	--	--

Transfer Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp3.160.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.141.232.527,00 atau 99,41%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 menunjukkan kenaikan sebesar Rp2.142.425.731,00 atau 214,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
2.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.160.000.000,00	1.141.232.527,00	98,38	998.806.796,00
Jumlah		3.160.000.000,00	3.141.232.527,00	99,41	998.806.796,00

Grafik 26
Komposisi Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan 2018



5.2.4.1.1 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	Anggaran 2019 Rp2.000.000.000,00	Realisasi 2019 Rp2.000.000.000,00	Realisasi 2018 Rp0,00
---	---	--	--

Transfer/Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atas bencana alam gempa yang terjadi pada bulan September 2018 dan gempa di Kota Mataram Provinsi NTB selama bulan Juli-Agustus 2018. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan telah ditransfer sepenuhnya atau 100% dengan masing-masing kota direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.2.4.1.2 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Rp1.160.000.000,00	Rp1.141.232.527,00	Rp998.806.796,00

Transfer/Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan bantuan Pemerintah Kota Balikpapan kepada sebelas partai politik di Balikpapan yang dialokasikan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebesar Rp1.160.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.141.232.527,00 atau 98,38%. Realisasi transfer bantuan keuangan TA 2019 ini, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 menunjukkan kenaikan sebesar Rp142.425.731,00 atau 14,26%. Rincian penerima bantuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2019 dan 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	%	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	283.050.000,00	283.027.507,00	99,99	278.132.140,00
2.	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	106.750.000,00	106.701.192,00	99,95	102.235.796,00
3.	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	113.400.000,00	113.390.386,00	99,99	95.083.768,00
4.	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	176.500.000,00	176.494.743,00	100,00	157.122.784,00
5.	Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	81.100.000,00	81.098.767,00	100,00	0,00
6.	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	140.350.000,00	140.337.496,00	99,99	134.348.032,00
7.	Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	100.550.000,00	100.522.760,00	99,97	107.198.260,00
8.	Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	32.000.000,00	31.486.451,00	98,40	47.229.676,00
9.	Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat	76.550.000,00	76.515.608,00	99,96	77.456.340,00
10.	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Indonesia	20.925.000,00	11.873.489,00	56,74	0,00
11.	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	28.825.000,00	19.784.128,00	68,64	0,00
Jumlah		1.160.000.000,00	1.141.232.527,00	98,38	998.806.796,00

5.2.4.2 SURPLUS ANGGARAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp262.410.286.428,00)	Rp61.066.518.481,90	Rp109.766.444.693,35

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan

memperoleh surplus anggaran senilai Rp61.066.518.481,90 atau (23,27%) dari defisit yang dianggarkan di APBD sebesar (Rp262.410.286.428,00).

5.3. PEMBIAYAAN Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Rp262.410.286.428,00 Rp262.765.199.606,15 Rp181.868.841.735,20

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sehubungan dengan menutup/mendanai defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.

5.3.1 Penerimaan Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Rp291.635.286.428,00 Rp291.631.786.428,55 Rp199.228.175.213,20

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp291.635.286.428,00 terdiri dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya sebesar Rp291.631.786.428,55.

Tabel 50 Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA	291.635.286.428,00	291.631.786.428,55	100,00	199.228.175.213,20
	Jumlah	291.635.286.428,00	291.631.786.428,55	100,00	199.228.175.213,20

5.3.2 Pengeluaran Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
Rp29.225.000.000,00 Rp28.866.586.822,40 Rp17.359.333.478,00

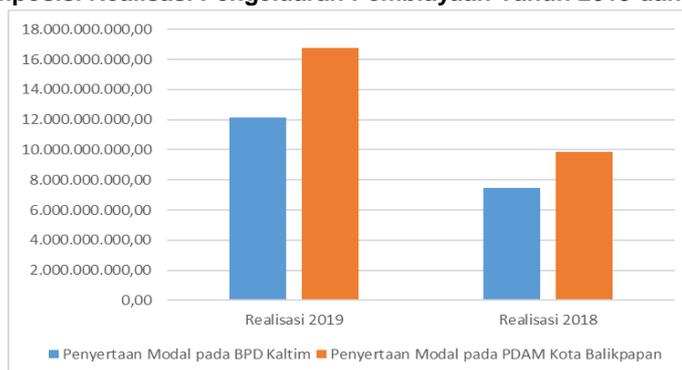
Pengeluaran Pembiayaan merupakan investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengeluaran pembiayaan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp29.225.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp28.866.586.822,40 atau 98,77%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar Rp11.507.253.344,40 atau 66,29%. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 51 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada BPD Kalimantan Timur	12.311.250.540,00	12.130.000.000,00	98,53	7.475.000.000,00
2.	Penyertaan Modal pada PDAM Kota Balikpapan	16.913.749.460,00	16.736.586.822,40	98,95	9.884.333.478,00
	Jumlah	29.225.000.000,00	28.866.586.822,40	98,77	17.359.333.478,00

Grafik 27

Komposisi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dan 2018



5.3.3	Pembiayaan Netto	Anggaran 2019 Rp262.410.286.428,00	Realisasi 2019 Rp262.765.199.606,15	Realisasi 2018 Rp181.868.841.735,20
--------------	-------------------------	---	--	--

Dalam pelaksanaan APBD TA 2019, realisasi pembiayaan netto adalah sebesar Rp262.765.199.606,15 atau 100,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp262.410.286.428,00. Pembiayaan netto merupakan hasil dari pengurangan penerimaan pembiayaan sebesar Rp291.631.786.428,55 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp28.866.586.822,40.

5.3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	Anggaran 2019 Rp0,00	Realisasi 2019 Rp323.831.718.088,05	Realisasi 2018 Rp291.635.286.428,55
--------------	---	---------------------------------------	--	--

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun berkenaan sebesar Rp323.831.718.088,05 merupakan selisih realisasi pendapatan yang tidak tercapai dengan penghematan belanja daerah dan pembiayaan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 52 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
Pendapatan	2.527.027.291.918,00	2.469.528.492.671,23	2.230.736.621.233,10
Belanja dan Transfer	2.789.437.578.346,00	2.408.461.974.189,33	2.120.970.176.539,75
Surplus/(Defisit)	(262.410.286.428,00)	61.066.518.481,90	109.766.444.693,35
Pembiayaan Netto	262.410.286.428,00	262.765.199.606,15	181.868.841.735,20
SILPA	0,00	323.831.718.088,05	291.635.286.428,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp323.831.718.088,05 juga dapat dilihat melalui sumber kasnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian SiLPA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Kas Di Kas Daerah	272.604.485.686,69
2.	Investasi Jangka Pendek (Deposito)	0,00
3.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00
4.	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00
5.	Kas Di BLUD	44.574.156.579,92
6.	Setara Kas	0,00
7.	Kas Lainnya	6.653.075.821,44
Total		323.831.718.088,05

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu TA dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA TA yang lalu dan TA yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

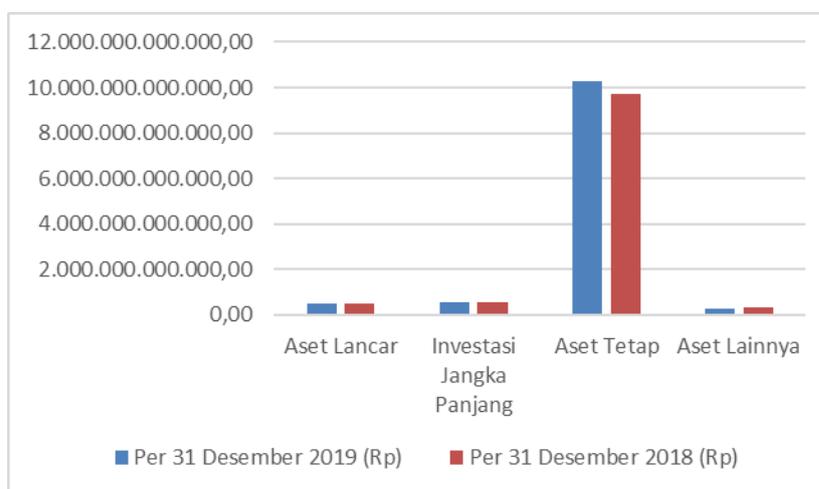
5.5 ASET **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp 11.649.591.539.644,30 **Rp11.074.760.685.563,60**

Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2019 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Tahun 2019 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Aset TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1.	Aset Lancar	509.925.695.257,56	486.623.509.408,26	23.302.185.849,30
2.	Investasi Jangka Panjang	568.675.826.544,79	535.761.455.494,62	32.914.371.050,17
3.	Aset Tetap	10.296.946.525.667,20	9.744.998.239.549,85	551.948.286.117,35
4.	Aset Lainnya	274.043.492.174,79	307.377.481.110,89	(33.333.988.936,10)
Jumlah		11.649.591.539.644,30	11.074.760.685.563,60	574.830.854.080,74

Grafik 28
Komposisi Aset Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

5.5.1 ASET LANCAR **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp509.925.695.257,56 **Rp486.623.509.408,26**

Aset Lancar sebesar Rp509.925.695.257,56 merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

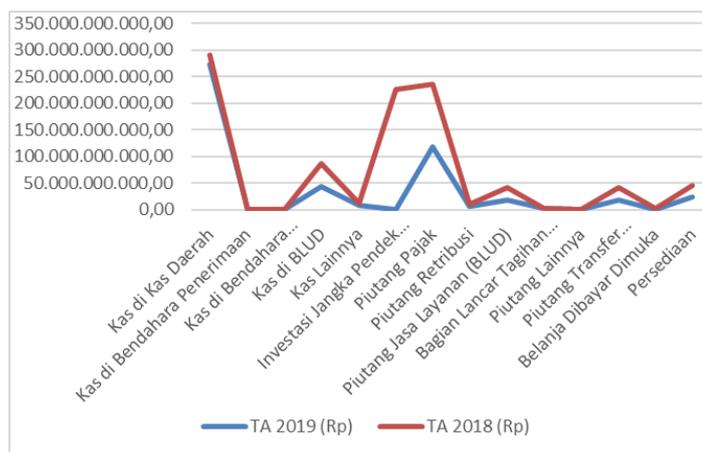
Aset lancar TA 2019 bila dibandingkan dengan TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Aset Lancar TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	272.604.485.686,69	18.865.606.301,90	253.738.879.384,79
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	140.669.256,00	(140.669.256,00)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.170.000,00	(1.170.000,00)
4.	Kas di BLUD	42.998.060.309,42	43.590.874.844,52	(592.814.535,10)
5.	Kas Lainnya	8.229.172.091,94	4.036.966.026,13	4.192.206.065,81
6.	Investasi Jangka Pendek (Setara Kas)	0,00	225.000.000.000,00	(225.000.000.000,00)
7.	Piutang Pajak	117.791.750.835,56	118.023.453.484,70	(231.702.649,14)
8.	Piutang Retribusi	6.001.845.108,61	3.746.431.642,06	2.255.413.466,55
9.	Piutang Jasa Layanan (BLUD)	17.901.722.510,31	24.303.907.501,14	(6.402.184.990,83)
10.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.399.386.043,33	1.171.896.963,53	227.489.079,80
11.	Piutang Lainnya	638.870.725,50	365.230.377,50	273.640.348,00
12.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.285.117.115,00	24.502.418.270,00	(7.217.301.155,00)
13.	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	336.038.363,06	0,00	336.038.363,06
14.	Belanja Dibayar Dimuka	1.066.063.135,52	1.666.805.720,55	(600.742.585,03)
15.	Persediaan	23.673.183.332,62	21.208.079.020,23	2.465.104.312,39
	Jumlah	509.925.695.257,56	486.623.509.408,26	23.302.185.849,30

Grafik 29

Komposisi Aset Lancar Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



5.5.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

Rp272.604.485.686,69

Rp18.865.606.301,90

Saldo kas di kas daerah sebesar Rp272.604.485.686,69 merupakan saldo kas Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di rekening giro pada Bank Kalimantan Timurtara per 31 Desember 2019. Saldo kas di kas daerah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 57 Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1.	Rekening Kas Umum Daerah Kota Balikpapan	0031300508	272.604.485.686,69	18.865.606.301,90	253.738.879.384,79
Jumlah			272.604.485.686,69	18.865.606.301,90	253.738.879.384,79

5.5.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **Per 31 Desember 2019**
Rp0,00 **Per 31 Desember 2018**
Rp140.669.256,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan Tahun anggaran berakhir. Setelah melalui pemeriksaan kas kepada OPD per 31 Desember 2019 tidak terdapat saldo kas yang belum disetorkan. Perbandingan Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2019 dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	OPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	500.000,00	(500.000,00)
2	BPPDRD	0,00	85.053.256,00	(85.053.256,00)
3	Dinas Pertanian	0,00	55.116.000,00	(55.116.000,00)
Jumlah		0,00	140.669.256,00	(140.669.256,00)

5.5.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran **Per 31 Desember 2019**
Rp0,00 **Per 31 Desember 2018**
Rp1.170.000,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran OPD atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang belum disetorkan sampai TA berakhir. Pada saat dilakukan pemeriksaan kas per 31 Desember 2019 diketahui tidak terdapat sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD yang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 59 Sisa UP/GU/TU yang belum disetor per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	OPD	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Inspektorat	0,00	1.170.000,00	(1.170.000,00)
Jumlah		0,00	1.170.000,00	(1.170.000,00)

5.5.1.4 Kas di BLUD **Per 31 Desember 2019**
Rp42.998.060.309,42 **Per 31 Desember 2018**
Rp43.590.874.844,52

Merupakan Saldo Kas per 31 Desember 2019 yang terdapat pada sepuluh Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu. Saldo Kas di BLUD pada Tahun 2019 sebesar Rp42.998.060.309,42 bila dibandingkan dengan Tahun berikutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 60 Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	RSKB Sayang Ibu	11.389.174.318,53	11.042.591.121,34	346.583.197,19
2	RSUD	27.732.682.024,21	27.563.469.136,66	169.212.887,55
3	Sepinggan	626.876.988,50	726.428.167,60	(99.551.179,10)
4	Klandasan Ilir	526.190.989,64	766.726.249,77	(240.535.260,13)
5	Prapatan	146.998.650,40	84.429.636,64	62.569.013,76
6	Mekar Sari	308.231.745,79	301.590.837,07	6.640.908,72
7	Baru Tengah	371.851.907,99	547.033.856,80	(175.181.948,81)
8	Karang Joang	486.550.366,50	687.073.079,48	(200.522.712,98)
9	Kariangau	90.203.235,42	164.048.556,46	(73.845.321,04)
10	Manggar Baru	489.937.495,14	611.563.766,03	(121.626.270,89)
11	Baru Ulu	134.788.481,09	223.301.029,94	(88.512.548,85)
12	Gunung Bahagia	353.073.803,07	383.528.867,59	(30.455.064,52)
13	UPT Labkesda	341.500.303,14	489.090.539,14	(147.590.236,00)
Jumlah		42.998.060.309,42	43.590.874.844,52	(592.814.535,10)

Selain tabel perbandingan di atas, dapat dirincikan posisi keuangan BLUD per 31 Desember 2019 sesuai rekening bank dan tunai pada tabel berikut:

Tabel 61 Saldo Kas di BLUD Sesuai Rekening Bank dan Tunai per 31 Desember 2019

No	Unit Kerja	Bank	No. Rekening	Saldo Akhir	
				Bank (Rp)	Tunai (Rp)
1.	Rumah Sakit Sayang Ibu	BNI	8989422088	3.530.989.244,00	543.000,00
		BTN	000004501300006233	7.857.642.074,53	0,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Mandiri	1490011231125	645.184.829,53	17.208.176,90
		BRI	012101002212306	27.077.218.017,78	0,00
3.	Puskesmas Klandasan Ilir	BRI	012101003098307	524.838.989,64	1.352.000,00
4.	Puskesmas Baru Tengah	BRI	0000012101003099303	371.851.907,99	0,00
5.	Puskesmas Mekar Sari	Bank Kalimantan Timurtara	0031556104	1.177.731,79	754.000,00
		BRI	0000012101003095309	306.300.014,00	0,00
6.	Puskesmas Karang Joang	Bank Kalimantan Timurtara	0031556155	2.752.294,00	415.000,00
		BRI	012101003104302	483.383.072,50	0,00
7.	Puskesmas Sepinggan	Bank Kalimantan Timurtara	1351500596	1.898.974,50	845.000,00
		BRI	012101003105308	624.133.014,00	0,00

No	Unit Kerja	Bank	No. Rekening	Saldo Akhir	
				Bank (Rp)	Tunai (Rp)
8.	Puskesmas Kariangau	BRI	0000012101003102300	89.228.235,42	975.000,00
9.	Puskesmas Prapatan	BRI	012101003096305	146.998.650,40	0,00
10.	Puskesmas Manggar Baru	Bank Kalimantan Timurtara	01211501029	5.300.341,14	1.175.000,00
		BRI	012101003122300	483.462.154,00	0,00
11.	Puskesmas Baru Ulu	BRI	012101003097301	134.788.481,09	0,00
12.	Puskesmas Gunung Bahagia	BRI	0000012101003110303	351.468.020,07	1.605.783,00
13.	UPT Labkesda	BRI	012101003111309	341.500.303,14	0,00
Sub Jumlah				42.980.116.349,52	24.872.959,90
Jumlah					43.004.989.309,42

Terdapat perbedaan antara saldo kas di BLUD RSUD Damai Beriman dengan Saldo Rekening Koran sebesar Rp6.929.000,00 karena kesalahan transfer yang tidak diakui sebagai pendapatan sehingga RSUD mengakuinya sebagai utang.

5.5.1.5 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

Rp8.229.172.091,94

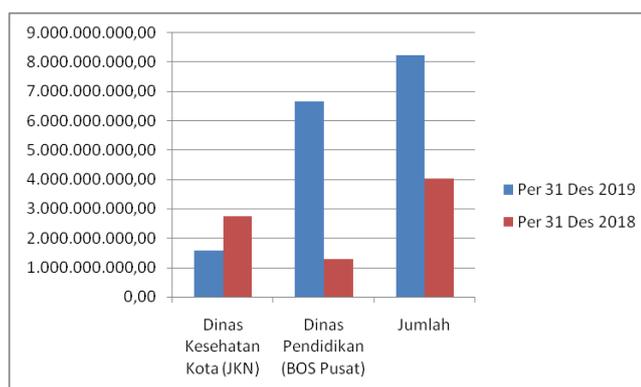
Rp4.036.966.026,13

Saldo Kas Lainnya merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di 15 (lima belas) Puskesmas Dinas Kesehatan, dan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada di 23 (dua puluh tiga) SMP dan 136 (seratus tiga puluh enam) SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo Kas Lainnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 62 Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	OPD	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	Dinas Kesehatan Kota (JKN)	1.576.096.270,50	2.738.813.790,13	(1.162.717.519,63)
2	Dinas Pendidikan (BOS Pusat)	6.653.075.821,44	1.298.152.236,00	5.354.923.585,44
Jumlah		8.229.172.091,94	4.036.966.026,13	4.192.206.065,81

Grafik 30
Komposisi Kas Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



Rincian lebih lanjut tentang Saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 3** (untuk perhitungan saldo kas BOS reguler) dan **Lampiran 4** (untuk perhitungan saldo kas JKN).

5.5.1.6 Investasi Jangka Pendek **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp0,00 **Rp225.000.000.000,00**

Investasi Jangka Pendek pada aset lancar merupakan deposito Pemerintah Kota Balikpapan yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Balikpapan dan Bank Tabungan Negara (BTN). Per 31 Desember 2019, dana deposito tersebut telah ditransfer ke rekening kas umum daerah sehingga tidak terdapat saldo. Perbandingan dana deposito di Tahun 2019 dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Bank	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
1.	BRI Cabang Balikpapan	0,00	150.000.000.000,00
	No. DC 0060322	0,00	30.000.000.000,00
	No. DC 0060318	0,00	20.000.000.000,00
	No. DB 9997309	0,00	25.000.000.000,00
	No. DB 9997702	0,00	25.000.000.000,00
	No. DB 9996122	0,00	50.000.000.000,00
2.	BTN	0,00	75.000.000.000,00
	No. DC 1556542	0,00	10.000.000.000,00
	No. DC 1556543	0,00	10.000.000.000,00
	No. DC 1556544	0,00	10.000.000.000,00
	No. DC 1556545	0,00	10.000.000.000,00
	No. DC 1556546	0,00	10.000.000.000,00
	No. DC 1556154	0,00	25.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	225.000.000.000,00

5.5.1.7 Piutang Pajak **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp279.111.307.455,16 **Rp267.675.844.077,45**

Piutang pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp279.111.307.455,16 adalah pajak daerah yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya tetapi belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2019. Metode perhitungan piutang berdasarkan umur dan kemungkinan tertagih. Adapun rincian piutang pajak Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (+) (Rp)	Mutasi Kurang (-) (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	16.829.419.644,00	(4.563.213.906,00)	12.266.205.738,00	1.591.547.329,00	(2.848.495.183,59)	11.009.257.883,41
2	Pajak Restoran	3.814.514.151,00	(57.449.676,00)	3.757.064.475,00	856.836.868,00	(646.269.064,00)	3.967.632.279,00

No	Jenis Pajak	Saldo Per 31 Des 2018	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi	Mutasi Tambah (+)	Mutasi Kurang (-)	Saldo Per 31 Des 2019
3	Pajak Hiburan	1.021.264.697,10	(225.320.122,10)	795.944.575,00	375.778.002,00	(319.572.260,00)	852.150.317,00
4	Pajak Reklame	5.236.165.782,75	(655.887.080,00)	4.580.278.702,75	632.119.690,00	(296.288.975,00)	4.916.109.417,75
5	Pajak Penerangan Jalan	365.656.228,00	0,00	365.656.228,00	0,00	(209.664.839,00)	155.991.389,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	420.852.000,00	0,00	420.852.000,00	0,00	0,00	420.852.000,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	303.451.046,60	(25.208.484,00)	278.242.562,60	159.491.364,00	(40.826.704,60)	396.907.222,00
8	Pajak Parkir	699.084.536,00	23.183.400,00	722.267.936,00	3.129.000,00	(23.694.900,00)	701.702.036,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	4.518.000,00	0,00	4.518.000,00	0,00	0,00	4.518.000,00
	Jumlah	28.694.926.085,45	(5.503.895.868,10)	23.191.030.217,35	3.618.902.253,00	(4.384.811.926,19)	22.425.120.544,16
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2)	238.969.945.047,00	(5.175.394.146,00)	233.794.550.901,00	37.261.280.772,00	(14.380.617.707,00)	256.675.213.966,00
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.972.945,00	0,00	10.972.945,00	0,00	0,00	10.972.945,00
	Total	267.675.844.077,45	(10.679.290.014,10)	256.996.554.063,35	40.880.183.025,00	(18.765.429.633,19)	279.111.307.455,16

Pada saldo awal piutang Tahun 2018 terdapat koreksi kurang sebesar (Rp10.679.290.014,10) yang terdiri atas:

- Koreksi pajak hotel sebesar (Rp4.563.213.906,00) terdiri atas pengurangan sesuai SK Pembatalan TS: 970/647/BPPDRD tgl 5/4/2019 (NPWPD-000945) sebesar (Rp3.666.811.017,00), pengurangan sesuai SK No: 188.46/132/BPPDRD tanggal 25 Juli 2019 (NPWPD - 00029321) sebesar (Rp841.019.293,00) dan Lebih saji Piutang (Lunas tgl 13/4/2017) NPWPD: 0032237 sebesar (Rp55.383.596,00).
- Koreksi pajak restoran sebesar (Rp57.449.676,00) terdiri atas lebih saji Piutang (Lunas pada tanggal 10/12/2015) pada NPWPD No : 0034030.
- Koreksi pajak hiburan sebesar (Rp225.320.122,10) terdiri atas lebih saji /pembatalan ketetapan (NPWPD: 0027693,th.2015,th.2016) dan (NPWPD: 29343, th.2015, th.2016).
- Koreksi pajak reklame sebesar (Rp655.887.080,00) terdiri dari pengurangan sesuai SK Pembatalan No.188-46/20-TAP/REK/BPPDRD/2019 (NPWPD.0024817) sebesar (Rp9.625.000,00), penambahan atas Kurang saji piutang (NPWPD.0035651) Tahun 2018 sebesar Rp1.462.650,00, pengurangan pada (NPWPD: 00279-th.2010, 005092- th.2012, 0014813-th.2013, 0019826-th.2012-th.2007, 0021790-th.2007, 0023139-th.2007, 0029639-th.2012) sebesar (Rp647.724.730,00).
- Koreksi pajak air bawah tanah sebesar (Rp25.208.484,00) pada NPWPD.002160 Tahun 2012 dan Tahun 2013.
- Koreksi pajak parkir atas kurang saji ketetapan NPWPD 0020425 sebesar Rp23.183.400,00.
- Koreksi piutang PBB-P2 sebesar (Rp5.175.394.146,00) terdiri atas kurang saji piutang Tahun 2013 sebesar Rp394.463,00, pembatalan piutang senilai (Rp525.586.287,00) dan penghapusan piutang senilai (Rp4.650.202.322,00)

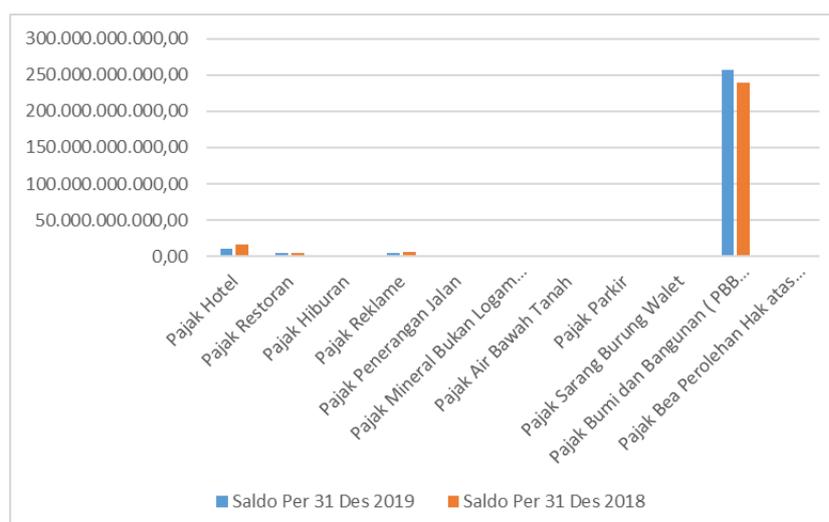
Untuk penghapusan piutang pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 1993-2009 senilai Rp4.650.202.322,00 ditetapkan sesuai Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-380/2019 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1993 s.d 2009. Penghapusan piutang tersebut melalui proses verifikasi Inspektorat Kota Balikpapan pada 5.471 Nomor Objek Pajak dan berdasar ketentuan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa. Rekapitulasi Piutang PBB-P2 yang telah dihapus dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 65 Rekapitulasi Jumlah Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1993 s.d 2009 yang Dilakukan Penghapusan

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Nop PBB-P2 Yang Dilakukan Penghapusan	Jumlah Piutang PBB-P2 Yang Dilakukan Penghapusan (Rp)
1.		Manggar	65	134.700.634,00
2.	Balikpapan Timur	Manggar Baru	11	16.903.358,00
3.		Lamaru	18	2.588.730,00
4.		Teritip	22	6.830.228,00
Total			116	161.022.950,00
1.		Sepinggan	144	34.850.838,00
2.		Gn. Bahagia	93	40.079.428,00
3.		Damai Baru	7	10.777.662,00
4.	Balikpapan Selatan	Damai Bahagia	63	142.565.753,00
5.		Sepinggan Baru	19	6.481.255,00
6.		Sepinggan Raya	4	553.951,00
7.		Sungai Nangka	7	157.042.465,00
Total			337	392.351.352,00
1.		Prapatan	98	30.521.533,00
2.		Klandasan Ulu	2880	2.889.824.029,00
3.	Balikpapan Kota	Klandasan Ilir	320	493.384.204,00
4.		Damai	113	77.060.162,00
5.		Telaga Sari	108	21.621.797,00
Total			3519	3.512.411.725,00
1.		Gn. Samarinda	53	12.272.399,00
2.		Batu Ampar	71	27.803.374,00
3.	Balikpapan Utara	Karang Joang	96	42.555.071,00
4.		Muara Rapak	133	24.647.178,00
5.		Gn. Samarinda Baru	11	32.899.081,00

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Nop PBB-P2 Yang Dilakukan Penghapusan	Jumlah Piutang PBB-P2 Yang Dilakukan Penghapusan (Rp)
6.		Graha Indah	13	3.540.870,00
Total			377	143.717.973,00
1.	Balikpapan Tengah	Gn. Sari Ilir	189	107.338.955,00
2.		Gn. Sari Ulu	104	63.166.946,00
3.		Kr. Rejo	152	55.280.029,00
4.		Karang Jati	64	11.231.895,00
5.		Mekar Sari	66	65.983.711,00
6.		Sumber Rejo	99	22.212.873,00
Total			674	325.214.409,00
1.	Balikpapan Barat	Baru Tengah	67	23.151.116,00
2.		Baru Ilir	64	16.497.477,00
3.		Baru Ulu	140	34.502.262,00
4.		Kariangau	54	11.602.951,00
5.		Marga Sari	53	18.785.368,00
6.		Margo Mulyo	70	10.944.739,00
Total			448	115.483.913,00
Total Keseluruhan			5.471	4.650.202.322,00

Grafik 31
Komposisi Piutang Pajak Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



Penjelasan atas kenaikan/(penurunan) piutang pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel Tahun 2019 sebesar Rp11.009.257.883,41, menurun 34,58% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp16.829.419.644,00 karena terdapat beberapa

wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atas piutang pajaknya. Nilai Piutang Pajak ini belum termasuk kekurangan penerimaan Pajak Hotel masa pajak Tahun 2019 yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dan telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Tahun 2020 sebesar Rp1.099.879.740,98 yang terdiri dari pokok pembayaran sebesar Rp963.026.459,42 dan sanksi administratif sebesar Rp136.853.281,56.

2. Piutang Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp3.967.632.279,00, meningkat 4,01% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp3.814.514.151,00 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pelaporan pajaknya.
3. Piutang Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp852.150.317,00, menurun 16,56% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp1.021.264.697,10 karena terdapat beberapa wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atas piutang pajaknya. Nilai Piutang Pajak ini belum termasuk kekurangan penerimaan Pajak Hiburan masa pajak Tahun 2019 yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dan telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Tahun 2020 sebesar Rp39.097.143,76 yang terdiri dari pokok pembayaran sebesar Rp32.347.601,00 dan sanksi administratif sebesar Rp6.749.542,76.
4. Piutang Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp4.916.109.417,75 menurun 6,11% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp5.236.165.782,75 karena terdapat beberapa wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan.
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 sebesar Rp155.991.389,00 menurun 57,34% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp365.656.228,00 karena adanya setoran PLN yang dilunasi di Tahun 2019.
6. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 sebesar Rp420.852.000,00 sama dengan piutang Tahun 2018 sebesar Rp420.852.000,00 karena terdapat beberapa wajib pajak tidak pembayar piutang pajaknya.
7. Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2019 sebesar Rp396.907.222,00 meningkat 30,80% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp303.451.046,60 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan.
8. Piutang Pajak Parkir Tahun 2019 sebesar Rp701.702.036,00, meningkat 0,37% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp699.084.536,00 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas piutang pajaknya.
9. Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019 sebesar Rp4.518.000,00, tidak mengalami peningkatan dan pengurangan dari piutang Tahun 2018. Piutang berasal dari wajib pajak yang sudah tidak beroperasi lagi (wajib pajak pasif).
10. Piutang PBB-P2 Tahun 2019 sebesar Rp256.675.213.966,00 meningkat 7,41% dari piutang Tahun 2018 sebesar Rp238.969.945.047,00 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan.
11. Piutang Pajak BPHTB Tahun 2019 sebesar Rp10.972.945,00 sama dengan piutang Tahun 2018 sebesar Rp10.972.945,00 karena terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayar piutang pajaknya.

Daftar Mutasi Piutang Pajak berikut penjelasan koreksi saldo dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.5.1.7.1 Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
(Rp161.319.556.619,60) (Rp149.652.390.592,76)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar (Rp161.319.556.619,60) merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang pajak dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Perbandingan Penyisihan Piutang Pajak di Tahun 2019 dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 66 Daftar penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(161.319.556.619,60)	(149.652.390.592,76)	(11.667.166.026,84)
	Jumlah	(161.319.556.619,60)	(149.652.390.592,76)	(11.667.166.026,84)

Rincian Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.5.1.8 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp16.853.425.793,86 Rp13.349.972.877,35

Piutang retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.853.425.793,86 merupakan piutang atas pungutan retribusi di OPD untuk retribusi Pelayanan Pasar, kebersihan, izin gangguan, IMB, pengendalian menara telekomunikasi, pemakaian kekayaan daerah, tempat rekreasi, kesehatan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Adapun rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Des 2018 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Pasar Sepinggan	875.679.134,00	0,00	875.679.134,00	464.040.354,00	544.850.025,00	794.869.463,00
2	Pasar Damai	415.340.488,00	0,00	415.340.488,00	470.394.353,00	369.736.500,00	515.998.341,00
3	Pasar Klandasan I	2.153.488.340,00	0,00	2.153.488.340,00	833.118.875,00	533.896.821,00	2.452.710.394,00
4	Pasar Klandasan II	2.474.295.479,00	0,00	2.474.295.479,00	1.604.980.410,00	636.786.800,00	3.442.489.089,00
5	Pasar Inpres Kebun Sayur	335.466.925,00	0,00	335.466.925,00	603.616.078,00	580.651.650,00	358.431.353,00
6	Pasar Penampungan 'A'	244.423.348,00	0,00	244.423.348,00	512.245.350,00	522.994.800,00	233.673.898,00
7	Pasar Pandansari	2.177.930.561,00	0,00	2.177.930.561,00	1.500.428.364,00	718.160.730,00	2.960.198.195,00
8	Pasar Kampung Baru Tengah dan Loak Besi	345.834.431,00	0,00	345.834.431,00	347.904.000,00	301.528.440,00	392.209.991,00
9	Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam	952.449.103,75	(126.484.022,11)	825.965.081,64	1.969.463.624,13	1.578.709.828,61	1.216.718.877,16

No	Jenis Retribusi	Saldo Per 31 Des 2018	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019
	Kebakaran						
10	Retribusi Kesehatan	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.008.000	2.040.000	1.008.000,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aset BPKD)	476.057.713,60	0,00	476.057.713,60	1.026.270.248,64	904.317.211,54	598.010.750,70
12	Retribusi Tempat Rekreasi	259.950.000,00	0,00	259.950.000,00	0,00	64.950.000	195.000.000,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Produksi Tahu/Tempe)	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	17.500.000	13.000.000	21.000.000,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa)	86.375.000,00	0,00	86.375.000,00	112.843.750	86.375.000	112.843.750,00
15	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.169.627.200,00	0,00	1.169.627.200,00	5.830.089.800	5.029.418.800	1.970.298.200,00
16	Retribusi kebersihan PDAM	736.498.116,00	0,00	736.498.116,00	8.858.640.021	8.854.357.683	740.780.454,00
17	Retribusi Ijin Gangguan	348.610.500,00	0,00	348.610.500,00	0,00	0,00	348.610.500,00
18	Retribusi IMB	249.514.538,00	0,00	249.514.538,00	0,00	0,00	249.514.538,00
19	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	29.892.000,00	0,00	29.892.000,00	247.107.200,00	27.899.200,00	249.100.000,00
	Jumlah	13.349.972.877,35	(126.484.022,11)	13.223.488.855,24	24.399.650.427,77	20.769.673.489,15	16.853.465.793,86

Koreksi saldo awal pada retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebesar (Rp126.484.022,11) diperoleh dari nilai piutang Tahun 2017 yang belum tercatat senilai Rp26.730.500,00 dan keputusan pengurangan nilai piutang Tahun 2018 sebesar (Rp152.854.522,11).

5.5.1.8.1 Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
(Rp10.851.580.685,25) (Rp9.603.541.235,29)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp10.851.580.685,25) merupakan taksiran nilai piutang retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga dimasa akan datang. Penyisihan piutang retribusi dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 68 Daftar penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi	(10.851.580.685,25)	(9.603.541.235,29)	(1.248.039.449,96)
	Jumlah	(10.851.580.685,25)	(9.603.541.235,29)	(1.248.039.449,96)

Daftar Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

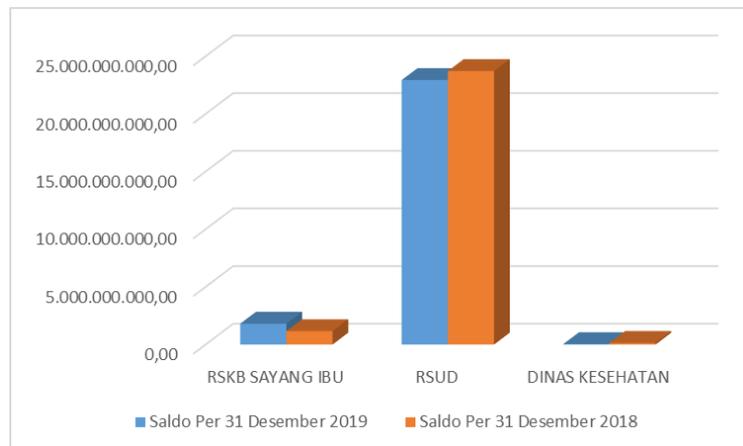
5.5.1.9 Piutang Jasa Layanan Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018 (BLUD)
Rp24.780.076.204,00 Rp25.023.683.705,00

Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.780.076.204,00 merupakan nilai tagihan terhadap Pelayanan kesehatan pada BLUD. Piutang tersebut dikelola oleh BLUD RSKB Sayang Ibu Balikpapan, 9 (sembilan) BLUD Puskesmas dan UPT Labkesda di Dinas Kesehatan Kota serta Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Mutasi Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Piutang BLUD (Jasa Layanan) per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	OPD	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (+) (Rp)	Mutasi Kurang (-) (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
1	RSKB SAYANG IBU	1.162.232.171,00	0,00	1.162.232.171,00	1.723.280.200,00	1.078.405.471,00	1.807.106.900,00
2	RSUD	23.720.878.534,00	0,00	23.720.878.534,00	22.938.053.804,00	23.720.878.534,00	22.938.053.804,00
3	DINAS KESEHATAN	140.573.000,00	0,00	140.573.000,00	34.915.500,00	140.573.000,00	34.915.500,00
	Jumlah	25.023.683.705,00	0,00	25.023.683.705,00	24.696.249.504,00	24.939.857.005,00	24.780.076.204,00

Grafik 32 Komposisi Piutang Jasa Layanan (BLUD) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



Daftar rincian mutasi Piutang Jasa Layanan Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.5.1.9.1 Penyisihan Piutang Jasa Layanan Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
(Rp6.878.353.693,69) (Rp719.776.203,86)

Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp6.878.353.693,69) merupakan taksiran nilai Piutang Jasa Layanan pada BLUD yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari pihak ketiga di masa akan datang.

Penyisihan Piutang Jasa Layanan dihitung berdasarkan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penyisihan piutang jasa layanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70 Daftar Penyisihan Piutang Jasa Layanan per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan	(6.878.353.693,69)	(719.776.203,86)	(6.158.577.489,83)
Jumlah		(6.878.353.693,69)	(719.776.203,86)	(6.158.577.489,83)

Rincian Umur dan penyisihan Piutang Jasa Layanan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.5.1.10 Bagian Lancar Tagihan Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Penjualan Angsuran Rp1.406.418.134,00 Rp1.177.785.893,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.406.418.134,00 merupakan nilai tagihan penjualan angsuran atas penjualan rumah dinas yang telah jatuh tempo s.d. Tahun 2019 dari total penjualan angsuran seluruhnya sebesar Rp11.719.736.062,50. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari atas:

Tabel 71 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (+) (Rp)	Mutasi Kurang (-) (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
1.	Rumah Dinas Tahun 2010 (Balikpapan Baru)	1.177.785.893,00	0,00	1.177.785.893,00	225.886.743,00	0,00	1.403.672.636,00
2	Rumah Dinas Tahun 2019 (Balikpapan Baru)	0,00	0,00	0,00	2.745.498,00	0,00	2.745.498,00
Jumlah		1.177.785.893,00	0,00	1.177.785.893,00	228.632.241,00	0,00	1.406.418.134,00
Penyisihan		(5.888.929,47)	0,00	(5.888.929,47)	(1.143.161,20)	0,00	(7.032.090,67)
Jumlah Setelah Penyisihan		1.171.896.963,53	0,00	1.171.896.963,53	227.489.079,80	0,00	1.399.386.043,33

5.5.1.11 Piutang Lainnya Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp1.345.757.429,00 Rp1.072.879.989,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.345.757.429,00, merupakan piutang Pemerintah Kota Balikpapan atas pihak ketiga yang bukan merupakan kategori piutang pajak dan retribusi. Piutang lainnya terdiri atas tunggakan kontribusi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Balikpapan dalam perjanjian kerjasama *Built, Operate and Transfer* (BOT), piutang gaji pensiunan dan piutang sewa kantin di RSUD Damai Beriman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Daftar Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Pihak III	Saldo Tahun 2019 (Rp)	Saldo Tahun 2018 (Rp)
1	BOT - Pasar Muara Rapak	PT Hasta Kreasi Utama	4,00	4,00
2	BOT - Pasar Baru Square	PT Hasta Kreasi Utama	500.000.000,00	250.000.000,00

No.	Uraian	Pihak III	Saldo Tahun 2019 (Rp)	Saldo Tahun 2018 (Rp)
3	BOT - Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur (Plaza Bunsay)	PT Gusher Mitra Sejahtera	675.722.525,00	702.456.585,00
4	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Novotel	0,00	0,00
5	Penyewaan Aset Tanah	Hotel Ibis	0,00	31.250.000,00
6	Gaji Pegawai / Taspen	Pegawai Pensiunan	161.964.900,00	63.604.500,00
7	Piutang Kerjasama Sewa / RSUD	Kantin RSUD dan sewa ruangan	6.750.000,00	25.568.900,00
8	Piutang Studi Banding & Uji Validasi Data (RSUD)		1.320.000,00	0,00
Jumlah			1.345.757.429,00	1.072.879.989,00
Penyisihan			(706.886.703,50)	(707.649.611,50)
Jumlah Setelah Penyisihan			638.870.725,50	365.230.377,50

Daftar rincian Penyisihan Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

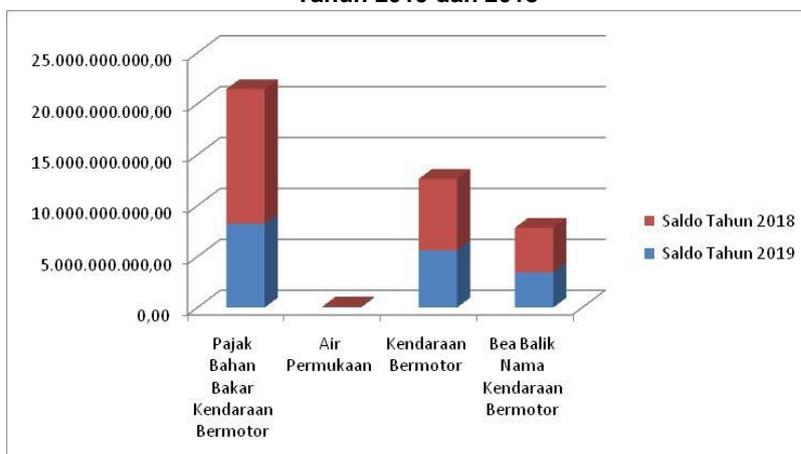
5.5.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Per 31 Desember 2019 Rp17.371.977.000,00	Per 31 Desember 2018 Rp24.625.546.000,00
-----------------	---	---	---

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp17.371.977.000,00 merupakan piutang atas kurang bayar Dana Bagi Hasil Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 045/K.101/2020 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2019. Daftar rincian dan penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 73 Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2018 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Saldo Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi Tambah (+) (Rp)	Mutasi Kurang (-) (Rp)	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Provinsi - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.199.120.000,00	0,00	13.199.120.000,00	8.237.979.000,00	13.199.120.000,00	8.237.979.000,00
2	Dana Bagi Hasil Provinsi - Air Permukaan	36.020.000,00	0,00	36.020.000,00	65.542.000,00	36.020.000,00	65.542.000,00
3	Dana Bagi Hasil Provinsi - Kendaraan Bermotor	7.011.774.000,00	0,00	7.011.774.000,00	5.614.721.000,00	7.011.774.000,00	5.614.721.000,00
4	Dana Bagi Hasil Provinsi - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.378.632.000,00	0,00	4.378.632.000,00	3.453.735.000,00	4.378.632.000,00	3.453.735.000,00
JUMLAH		24.625.546.000,00	0,00	24.625.546.000,00	17.371.977.000,00	24.625.546.000,00	17.371.977.000,00
PENYISIHAN (0,5%)		(123.127.730,00)	0,00	(123.127.730,00)	(86.859.885,00)	(123.127.730,00)	(86.859.885,00)
JUMLAH SETELAH PENYISIHAN		24.502.418.270,00	0,00	24.502.418.270,00	17.285.117.115,00	24.748.673.730,00	17.285.117.115,00

Grafik 33
Komposisi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2019 dan 2018



5.5.1.13 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp336.038.363,06 **Rp0,00**

Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa merupakan nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang pembayarannya melebihi prestasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI. Nilai Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp336.038.363,06 terdiri dari: Pekerjaan Jalan Menuju Kampus ITK sebesar Rp70.537.671,82, Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu II sebesar Rp72.366.507,36, dan Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu sebesar Rp193.134.183,88 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan tersebut kembali dilanjutkan di Tahun 2020. Rincian uang muka pengadaan barang/jasa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 74 Daftar Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	336.038.363,06	0,00	336.038.363,06
Jumlah		336.038.363,06	0,00	336.038.363,06

5.5.1.14 Belanja Dibayar Dimuka **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp1.066.063.135,52 **Rp1.666.805.720,55**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp1.066.063.135,52 merupakan pembayaran beberapa OPD atas sewa gedung, pemeliharaan peralatan kantor dan jasa internet yang perikatan dengan pihak ketiga melewati Tahun 2019. Daftar Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Sewa Gedung	21.533.060,11	28.602.739,73	(7.069.679,62)
2.	Pemeliharaan dibayar Dimuka	1.494.819,67	970.915,07	523.904,60
3.	Jasa internet	1.043.035.255,74	1.634.800.965,75	(591.765.710,01)
4.	Belanja BBM	0,00	2.431.100,00	(2.431.100,00)
Jumlah		1.066.063.135,52	1.666.805.720,55	(600.742.585,03)

Daftar Rincian Belanja Dibayar Dimuka per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.5.1.15 Persediaan **Per 31 Desember 2019**
Rp 23.673.183.332,62 **Per 31 Desember 2018**
Rp21.208.079.020,23

Persediaan sebesar Rp23.673.183.332,62 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada OPD yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, benda berharga, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, alat kebersihan dan alat listrik, bahan makanan serta perlengkapan lapangan dan kesehatan yang belum digunakan per 31 Desember 2019.

Rincian persediaan per jenis barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sedangkan rincian per jenis barang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Tabel 76 Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	2.183.839.102,21	1.749.199.270,11	434.639.832,10
2	Blanko/Cetakan	2.874.904.171,93	2.267.808.056,14	607.096.115,79
3	Benda Berharga	20.633.700,00	14.472.500,00	6.161.200,00
4	Obat-obatan	7.993.207.769,81	5.223.593.472,66	2.769.614.297,15
5	Bahan Kimia	1.190.823.525,48	697.127.341,36	493.696.184,12
6	Bahan Bangunan	535.714.637,28	455.601.960,00	80.112.677,28
7	Cadangan Energi	201.332.846,88	67.653.145,58	133.679.701,30
8	Alat Kebersihan	345.118.307,13	288.018.954,75	57.099.352,38
9	Alat Kesehatan	3.100.611.562,55	6.699.888.385,93	(3.599.276.823,38)
10	Alat Listrik	192.521.630,00	124.085.065,00	68.436.565,00
11	Perlengkapan Lapangan	629.478.394,00	304.246.633,00	325.231.761,00
12	Bahan Makanan dan Minuman	954.390.145,35	815.437.535,70	138.952.609,65
13	Bibit Tanaman & Ternak	3.450.607.540,00	2.305.421.700,00	1.145.185.840,00
14	Barang diserahkan ke Pihak Ketiga	0,00	195.525.000,00	(195.525.000,00)
Jumlah		23.673.183.332,62	21.208.079.020,23	2.465.104.312,39

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik kecuali untuk persediaan obat-obatan dengan menggunakan metode perpetual. Adapun metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode *First In First Out (FIFO)*.

Dari Tabel 76 dapat dijelaskan bahwa terdapat sisa persediaan pada OPD Dinas Pendidikan yang didapat dari belanja yang bersumber dari BOS Reguler (Non APBD) seperti pada daftar berikut:

**Tabel 77 Rincian Persediaan yang Bersumber Dari BOS Reguler
per 31 Desember 2019 dan 2018**

No	Uraian	BOS Reguler 2019 (Rp)	BOS Reguler 2018 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) (Rp)
1.	Alat tulis kantor	251.646.897,00	171.026.405,00	80.620.492,00
2.	Blanko/Cetakan	6.114.550,00	4.391.800,00	1.722.750,00
3.	Benda Berharga	6.158.000,00	2.019.000,00	4.139.000,00
4.	Obat-obatan	22.562.233,00	7.227.500,00	15.334.733,00
5.	Bahan Kimia	190.000,00	389.000,00	(199.000,00)
6.	Bahan Bangunan	1.164.500,00	880.000,00	284.500,00
7.	Cadangan Energi	2.040.900,00	590.000,00	1.450.900,00
8.	Alat Kebersihan	68.309.056,00	19.093.500,00	49.215.556,00
9.	Alat Kesehatan	25.000,00	70.000,00	(45.000,00)
10.	Alat listrik	18.110.190,00	2.872.500,00	15.237.690,00
11.	Perlengkapan lapangan	8.690.000,00	105.000,00	8.585.000,00
12.	Bahan Makanan dan Minuman	40.000,00	14.000,00	26.000,00
13.	Bibit Tanaman Dan Ternak	375.000,00	43.000,00	332.000,00
Jumlah		385.426.326,00	208.721.705,00	176.704.621,00

5.5.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2019
Rp568.675.826.544,79

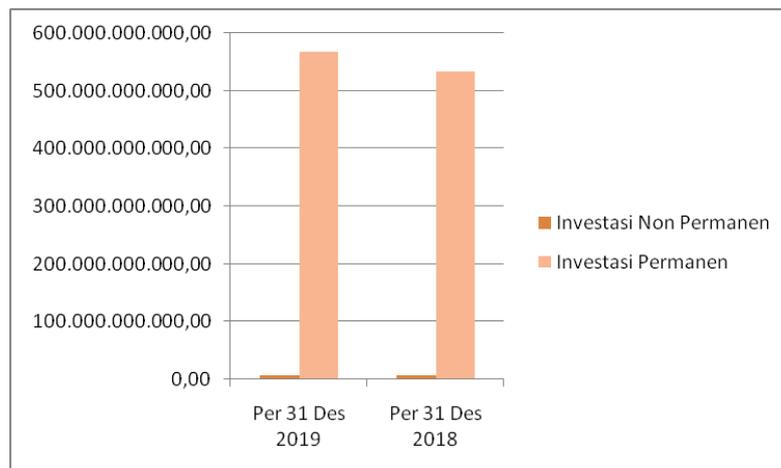
Per 31 Desember 2018
Rp535.761.455.494,62

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp568.675.826.544,79 merupakan Investasi Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
Investasi Non Permanen	6.914.567.347,22	6.875.780.577,47	38.786.769,75
Penyisihan	(3.870.981.265,08)	(3.956.233.493,95)	85.252.228,87
Investasi Permanen	565.632.240.462,65	532.841.908.411,10	32.790.332.051,55
Jumlah	568.675.826.544,79	535.761.455.494,62	32.914.371.050,17

Grafik 34
Komposisi Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



Jumlah Investasi Nonpermanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.914.567.347,22 setelah dikurangi penyisihan sebesar (Rp3.870.981.265,08) menjadi Rp3.043.586.082,14 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 79 Rincian Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Nama	Nomor Rekening (Rp)	Nilai Tahun 2019 (Rp)	Nilai Tahun 2018 (Rp)
1.	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	6.010.015.991	444.062.167,12	432.420.900,55
2.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	6.010.005.415	152.898.991,73	153.138.991,73
3.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Pertanian	6.010.016.052	257.860.389,89	250.500.589,89
4.	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	6.010.016.056	347.305.331,48	343.645.331,48
5.	Pemda Dati II BPP CQ Perkebunan Kenaf	6.010.015.995	209.199.999,12	200.801.067,12
6.	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	6.010.016.051	174.901.908,55	175.141.908,55
7.	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	6.010.015.994	12.513.805,79	12.753.805,79
8.	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	6.010.015.212	140.812.630,64	141.052.630,64
9.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	6.010.016.054	93.790.000,00	94.010.000,00
10.	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	6.010.013.415	76.315.480,42	56.649.230,42
11.	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemerintah Kota	6.010.011.915	113.255.027,99	116.225.055,98
12.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	6.010.015.993	1.001.413.493,32	1.000.216.921,32
13.	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	6.010.016.057	3.890.238.121,17	3.899.224.144,00
Jumlah Dana Bergulir Bruto			6.914.567.347,22	6.875.780.577,47
Jumlah Penyisihan			(3.870.981.265,08)	(3.956.233.493,95)
Jumlah Bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)			3.043.586.082,14	2.919.547.083,52

Daftar Investasi Nonpermanen (Dana Bergulir) berdasarkan Umur dapat dilihat dalam **Lampiran 13**.

Penjelasan lebih lanjut atas Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana Bergulir Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan dana pinjaman yang dikelola oleh instansi teknis/OPD, yaitu Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan dan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian pada Bank Muamalat Cabang Balikpapan. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada petani, peternak, nelayan dan pengusaha kecil. Sampai dengan 31 Desember 2019 total dana yang dikelola untuk program tersebut sebesar Rp6.914.567.347,22.

Namun dari dana yang disalurkan tersebut dana yang diragukan/tidak dapat ditagih adalah sebesar (Rp3.870.981.265,08) sehingga jumlah bersih dana bergulir (*net realizable value*) adalah sebesar Rp3.043.586.082,14

2. Penyediaan Fasilitas Kredit UMKMK sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penjaminan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Penempatan awal penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 dan ditempatkan dalam bentuk rekening giro pada Bankaltimta. Penyediaan fasilitas kredit UMKMK tersebut tidak disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Balikpapan karena tidak memenuhi definisi operasional Investasi Nonpermanen Dana Bergulir sesuai Buletin Teknis Nomor 7 tentang Dana Bergulir. Akun tersebut dikelompokkan pada kas yang dibatasi penggunaannya yang dikelompokkan pada Aset lain-lain.
3. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih disebabkan antara lain oleh:
 - a. nasabah telah meninggal dunia;
 - b. nasabah telah pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru; dan
 - c. nasabah sudah tua renta, tidak sanggup mengangsur dan termasuk keluarga miskin.
4. Besar suku bunga dana bergulir yang dikenakan terhadap peminjam (nasabah) adalah sebesar 10% untuk dana bergulir jenis Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga (IK-IRT), sedangkan dana bergulir lainnya sebesar 0%.
5. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui pengembalian dana bergulir oleh nasabah tidak berjalan lancar sesuai yang diharapkan, sebagian besar nasabah tidak bisa menepati janji pelunasan seperti yang dituangkan dalam akad perjanjian. Diketahui sebagian besar nasabah menunggak lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun yang lalu Pemerintah Kota Balikpapan mengambil kebijakan tidak menggulirkan lagi dana bergulir, namun berfokus pada upaya-upaya pengamanan/pengembalian terhadap dana bergulir yang telah disalurkan. Disamping itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyerahkan beberapa penagihan piutang dana bergulir tersebut kepada KPKNL. Dengan kebijakan tersebut jumlah dana bergulir yang tidak disalurkan kembali ke nasabah mencapai saldo sebesar Rp3.058.880.484,56 per 31 Desember 2019. Daftar Dana Bergulir yang tidak disalurkan (Saldo di Bank dan yang ditarik KPKNL) dan yang disalurkan ke nasabah Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp566.882.725.603,65 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan kepada BUMD yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Penyertaan Modal pada Bank Kalimantan Timur	127.350.000.000,00	115.220.000.000	12.130.000.000
2.	Penyertaan pada PDAM Kota Balikpapan	391.898.692.407,65	371.253.682.563,10	20.645.009.845

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
3.	Penyertaan pada Perusda Manuntung Sukses Kota Balikpapan	46.383.548.055,00	46.368.225.848,00	15.322.207
Jumlah		565.632.240.462,65	532.841.908.411,10	32.790.332.051,55

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan menyertakan modal kepada PDAM sebesar Rp16.736.586.822,40,00 dan kepada Bankaltimtara sebesar Rp12.130.000.000. Selain itu, dapat diinformasikan bahwa Penilaian Investasi Permanen pada Bankaltimtara menggunakan metode biaya (*cost method*). Sedangkan penilaian investasi permanen pada PDAM Kota Balikpapan dan Perusda Manuntung Sukses Kota Balikpapan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*). Metode penilaian ini dimuat dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Rincian Investasi Jangka Panjang dimuat dalam **Lampiran 15**.

5.5.3 Aset Tetap	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Rp 13.171.855.096.072,40	Rp12.269.992.078.780,20

Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Saldo nilai perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp13.171.855.096.072,40 dan Rp12.269.992.078.780,20 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian aset tetap Tahun 2019 dan perbandingan dengan Tahun sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 81 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

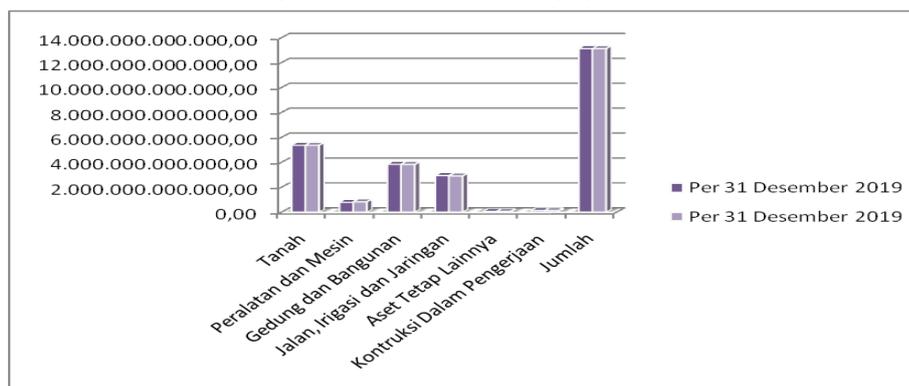
No.	Uraian	Nilai Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Nilai Tahun 2019 (Rp)	%
1.	Tanah	5.163.128.337.258,57	205.341.230.895,71	5.368.469.568.154,30	3,98
2.	Peralatan dan Mesin	695.493.307.846,49	135.838.788.876,90	831.332.096.723,39	19,5
3.	Gedung dan Bangunan	3.725.704.272.838,92	105.723.376.717,26	3.831.427.649.556,19	0,03
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.525.044.403.333,93	386.133.289.847,43	2.911.177.693.181,36	15,3
5.	Aset Tetap Lainnya	63.058.816.574,24	(311.364.389,00)	62.747.452.185,24	0,49
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.562.940.928,03	69.137.695.343,91	166.700.636.271,94	70,9
Jumlah		12.269.992.078.780,20	901.863.017.292,21	13.171.855.096.072,40	7,35

Pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 82 Reklasifikasi Antar Golongan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 Per 31 Desember 2019 (Rp)	Reklasifikasi Antar Golongan Aset tetap Per 31 Desember 2019 (Rp)	Nilai Aset Tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2016 Per 31 Desember 2019 (Rp)
1.	Tanah	5.368.469.568.154,30	0,00	5.368.469.568.154,30
2.	Peralatan dan Mesin	789.344.768.239,20	41.987.328.484,19	831.332.096.723,39
3.	Gedung dan Bangunan	3.840.424.211.475,19	(8.996.561.919,00)	3.831.427.649.556,19
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.943.816.960.746,55	(32.639.267.565,19)	2.911.177.693.181,36
5.	Aset Tetap Lainnya	63.098.951.185,24	(351.499.000,00)	62.747.452.185,24
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	166.700.636.271,94	0,00	166.700.636.271,94
Jumlah		13.171.855.096.072,40	0,00	13.171.855.096.072,40

Grafik 35
Komposisi Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 dan 2018



Nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2019 setelah di kurangi dengan nilai penyusutan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 83 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	5.368.469.568.154,30	0,00	5.368.469.568.154,30
2.	Peralatan dan Mesin	831.332.096.723,39	(634.764.734.249,01)	196.567.362.474,38
3.	Gedung dan Bangunan	3.831.427.649.556,19	(585.015.520.336,34)	3.246.412.129.219,85
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.906.177.693.181,36	(1.654.502.044.418,88)	1.256.675.648.762,48
5.	Aset Tetap Lainnya	62.747.452.185,24	(626.271.401,00)	62.121.180.784,24
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	166.700.636.271,94	0,00	166.700.636.271,94
Jumlah		13.171.855.096.072,40	(2.874.908.570.405,23)	10.296.946.525.667,20

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp10.296.946.525.667,20 merupakan nilai buku Aset Tetap Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84 Rincian Mutasi/Koreksi Aset Tetap per 31 Desember 2019

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
Saldo Aset Tetap TA 2018 (Audited)		12.269.992.078.780,20
Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		1.048.436.116.565,91
a. Realisasi Belanja Modal TA 2019	686.676.226.247,11	
b. Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	11.865.592.682,43	
c. Terima Hibah	3.534.867.056,00	
d. Terima Mutasi dari SKPD lain	18.581.044.879,90	
e. Ditemukan/Hasil Inventarisasi	157.987.085.450,00	
f. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	33.122.461.430,40	
g. Reklasifikasi antar jenis aset tetap	101.046.039.821,07	
i. Penilaian/Utang	35.622.798.999,00	
Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		146.573.099.273,67
a. Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	2.773.153.958,22	
b. Penghapusan Aset Tetap	1.942.129.522,60	
c. Mutasi ke SKPD lain	18.581.044.879,90	
d. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	8.208.852.025,10	
e. Reklasifikasi antar jenis aset tetap	101.046.039.821,07	
f. Reklasifikasi ke Persediaan (biaya)	225.113.674,00	
g. Koreksi	374.438.363,06	
h. Barang di bawah kapitalisasi	13.422.327.029,72	
Jumlah Saldo per 31 Desember 2019		13.171.855.096.072,40
Akumulasi Penyusutan		(2.874.908.570.405,23)
Nilai Buku per 31 Desember 2019		10.296.946.525.667,20

- a. Saldo Aset Tetap TA 2018 (*Audited*) sebesar Rp12.269.992.078.780,20.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap TA 2019 sebesar Rp1.048.436.116.565,91 dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp686.676.226.247,11 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp13.023.016.543,24 (1,90%), Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.286.750.125,68 (13,44%), Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp136.068.318.925,48 (19,82%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp415.921.306.815,97 (60,57%) dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp29.376.833.836,74 (4,28%). Rincian Realisasi Belanja Modal 2019 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp11.865.592.682,43. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih. Rincian Belanja Belanja Jasa/Pemeliharaan yang menambah AT (kapitalisasi) per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.
- 3) Terima Hibah sebesar Rp3.534.867.056,00 yang terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp663.000.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp13.536.000,00, Rumah Sakit Umum daerah sebesar Rp141.400.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.593.705.964,00, Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp53.520.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp24.194.000,00, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp84.881.500,00, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp202.729.592,00 dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp757.900.000,00. Rincian Terima Hibah per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 85 Rincian Penerimaan Hibah Aset Per 31 Desember 2019

No	Nama OPD	Peralatan dan Mesin (Rp)
1	Dinas Perhubungan	663.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	13.536.000,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.593.705.964,00
4	Dinas Ketenagakerjaan	53.520.000,00
5	Dinas Sosial	24.194.000,00
6	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	84.881.500,00
7	Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah	202.729.592,00
8	Disporapar	757.900.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan	141.400.000,00
Jumlah		3.534.867.056,00

- 4) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp18.581.044.879,90. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.
- 5) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp157.987.085.450,00 merupakan aset tetap dengan kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok perangkat daerah namun belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Setelah dilakukan proses inventarisasi, aset tersebut dicatat pada daftar inventaris barang milik daerah menyesuaikan dengan klasifikasi aset tetapnya berdasarkan Berita Acara Barang Milik Ditemukan Yang Belum Tercatat Kartu Inventaris Barang (KIB) yang di tandatangani oleh Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengelola Barang yang terdiri dari Sekretariat DPRD sebesar Rp527.500.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp157.800.000,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp42.543.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp206.300.000,00, RSUD sebesar Rp1.213.600.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp548.025.000,00, DP3AKB sebesar Rp791.600.000,00, Dinas Penanaman

Modal Perizinan Terpadu sebesar Rp8.733.000,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp3.549.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp154.475.924.450,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.421.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.090.000,00. Rincian aset yang ditemukan/hasil inventarisasi per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 86 Rincian Aset yang Ditemukan per 31 Desember 2019

No	Nama OPD	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Setwan	527.500.000,00	0,00	0,00	527.500.000,00
2	Setdakot	0,00	157.800.000,00	0,00	157.800.000,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	42.543.000,00	0,00	0,00	42.543.000,00
4	Dinas Kesehatan	206.300.000,00	0,00	0,00	206.300.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.213.600.000,00	0,00	0,00	1.213.600.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	548.025.000,00	0,00	0,00	548.025.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	504.900.000,00	0,00	286.700.000,00	791.600.000,00
8	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	8.733.000,00	0,00	0,00	8.733.000,00
9	Dinas Perdagangan	3.549.000,00	0,00	0,00	3.549.000,00
10	Badan Pengelola Keuangan Daerah	154.475.924.450,00	0,00	0,00	154.475.924.450,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.421.000,00	0,00	0,00	8.421.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
Jumlah		157.542.585.450,00	157.800.000,00	286.700.000,00	157.987.085.450,00

- 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp33.122.461.430,40 merupakan koreksi atas pencatatan aset *Detailed Engineering Design* (DED) yang sebelumnya dicatat pada Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) yang terdiri dari DED yang aset induknya belum ada namun fisik pekerjaannya akan di lanjutkan beserta DED yang aset induknya sudah ada namun masih dalam penelusuran kode barang aset tetapnya untuk dikapitalisasi ke aset induknya. Rincian Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap per OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 87 Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Nama OPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	24.248.891.430,80
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.680.000,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	549.483.000,00
4	Dinas Perhubungan	645.382.654,00
5	Dinas Kesehatan	565.070.000,00
6	Dinas Pangan Pertanian Perikanan	52.976.902,00

No	Nama OPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
7	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	248.795.000,00
8	Dinas Perdagangan	39.558.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6.330.387.236,60
10	Dinas Lingkungan Hidup	50.545.000,00
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	197.692.207,00
Jumlah		33.122.461.430,40

- 7) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp101.046.039.821,07.
 - 8) Penilaian/Utang sebesar Rp35.622.798.999,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan hasil penilaian atas aset tetap berupa tanah dan bangunan yang sebelumnya tercatat dengan nilai perolehan Rp0,00 dan telah dilakukan penilaian aset untuk mendapatkan nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Wahyu Purnama, Yasir dan Rekan atas aset tanah sebesar Rp35.401.398.999,00 dan aset gedung dan bangunan sebesar Rp221.400.000,00.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap TA 2019 sebesar Rp146.573.099.273,67 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap sebesar Rp2.773.153.960,24.
 - 2) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.942.129.522,60 yang terdiri dari Tanah sebesar Rp226.521,27 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan penghapusan aset tanah yang telah dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama Balikpapan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-356 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dari Daftar Barang Milik Daerah. Sedangkan penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.941.903.001,33 pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan proses penghapusan atas barang kondisi rusak berat dari daftar inventaris barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-261 Tahun 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bappeda Litbang Kota Balikpapan Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
 - 3) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp18.581.044.879,90. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.
 - 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp8.208.852.025,10 yang terdiri dari Tanah sebesar Rp20.141.902,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.704.809.407,25, Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.371.000,00, Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp25.190.000,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.406.339.715,85. Rincian Reklasifikasi dari AT ke AL per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.
 - 5) Reklasifikasi antar jenis aset tetap sebesar Rp101.046.039.821,07.
 - 6) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp225.113.674,00 pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sebesar Rp121.337.550,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp100.697.024,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.079.100,00.

- 7) Koreksi sebesar Rp38.400.000,00 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang merupakan pembayaran honorarium Personil Tim Teknis Badan Pertanahan Balikpapan atas pengadaan tanah Institut Teknologi Kalimantan yang tidak dapat diatribusikan dikarenakan tidak ada pengadaan aset tetapnya sampai dengan 31 Desember 2019.
- 8) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp13.422.327.029,72 yang terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.777.492.269,40, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.629.649.108,71, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp741.003.297,61 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp235.929.854,00 dan Kontruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp38.252.500,00. Rincian Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap yang dibawah nilai minimum kapitalisasi per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.
- d. Penjelasan selisih tambah kurang antara realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dapat dijelaskan bahwa nilai aset tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing sebesar Rp13.171.855.096.072,40 dan Rp12.269.992.078.780,20. Secara umum aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp901.863.017.292,20 sementara realisasi belanja modal sebesar Rp686.676.226.247,11. Terdapat selisih kurang sebesar Rp214.092.335.945,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Rincian Selisih Antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Aset Tetap

Uraian	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
a. Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap(kapitalisasi)	11.865.592.682,43	(2.773.153.958,22)
b. Terima Hibah	3.534.867.056,00	0,00
c. Terima Mutasi dari SKPD lain	18.581.044.879,90	0,00
d. Ditemukan/Hasil Inventarisasi	157.987.085.450,00	0,00
e. Diserahkan/Dihibahkan	0,00	0,00
f. Penghapusan Aset Tetap	0,00	(1.942.129.522,60)
g. Mutasi ke SKPD lain	0,00	(18.581.044.879,90)
h. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00	(8.208.852.025,10)
i. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	33.122.461.430,40	0,00
j. Reklasifikasi antar jenis aset tetap	101.046.039.821,07	(101.046.039.821,07)
k. Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya	0,00	(225.113.674,00)
l. Koreksi	0,00	(374.438.363,06)
m. Barang Rusak Berat	0,00	0,00
n. Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	0,00	0,00
o. Barang di bawah kapitalisasi	0,00	(13.422.327.029,72)
p. Barang diserahkan ke masyarakat belum ada BA	0,00	0,00
q. Penilaian/Utang (Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	35.622.798.999,00	0,00
Jumlah	361.759.890.318,80	(146.573.099.273,67)
Selisih Tambah / (Kurang)		215.186.791.045,13
Belanja Modal Aset Lainnya		(1.094.455.100,00)
Total Selisih Tambah Kurang		214.092.335.945,13

5.5.3.1 Tanah**Per 31 Desember 2019**
Rp5.368.469.568.154,30**Per 31 Desember 2018**
Rp5.163.128.337.258,57

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.368.469.568.154,30 dan Rp5.163.128.337.258,57 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Tanah pada TA 2019 sebesar Rp205.341.230.895,73 atau sebesar 3,98%. Nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan dan Aset Tetap Tanah tidak disusutkan. Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2019 sebesar Rp5.368.469.568.154,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tanah TA 2018 (<i>Audited</i>)		5.163.128.337.258,57
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		
a.	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019	13.023.016.543,24	
b.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	3.944.000.000,00	
c.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	157.542.585.450,00	
d.	Penilaian/Utang	35.401.398.999,00	
			209.911.000.992,24
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		
a.	Penghapusan Aset Tetap	226.521,27	
b.	Mutasi dari SKPD Lain	3.944.000.000,00	
c.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	20.141.902,00	
d.	Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap	445.664.123,24	
e.	Reklasifikasi ke Persediaan/Biaya	121.337.550,00	
f.	Koreksi	38.400.000,00	
			4.569.770.096,51
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2019		5.368.469.568.154,30

a. Saldo Aset Tetap Tanah TA 2018 (*Audited*) sebesar Rp5.163.128.337.258,57
b. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah TA 2019 sebesar Rp209.911.000.992,24 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp13.023.016.543,24 yang terdiri dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sebesar Rp10.433.496.968,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp2.002.376.000,00 dan Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp587.143.575,24.
- 2) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp3.944.000.000,00.
- 3) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp157.542.585.450,00 yang terdiri dari Sekretariat DPRD sebesar Rp527.500.000,00, Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp42.543.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp206.300.000,00, RSUD sebesar Rp1.213.600.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp548.025.000,00, DP3AKB sebesar Rp504.900.000,00, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu sebesar Rp8.733.000,00, Dinas Perdagangan sebesar Rp3.549.000,00, Badan Pengelola Keuangan Daerah

- sebesar Rp154.475.924.450,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp8.421.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.090.000,00.
- 4) Penilaian/Utang sebesar Rp35.401.398.999,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan hasil penilaian atas aset yang masih bernilai Rp0,00 pada aset tanah yang terdiri dari aset tanah penjualan tanaman hias sebesar Rp31.651.399.000,00 dan aset tanah Kantor Lurah Sepinggian Raya sebesar Rp3.749.999.999,00.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah TA 2019 sebesar Rp4.569.770.096,51 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp226.521,27 yang merupakan penghapusan aset tanah telah dihibahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan peruntukan Pengadilan Agama.
 - 2) Mutasi ke OPD Lain sebesar Rp3.944.000.000,00.
 - 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp20.141.902,00 pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.
 - 4) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp445.664.123,24.
 - 5) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp121.337.550,00 pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan merupakan belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dikarenakan merupakan belanja penyediaan calon induk unggulan beserta pakan ikan, pemeliharaan larva, pemijahan buatan beserta penetasan.
 - 6) Koreksi sebesar Rp38.400.000,00 pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang merupakan pembayaran honorarium Personil Tim Teknis Badan Pertanahan Balikpapan atas pengadaan tanah Institut Teknologi Kalimantan yang tidak dapat diatribusikan dikarenakan tidak ada pengadaan aset tetapnya sampai dengan 31 Desember 2019.

Kondisi lain tentang Aset Tetap Tanah Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset Tetap Tanah belum memiliki sertifikat.
Terdapat Aset Tetap Tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 555 bidang tanah di sajikan pada **Lampiran 19.1**
2. Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk pinjam pakai, sewa, dan BOT:
 - a. Pinjam pakai tanah dilakukan sesama instansi pemerintah sebanyak 14 (empat belas) bidang tanah yang disajikan pada **Lampiran 19.2**
 - b. Sewa tanah oleh pihak lain sebanyak 90 (sembilan puluh) bidang tanah yang disajikan pada **Lampiran 19.3**
 - c. Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk *Build Of Transfer* (BOT) sebanyak 4 (empat) bidang tanah disajikan pada **Lampiran 19.4**

5.5.3.2	Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
		Rp831.332.096.723,39	Rp695.493.307.846,49

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp789.344.768.239,20 dan Rp695.493.307.846,49 yang merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada TA 2019 sebesar Rp135.838.788.876,90 atau sebesar 19,53%. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah Rp831.332.096.723,39 atau mengalami kenaikan sebesar Rp41.987.328.484,19 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 90 Kenaikan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Setda (Bagian Umum & Perlengkapan)	6.848.073.456,00	Dari KIB D
2	Kecamatan Balikpapan Utara	4.499.000,00	Dari KIB E
3	Dinas Pekerjaan Umum	23.780.404.883,19	Dari KIB D
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.348.385.000,00	Dari KIB C dan KIB D
5	Dinas Perhubungan	9.090.353.145,00	Dari KIB C dan KIB D
6	Dinas Pertanian	156.721.000,00	Dari KB D
7	Dinas Lingkungan Hidup	185.402.500,00	Dari KIB C dan KIB D
8	Disporadpar	226.489.500,00	Dari KIB C dan KIB D
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	347.000.000,00	Dari KIB E
Jumlah		41.987.328.484,19	

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2019 sebesar Rp831.332.096.723,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 91 Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Peralatan Mesin TA 2018 (Audited)		695.493.307.846,49
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2019	92.286.750.125,68	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	260.705.132,00	
c.	Terima Hibah	3.534.867.056,00	
d.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	3.474.086.598,00	
e.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	157.800.000,00	
f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	54.635.181.801,20	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		154.349.390.712,88
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	1.600.000,00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	1.941.903.001,33	
c.	Mutasi Ke SKPD lain	3.474.086.598,00	
d.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.704.809.407,25	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	510.013.536,00	
f.	Reklasifikasi ke Persediaan (biaya)	100.697.024,00	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	10.777.492.269,40	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		18.510.601.835,98
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2019		831.332.096.723,39
V.	Akumulasi Penyusutan		(634.764.734.249,01)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2019		196.567.362.474,38

- a. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2018 (*Audited*) sebesar Rp695.493.307.846,49.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp154.349.390.712,88 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp92.286.750.125,68 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 92 Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2019

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.271.417.500,00
2	Sekretariat Daerah	5.599.045.196,00
3	Kecamatan Balikpapan Timur	226.246.900,00
4	Kecamatan Balikpapan Selatan	158.701.000,00
5	Kecamatan Balikpapan Barat	288.053.600,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	329.296.875,00
7	Kecamatan Balikpapan Tengah	231.035.000,00
8	Kecamatan Balikpapan Kota	62.274.500,00
9	Dinas Pekerjaan Umum	15.333.500.800,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.126.586.750,00
11	Dinas Perumahan dan Pemukiman	2.969.534.115,00
12	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	783.600.077,50
13	Dinas Perhubungan	4.307.232.639,00
14	Dinas Kesehatan Kota	10.926.510.089,53
15	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	184.470.947,65
16	Rumah Sakit Umum Daerah	1.664.830.555,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.423.860.190,00
18	Dinas Ketenagakerjaan	502.760.900,00
19	Dinas Sosial	437.970.000,00
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	226.886.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.126.023.750,00
22	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	534.247.300,00
23	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	1.427.937.380,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	270.380.000,00
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	214.230.500,00
26	Dinas Perdagangan	377.081.605,00
27	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.331.820.239,00
28	Inspektorat	1.263.697.250,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Daerah	217.417.750,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	6.674.120.669,00
31	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	881.299.100,00
32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	113.850.000,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	1.174.964.950,00
34	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	402.465.640,00
35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.066.237.848,00
36	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.157.162.510,00
Jumlah		92.286.750.125,68

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap berupa kapitalisasi sebesar Rp260.705.132,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
 - 3) Terima Hibah sebesar Rp3.534.867.056,00 dengan rincian Dinas Perhubungan sebesar Rp663.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp13.536.000,00, Rumah Sakit Umum daerah sebesar Rp141.400.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.593.705.964,00, Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp53.520.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp24.194.000,00, Disdukcapil sebesar Rp84.881.500,00, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp202.729.592,00 dan Disporapar sebesar Rp757.900.000,00.
 - 4) Terima Mutasi dari OPD Lain sebesar Rp3.474.086.598,00. Transaksi ini sifatnya tidak mempengaruhi neraca aset tetap secara keseluruhan karena berupa mutasi antar OPD.
 - 5) Ditemukan/Hasil Inventarisasi sebesar Rp157.800.000,00 yang terdiri dari Sekretariat Daerah sebesar Rp157.800.000,00.
 - 6) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.635.181.801,20.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp18.510.601.835,98 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan sebesar Rp1.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.600.000,00.
 - 2) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.941.903.001,33 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.941.903.001,33 yang merupakan proses penghapusan atas barang kondisi rusak berat dari daftar inventaris barang milik daerah.
 - 3) Mutasi Ke SKPD lain sebesar Rp3.474.086.598,00.
 - 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp1.704.809.407,25 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 93 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya TA 2019

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Rp)
1	Kecamatan Balikpapan Timur	146.159.500,00
2	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	6.143.200,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	213.662.500,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	513.966.890,00
5	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	71.929.000,00
6	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.000.000,00,
7	Inspektorat	179.625.060,00,
8	Satuan Polisi Pamong Praja	155.026.158,00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	408.297.099,25
Jumlah		1.704.809.407,25

- 5) Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp510.013.536,00.
- 6) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp100.697.024,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dikarenakan merupakan belanja stiker kaca, stiker pintu, stiker master poin, stiker *emergency exit* dan *stiker mapping* evaluasi lantai 1 pada Stadion Batakan.
- 7) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp10.777.492.269,40 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 94 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp)
1	Sekretariat DPRD	16.005.000,00
2	Sekretariat Daerah Kota	152.460.000,00
3	Kecamatan Balikpapan Timur	28.047.800,00
4	Kecamatan Balikpapan selatan	64.700.000,00
5	Kecamatan Balikpapan Barat	71.610.000,00
6	Kecamatan Balikpapan Utara	47.774.430,00
7	Kecamatan Balikpapan Tengah	36.652.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	9.724.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	134.365.000,00
10	Dinas Pertanahan Penataan Ruang	9.600.000,00
11	Dinas Perhubungan	244.870.906,00
12	Dinas Kesehatan	215.441.854,40
13	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	990.000,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	76.549.696,00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.250.138.984,00
16	Dinas Ketenagakerjaan	10.505.000,00
17	Dinas Sosial	11.125.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6.573.600,00
19	Dinas Pangan Pertanian Perikanan	47.499.100,00
20	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	8.005.000,00
21	Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah	1.820.500,00
22	Badan Pengelola Keuangan Daerah	147.058.899,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	20.833.500,00
24	Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata	91.237.000,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	18.400.000,00
26	Satpol PP	20.130.000,00
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.095.000,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.155.000,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.125.000,00
Jumlah		10.777.492.269,40

8) Kondisi lain tentang Aset Peralatan dan Mesin Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat aset berupa bantuan peralatan Teknik Informasi dan Komunikasi (TIK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Sekolah Dasar di wilayah Kota Balikpapan sebesar Rp307.083.000,00 yang sudah digunakan tetapi belum dapat dicatat sebagai Aset Peralatan dan Mesin karena belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima dari Kemendikbud kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 95 Aset Berupa Bantuan Peralatan TIK dari Kemendikbud

No	Nama Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Nilai Bantuan Digunakan (Rp)
1	SD Negeri 024 Balikpapan Tengah	Peralatan TIK	43.869.000,00
2	SD Negeri 029 Balikpapan Tengah	Peralatan TIK	43.869.000,00
3	SD Negeri 013 Balikpapan Barat	Peralatan TIK	43.869.000,00
4	SD Negeri 015 Balikpapan Barat	Peralatan TIK	43.869.000,00
5	SD Negeri 010 Balikpapan Barat	Peralatan TIK	43.869.000,00
6	SD Negeri 003 Balikpapan Barat	Peralatan TIK	43.869.000,00
7	SD Negeri 014 Balikpapan Barat	Peralatan TIK	43.869.000,00
Jumlah			307.083.000,00

- b) Terdapat aset kendaraan dinas yang belum memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 100 unit berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 44 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 56 unit di sajikan pada **Lampiran 19.5**

- c) Terdapat aset peralatan dan mesin yang masih bernilai Rp0,00 yang tercatat pada aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Aset Peralatan dan Mesin yang Bernilai Rp0,00

No	Perangkat Daerah	Kode Barang	Register	Nama Barang	Tahun	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1	Bagian Umum dan Perlengkapan	1.3.2.02.001.003.002	7	Pick Up	2001	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
2	Dinas Pendidikan	1.3.2.02.001.004.001	117	Sepeda Motor	2006	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
3	Dinas Pendidikan (SDN 005 TIMUR)	1.3.2.07.002.005.025	000002 s/d 000003	Tangga Injak Berlaci	2017	0,00	Belum Dilakukan Penilaian
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.3.2.08.001.056.081	000001 s/d 000003	Meja Kerja	2004	0,00	Belum Dilakukan Penilaian

5.5.3.3	Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
		Rp3.831.427.649.556,19	Rp3.725.704.272.838,92

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp3.840.424.211.475,19 dan Rp3.725.704.272.838,92 merupakan aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas yang terdiri dari bangunan gedung.

Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2019 sebesar Rp105.723.376.717,27 atau sebesar 2,84%. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah Rp3.831.427.649.556,19 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.996.561.919,00.

Tabel 97 Rincian Penurunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	(1.265.709.000,00)	Pindah ke KIB B
2	Dinas Perhubungan	(7.612.736.419,00)	Pindah ke KIB B
3	Disporapar	(127.264.500,00)	Pindah Ke KIB B
4	Dinas Lingkungan Hidup	9.148.000,00	Dari KIB D
Jumlah		(8.996.561.919,00)	

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada pada Tahun 2019 sebesar Rp3.831.427.649.556,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98 Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Gedung dan Bangunan TA 2018 (Audited)		3.725.704.272.838,93
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2019	136.068.318.925,48	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	4.821.724.899,43	
c.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	10.780.092.181,90	
d.	Ditemukan/Hasil Inventarisasi	286.700.000,00	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	2.864.398.537,78	
f.	Penilaian/Utang	221.400.000,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		155.042.634.544,59
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	126.835.000,00	
b.	Mutasi Ke SKPD lain	10.780.092.181,90	
c.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	52.371.000,00	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	36.730.310.536,71	
e.	Barang di bawah kapitalisasi	1.629.649.108,71	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		49.319.257.827,32
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2019		3.831.427.649.556,20
V.	Akumulasi Penyusutan		(585.015.520.336,34)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2019		3.246.412.129.219,86
a.	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2018 (Audited) sebesar Rp3.725.704.272.838,93.		

b. Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp155.042.634.544,59 dijelaskan sebagai berikut :

1) Realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp136.068.318.925,48 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 99 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	14.905.000,00
2	Kecamatan Balikpapan Timur	350.566.000,00
3	Kecamatan Balikpapan Selatan	92.462.000,00
4	Kecamatan Balikpapan Utara	2.500.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	35.084.832.516,11
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.280.000,00
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	7.846.483.629,87
8	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	94.097.940,81
9	Dinas Perhubungan	760.398.006,98
10	Dinas Kesehatan Kota	17.579.630.125,85
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.100.923.792,86
12	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	15.697.000,00
13	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	8.013.353.687,51
14	Dinas Perdagangan	10.416.990.752,18
15	Badan Pengelola Keuangan Daerah	259.382.695,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.955.500.788,12
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.431.314.990,19
Jumlah		136.068.318.925,48

2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp4.821.724.899,43. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.

3) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp10.780.092.181,90.

4) Ditemukan/hasil inventarisasi sebesar Rp286.700.000,00 pada DP3AKB yang merupakan bangunan Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

5) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp2.864.398.537,78.

6) Penilaian/Utang sebesar Rp221.400.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan penilaian atas bangunan KUA Kecamatan Balikpapan Selatan.

c. Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2019 sebesar Rp49.319.257.827,32 dijelaskan sebagai berikut :

1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap sebesar Rp126.835.000,00.

2) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp10.780.092.181,90.

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp52.371.000,00 yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Permukiman senilai Rp44.726.000,00 dan Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp7.645.000,00.

4) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp36.730.310.536,71.

- 5) Koreksi kurang nilai Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar sebesar Rp1.629.649.108,71 merupakan realisasi belanja modal Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap yang terdiri dari Sekretariat DPRD sebesar Rp24.970.000,00, Kecamatan Balikpapan Timur sebesar Rp65.000.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp342.972.300,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp33.570.900,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp323.918.707,09, Dinas Perdagangan sebesar Rp25.690.739,80, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp793.946.461,82 dan Disporapar sebesar Rp19.580.000,00.

5.5.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp2.911.177.693.181,36 Rp2.525.044.403.333,93

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp2.943.816.960.746,55 dan Rp2.525.044.403.333,93 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2019 sebesar Rp386.133.289.847,43 atau sebesar 15,29%. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah Rp2.911.177.693.181,36 atau mengalami penurunan sebesar Rp32.639.267.565,19 dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Pindah Golongan TA 2019

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Setdakot (Bagian Umum & Perlengkapan)	(6.848.073.456,00)	Pindah ke KIB B
2	DPU	(23.780.404.883,19)	Pindah ke KIB B
3	Disperkim	(82.676.000,00)	Pindah ke KIB B
4	Dishub	(1.447.616.726,00)	Pindah ke KIB B
5	Dinas Pertanian	(156.721.000,00)	Pindah ke KIB B
6	DLH	(194.550.500,00)	Pindah ke KIB C
7	Disporapar	(99.225.000,00)	Pindah ke KIB B
Jumlah		(32.639.267.565,19)	

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 25.000.000,00 ke atas. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2019 sebesar Rp2.911.177.693.181,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101 Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Jalan Jaringan Dan Irigasi TA 2018 (Audited)		2.525.044.403.333,93
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2019	415.921.306.815,97	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	6.723.785.086,00	
c.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	382.866.100,00	
d.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	4.512.215.747,29	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		427.540.173.749,26
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		
a.	Mutasi ke SKPD Lain	382.866.100,00	
b.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	25.190.000,00	
c.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	40.254.745.404,22	
d.	Reklasifikasi ke Persediaan (Biaya)	3.079.100,00	
e.	Barang di bawah kapitalisasi	741.003.297,61	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		41.406.883.901,83
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2019		2.911.177.693.181,36
V.	Akumulasi Penyusutan		(1.654.502.044.418,88)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2019		1.256.675.648.762,48

- a. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 (Audited) sebesar Rp2.525.044.403.333,93.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp427.540.173.749,26 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp415.921.306.815,97 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Rp)
1	Sekretariat DPRD	49.430.150,00
2	Setdakot	227.195.600,00
3	Kecamatan Balikpapan Utara	10.805.900,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	403.302.153.175,03
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	658.161.260,71
6	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.795.030.713,97
7	Dinas Perhubungan	2.494.474.859,03
8	Dinas Kesehatan Kota	716.339.100,00
9	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan	264.267.018,00
10	Dinas Sosial	80.500.000,00
11	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	106.034.176,56
12	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	5.132.365.871,87
13	Dinas Perdagangan	551.067.690,80
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah	97.859.500,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	239.555.000,00
16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	18.000.000,00
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.253.700,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.813.100,00
	Jumlah	415.921.306.815,97

- 2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp6.723.785.086,00. Biaya kapitalisasi ini merupakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih.
 - 3) Terima mutasi dari OPD lain sebesar Rp382.866.100,00.
 - 4) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp4.512.215.747,29.
- c. Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2019 sebesar Rp41.406.833.901,83 dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Mutasi ke OPD lain sebesar Rp382.866.100,00.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp25.190.000,00 pada Dinas Pangan Pertanian Perikanan sebesar Rp25.190.000,00.
 - 3) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp40.254.745.404,22.
 - 4) Reklasifikasi ke Persediaan (biaya) sebesar Rp3.079.100,00.
 - 5) Koreksi kurang nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar sebesar Rp741.003.297,61 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 103 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Jalan Jaringan Irigasi (Rp)
1	Sekretariat Daerah Kota	2.476.600,00
2	Kecamatan Balikpapan Utara	10.805.900,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.200.000,00
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	24.581.637,10
5	Dinas Kesehatan	107.815.911,84
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	528.418.558,67
7	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	28.164.990,00
8	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	11.286.000,00
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.253.700,00
Jumlah		741.003.297,61

5.5.3.5	Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
		Rp62.747.452.185,24	Rp63.058.816.574,24

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 masing-masing sebesar Rp63.098.951.185,24 dan Rp63.058.816.574,24 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat penurunan nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2019 sebesar (Rp311.364.389,00) atau sebesar (0,49%). Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 nilai Aset Tetap Lainnya adalah Rp62.747.452.185,24 atau mengalami penurunan sebesar (Rp351.499.000,00) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Penurunan Nilai Aset Tetap Lainnya

No.	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kecamatan Balikpapan Utara	(4.499.000,00)	Pindah ke KIB B
2	Dinas Pendidikan	(347.000.000,00)	Pindah ke KIB B
Jumlah		(351.499.000,00)	

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2019 sebesar Rp62.747.452.185,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 105 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2018 (Audited)		63.058.816.574,24
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		
a.	Realisasi Belanja Modal TA 2019	29.376.833.836,74	
b.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	59.377.565,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		29.436.211.401,74
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		
a.	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.406.339.715,85	
b.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	23.105.306.220,89	
c.	Barang di bawah kapitalisasi	235.929.854,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		29.747.575.790,74
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2019		62.747.452.185,24
V.	Akumulasi Penyusutan		(626.271.401,00)
VI.	Nilai Buku per 31 Desember 2019		62.121.180.784,24

- a. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2018 (*Audited*) sebesar Rp63.058.816.574,24.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp29.436.211.401,74 dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp29.376.833.836,74 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 106 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Rp)
1	Sekretariat Daerah Kota	18.205.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	14.359.915.588,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66.000.000,00
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	452.976.300,00
5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	864.682.500,00
6	Dinas Perhubungan	492.891.454,00
7	Dinas Kesehatan Kota	3.038.489.640,50
8	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	1.159.577.487,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah	2.195.783.240,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.230.203.839,74
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.693.750,00

No	Nama OPD	Realisasi Belanja Modal TA 2019 (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	19.679.000,00
13	Dinas Perdagangan	70.603.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah	18.200.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Daerah	1.022.499.637,50
16	Dinas Lingkungan Hidup	726.440.000,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	174.500.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	24.475.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	85.886.900,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	346.131.500,00
Jumlah		29.376.833.836,74

2) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang menambah Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp59.377.565,00.

c. Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya TA 2019 sebesar Rp29.747.575.790,74 dijelaskan sebagai berikut:

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp6.406.339.715,85 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 107 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	2.334.704.124,35
2	Dinas Perumahan dan Pemukiman	236.135.500,00
3	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	864.682.500,00
4	Dinas Perhubungan	492.891.454,00
5	Dinas Kesehatan Kota	308.385.000,00
6	Rumah Sakit Klinik Bersalin Sayang Ibu	74.470.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Daerah	1.022.499.637,50
8	Dinas Lingkungan Hidup	726.440.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	346.131.500,00
Jumlah		6.406.339.715,85

2) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp23.105.306.220,89.

3) Koreksi kurang nilai Aset Tetap di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca aset tetap sebesar Rp235.929.854,00 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 108 Aset Tetap Dibawah Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

No	Nama OPD	Aset Tetap dibawah nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya (Rp)
1	Kecamatan Balikpapan Kota	1.547.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	6.000.000,00
3	Dinas Perumahan dan Pemukiman	32.340.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.960.114,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip	40.082.240,00
Jumlah		235.929.854,00

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi mulai Tahun 2020, penyusutan Aset Tetap Lainnya hanya diberlakukan pada Alat Musik Modern dan Aset Tetap Renovasi saja, Selain kedua jenis aset tersebut, tidak dilakukan penyusutan.

5.5.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2019 Rp166.700.636.271,94 Per 31 Desember 2018 Rp97.562.940.928,03

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp166.700.636.271,94 dan Rp97.562.940.928,03 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2019 sebesar Rp69.137.695.343,91 atau sebesar 70,86%.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2019 sebesar Rp166.700.636.271,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109 Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2018 (Audited)		97.562.940.928,03
II.	Mutasi Tambah dan Koreksi TA 2019		
a.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	39.034.243.734,79	
b.	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	33.122.461.430,40	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		
III.	Mutasi Kurang dan Koreksi TA 2019		72.156.705.165,19
a.	Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yg menambah Aset Tetap (kapitalisasi)	2.644.718.958,22	
b.	Barang di bawah kapitalisasi	38.252.500,00	
c.	Koreksi	336.038.363,06	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		(3.019.009.821,28)
IV.	Jumlah Saldo per 31 Desember 2019 (I+II-III)		166.700.636.271,94

- a. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2018 (Audited) sebesar Rp97.562.940.928,03.
- b. Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2019 sebesar Rp72.156.705.165,19 dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Reklasifikasi antar jenis Aset Tetap sebesar Rp39.034.243.734,79.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp33.122.461.430,40 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 110 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	24.248.891.430,80
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.680.000,00
3	Dinas Perumahan dan Pemukiman	549.483.000,00

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya (Rp)
4	Dinas Perhubungan	645.382.654,00
5	Dinas Kesehatan Kota	565.070.000,00
6	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	52.976.902,00
7	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian	248.795.000,00
8	Dinas Perdagangan	39.558.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6.330.387.236,60
10	Dinas Lingkungan Hidup	50.545.000,00
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	197.692.207,00
Jumlah		33.122.461.430,40

c. Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2019 sebesar Rp3.019.009.821,28 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan yang mengurangi Aset Tetap (kapitalisasi) sebesar Rp2.644.718.958,22.
- 2) Koreksi kurang atas nilai Aset Tetap di bawah nilai minimum kapitalisasi yang tidak memenuhi syarat nilai satuan minimum kapitalisasi yang ditetapkan sesuai dengan Kebijakan Akutansi, namun tetap tercatat pada KIB sebagai aset ekstrakomptabel dan tidak disajikan ke dalam neraca Aset Tetap sebesar Rp38.252.500,00 yang terdiri dari:
 - a) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp19.789.000,00.
 - b) Dinas Perdagangan sebesar Rp18.463.500,00.
- 3) Koreksi lebih catat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp336.038.363,06 pada Dinas Pekerjaan Umum merupakan koreksi atas pencatatan nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan yang pembayarannya melebihi prestasi fisik pekerjaan yang terdiri dari:
 - a) Pekerjaan Jalan Menuju Kampus ITK sebesar Rp70.537.671,82.
 - b) Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu II sebesar Rp72.366.507,36.
 - c) Pekerjaan Jalan Ruhui Rahayu sebesar Rp193.134.183,88.

5.5.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Rp2.874.908.570.405,23	Rp2.524.993.839.230,33

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah kumpulan dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Balikpapan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal pelaporan. Nilai Akumulasi Penyusutan TA 2019 dan TA 2018 sebesar Rp2.874.908.570.405,23 dan Rp2.524.993.839.230,33 atau mengalami kenaikan sebesar Rp349.914.731.174,90 atau sebesar 13,86%. Pemerintah Kota Balikpapan menghitung Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan sistem perhitungan penyusutan dari aplikasi SIMDA BMD menggunakan tanggal perolehan sebagai dasar penentuan masa manfaat dan penyusutan dihitung secara tahunan yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 111 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2018
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	634.764.734.249,01	524.499.637.556,82
3	Gedung dan Bangunan	585.015.520.336,34	506.875.062.578,00
4	Jalan Jaringan Irigasi	1.654.502.044.418,88	1.493.619.139.095,51
5	Aset Tetap Lainnya	626.271.401,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
TOTAL		2.874.908.570.405,23	2.524.993.839.230,33

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD TA 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 19.6**

5.5.4 ASET LAINNYA Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp274.043.492.174,79 Rp307.377.481.110,89

Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019. Aset Lainnya Pemerintah Kota Balikpapan TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp 11.719.736.062,50 Rp5.311.893.704,00

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.719.736.062,50 merupakan piutang angsuran yang belum dibayar/jatuh tempo yang timbul dari penjualan cicilan/angsuran aset milik Pemerintah Kota Balikpapan berupa rumah dinas berdasarkan SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-52 Tahun 2004 tentang Penghapusan atas Penjualan Rumah Dinas Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kota Balikpapan dan SK Wali Kota Balikpapan tentang Penjualan Rumah Daerah Gol III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 188.45-07/2010 tanggal 8 Januari 2010.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran TA 2019 yang meningkat cukup signifikan dari TA 2018 disebabkan karena Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penjualan rumah dinas di Komplek Praja Bakti Kelurahan Gunung Samarinda Baru berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 188.45-397 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Rumah Negara Golongan III Beserta Tanahnya yang akan Dipindahtanggankan dalam Bentuk Penjualan Kepada Penghuni yang Sah.

Nilai tagihan penjualan angsuran TA 2019, jika dibandingkan dengan nilai TA 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian Perbandingan Nilai Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi(-) (Rp)	TA 2019 (Rp)
1.	Tagihan penjualan angsuran	5.311.893.704,00	7.019.770.122,50	(611.927.764,00)	11.719.736.062,50
2.	Penyisihan	(2.258.399.894,88)	(284.144.664,30)	0,00	(2.542.544.559,18)
	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	3.053.493.809,12	6.735.625.458,20	(611.927.764,00)	9.177.191.503,32

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 20, 21, dan 22**

5.5.4.2 Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp571.998.917,33 Rp666.656.933,32

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp571.998.917,33 adalah Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang merupakan tagihan atas kerugian Pemerintah Kota Balikpapan yang belum dilunasi seluruhnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik dengan SK pembebanan, SKTJM dan putusan pengadilan. Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2019, jika dibandingkan dengan nilai TA 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 113 Perbandingan Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2019 dan TA 2018

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	(+) (Rp)	(-) (Rp)	TA 2019 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	666.656.933,32	724.125.141,56	(818.783.157,55)	571.998.917,33
2	Penyisihan	(199.600.293,07)	87.264.862,54	(273.454.657,64)	(385.790.088,17)
	Nilai Bersih	467.056.640,25	811.390.004,10	(1.092.237.815,19)	186.208.829,16

Untuk klasifikasi nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2019 sesuai umur dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 114 Daftar Umur Nilai Tuntutan Ganti Rugi TA 2019

No.	Uraian	Kategori				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
I	Penetapan	0,00	0,00	0,00	124.172.000,00	124.172.000,00
II	Proses Penetapan	0,00	0,00	0,00	31.872.835,00	31.872.835,00
III	1. Informasi BPK	0,00	0,00	359.221.408,33	14.713.247,00	373.934.655,33
	2. Informasi APIP	14.662.500,00	0,00	0,00	27.356.927,00	42.019.427,00
	Jumlah Bruto	14.662.500,00	0,00	359.221.408,33	198.115.009,00	571.998.917,33
	Penyisihan	8.064.375,00	0,00	179.610.704,17	198.115.009,00	385.790.088,17
	Jumlah Nilai Netto					186.208.829,17

5.5.4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp145.500.096.000,00 Rp145.500.096.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp145.500.096.000,00 merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan yang

diserahkan untuk dikelola kepada pihak ketiga (BOT). Adapun aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

Tabel 115 Rincian Aset yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	Tanah (Rp)	Bangunan (Rp)	Pengakuan BOT (Rp)	Keterangan
1.	PT Hasta Kreasi Mandiri <u>No. 180/1060/Huk/2001</u> No.014/LGL/SPK/ HKM/VII/01 23/07/2001 <u>No. 180/1060.A/Huk/2001</u> No.147/LGL/ADD- SPK/HKM/IX/0112-09-2001 Pembangunan dan Peremajaan Pasar Muara Rapak	40.429.200.000,00	74.925.450.000,00	40.429.200.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
2.	PT Bintang Hytien Jaya <u>No.180/16/Pemerintah Kota- Perj/III/2004</u> No. 078/BHJ-Perj III/2004 29/03/2004 Pembangunan dan Pengelolaan Balikpapan Plaza Hotel	12.680.000.000,00	120.000.000.000,00	12.680.000.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
3.	PT Hasta Kreasi Mandiri <u>No. 644.1/1087/PP/XII/2004</u> No.060/LGL/HKM- PKS/XII/200415-12-2004 <u>No. 644.1/1087.A/PP/2007</u> No.017/LGL/HKM- AD.I.PKS/XI/200707-11-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapa (Pasar Baru Square)	75.850.000.000,00	450.000.000.000,00	75.850.000.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
4.	PT Gusher Mitra Sejahtera <u>No. 030/59/PP-II/2007</u> No.001-PK/GNS- Pmd.Bpn/II/200702-02-2007 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur	16.540.896.000,00	104.517.000.000,00	16.540.896.000,00	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Selesai
Jumlah		145.500.096.000,00	749.442.450.000,00	145.500.096.000,00	

5.5.4.4 Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

Rp116.659.677.805,88

Rp143.145.044.132,36

Aset Tak Berwujud pada TA 2019 sebesar Rp116.659.677.805,88 yang terdiri dari kajian dan *software* merupakan nilai sebelum amortisasi sebesar (Rp71.429.121.497,85). Perhitungan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 116 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi (Rp)	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2019 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tak Berwujud	116.659.677.805,88	71.429.121.497,85	45.230.556.308,03
Jumlah	116.659.677.805,88	71.429.121.497,85	45.230.556.308,03

Nilai mutasi Aset Tak Berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 117 Mutasi Aset Tidak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2019

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah TA 2019	Mutasi Kurang TA 2019	Saldo Akhir per 31 Des 2019
Aset Tak Berwujud	143.145.044.132,36	7.598.497.647,92	34.083.863.974,40	116.659.677.805,88
Jumlah	143.145.044.132,36	7.598.497.647,92	34.083.863.974,40	116.659.677.805,88

Penjelasan tambahan mengenai mutasi Aset Tak Berwujud sebelum Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 116.659.677.805,88 adalah sebagai berikut:

- Saldo awal Aset Tak Berwujud TA 2018 (*Audited*) sebesar Rp 143.145.044.132,36.
- Mutasi tambah Aset Tak Berwujud TA 2019 sebesar Rp 7.598.497.647,92 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Realisasi belanja modal Aset Lainnya TA 2019 sebesar Rp 1.094.455.100,00
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp 6.504.042.547,92.
- Mutasi kurang Aset Tak Berwujud TA 2019 sebesar Rp 34.083.863.974,40 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Mutasi kurang akibat Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp 33.122.461.430,40 merupakan koreksi hasil pemeriksaan BPK RI atas pencatatan DED yang sebelumnya di catat pada Aset Tidak Berwujud (ATB), yang kemudian di koreksi untuk dicatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dikarenakan DED tersebut fisik pekerjaannya akan dilanjutkan menunggu ketersediaan anggaran dan DED yang akan dikapitalisasi ke aset induk.
 - Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp 961.402.544,00 merupakan koreksi hasil pemeriksaan BPK RI atas pencatatan DED yang sebelumnya di catat pada Aset Tidak Berwujud (ATB), yang kemudian di koreksi untuk di catat pada aset lain-lain (rusak berat) dikarenakan fisik pekerjaannya tidak akan dilanjutkan dan termasuk dalam rincian aset yang diusulkan untuk dihapuskan.

5.5.4.5 Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

Rp76.695.876.237,86

Rp78.633.289.756,09

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp76.695.876.237,86 adalah nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 118 Rincian Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	(+) (Rp)	(-) (Rp)	TA 2019 (Rp)	Keterangan
1.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	2.793.810.285,68	20.521.519,37	0,00	2.814.331.805,05	Semula dicatat dalam kelompok investasi non permanen-dana bergulir
2.	Persediaan Obat Kadaluwarsa	10.742.772,00	2.053.370,00	0,00	12.796.142,00	Persediaan Obat RSKB Sayang Ibu yang expired
3.	Saldo Aset Tetap yang menunggu penghapusan	63.953.810.439,76	0,00	(1.939.002.407,60)	62.014.808.032,16	Merupakan Aset yang diusulkan untuk dihapus

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	(+) (Rp)	(-) (Rp)	TA 2019 (Rp)	Keterangan
4.	Barang yang memerlukan penelusuran lebih lanjut	671.311.591,00	0,00	0,00	671.311.591,00	Aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut
6.	Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi	8.696.000.000,00	0,00	0,00	8.696.000.000,00	Reklasifikasi dari Investasi Permanen
7.	Uang Jaminan Reklame dan Uang Jaminan Sewa Rusunawa	2.507.614.667,65	0,00	(20.986.000,00)	2.486.628.667,65	1. Jaminan reklame yang bertujuan untuk jaminan pembongkaran konstruksi reklame pada OPD DPMP2T senilai Rp1.949.765.417,65 2. Jaminan sewa rusunawa apabila penyewa tidak membayar tagihan selama tiga bulan berturut-turut pada OPD Disperkim senilai Rp536.863.250,00
Jumlah		78.633.289.756,09	22.574.889,37	(1.959.988.407,60)	76.695.876.237,86	

Penjelasan Aset Lain-lain :

a. Kas yang Dibatasi Penggunaannya **Rp2.814.331.805,05**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.814.331.805,05 merupakan uang jaminan atas pinjaman para pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Kota Balikpapan sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bankaltimtara dan PT Asuransi Kredit Indonesia dengan nomor perjanjian di bawah ini:

Tabel 119 Rincian Perjanjian Kerjasama Pinjaman UMKMK

No	Pihak	Nomer Perjanjian	Tanggal
1	Pemerintah Kota Balikpapan	Nomor 180/HK/XI/2006	29 November 2006
2	Bank Kalimantan Timurtara	077/BPD-PST/PRJ/XI/2006	29 November 2006
3	PT. Asuransi Kredit Indonesia	PPK/PKS/28/XI/2006	29 November 2006

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa setiap pinjaman dari pengusaha mikro Kota Balikpapan yang mengalami macet, Pemerintah Kota Balikpapan akan menanggung sebesar 35% dari jumlah kredit yang macet. Sedangkan sisanya ditanggung oleh Bankaltimtara sebesar 30% dan PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar 35%. Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya disimpan dalam bentuk giro pada Bankaltimtara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 0031440777.

b. Saldo Aset Tetap yang Menunggu Penghapusan **Rp62.014.808.032,16**

Penjelasan tambahan mengenai Aset Lain-lain atas uraian saldo Aset Tetap yang menunggu proses penghapusan sebesar Rp62.014.808.032,16 adalah sebagai berikut:

- Aset kondisi rusak berat sebesar Rp61.053.405.488,16 tercatat pada rincian Aset Lain-lain di aplikasi SIMDA BMD per 31 Desember 2019;
- Sedangkan penambahan nilai aset kondisi rusak berat sebesar Rp961.402.544,00 merupakan koreksi pencatatan aset atas DED yang sebelumnya tercatat pada Aset Tidak Berwujud (ATB) namun fisik pekerjaannya tidak akan dilanjutkan dan tidak termasuk pada rincian Aset Lain-lain di aplikasi SIMDA BMD disajikan pada **Lampiran 23**.

c. Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat yang akan dilikuidasi Rp8.696.000.000,00

Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat sebesar Rp8.696.000.000,00 telah direklasifikasi dari Investasi Permanen Pemerintah Kota Balikpapan menjadi Aset Lain-lain per 31 Desember 2013.

Penjelasan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal pada Kapal Ferry Cepat (KFC) sebesar Rp8.696.000.000,00 dapat dikemukakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 dilakukan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bontang, Bupati Kutai Timur, Bupati Paser, dan Direktur Utama PT Agro Bintang Dharma Nusantara menerangkan dan bermufakat sebagai berikut :

1. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 Maret 2002 Nomor 35 dibuat di hadapan ADI GUNAWAN, SH, notaris di Balikpapan para pihak telah mendirikan PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport yang berkedudukan di Balikpapan;
 - b. Perseroan Terbatas tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengesahan dari yang berwajib tersebut belum dipenuhi pendiri;
 - c. Hingga saat ini Perseroan Terbatas tersebut belum menjadi badan hukum karena tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kepada instansi yang berwenang. Maka berdasarkan pasal 10 ayat 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Pelayaran Bintang Kalimantan Timur Transport bubar karena hukum; dan
 - d. PT Pelayaran Bintang Kalimantan Timur Transport tersebut bubar pada Tanggal 26 Mei 2011 melalui RUPS
2. Bermufakat untuk:
 - a. menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport, tetapi tidak terbatas pada dua unit kapal;
 - b. menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjual semua aset PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport secara lelang dan hasil lelang dikurangi ongkos, sisanya akan dibagi berdasarkan perbandingan uang yang telah disetor ke dalam PT Pelayaran Bintang Kaltim Transport;
 - c. apabila hasil penjualan aset kurang dari biaya yang wajib dibayar maka kekurangan tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak dengan bagian yang sama;
 - d. menunjuk Pemerintah Kota Balikpapan bertindak untuk dan atas nama pendiri melaksanakan penjualan aset termasuk menjual dan berhubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan penilaian aset; dan
 - e. tentang kesepakatan bersama ini dengan semua akibatnya para pendiri PT Pelayaran Bintang KaltimTransport memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan uraian tersebut, Pos Investasi Permanen Kapal Ferry Cepat disajikan pada pos Aset Lain-lain.

5.5.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp44.064.166.848,37 **Rp47.292.783.335,17**

Kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2019 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 120 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	Utang PFK	121.908.417,00	0,00	121.908.417,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.992.871.389,34	2.957.168.584,95	35.702.804,39	1,21
3	Utang Belanja	38.348.654.034,38	38.755.732.114,57	(407.078.080,19)	(1,05)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.600.733.007,65	5.579.882.635,65	(2.979.149.628,00)	(53,39)
Jumlah		44.064.166.848,37	47.292.783.335,17	(3.228.616.486,80)	(6,83)

Penjelasan lebih rinci mengenai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

5.5.5.1.1 Utang PFK **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp121.908.417,00 **Rp0,00**

Utang PFK per 31 Desember 2019 sebesar Rp121.908.417,00 merupakan pungutan pajak atas belanja yang bersumber dari dana BOS Reguler pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dipungut namun terlambat disetorkan ke kas negara sampai TA berakhir seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 121 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	Utang PFK	121.908.417,00	0,00	121.908.417,00	0,00
Jumlah		121.908.417,00	0,00	121.908.417,00	0,00

Daftar rincian Utang PFK dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.5.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
Rp2.992.871.389,34 **Rp2.957.168.584,95**

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang diperoleh dari beberapa retribusi dan sewa lahan atas pihak ketiga yang telah diterima di RKUD Kota Balikpapan atas manfaat yang akan diberikan pada periode berikutnya. Pendapatan Diterima Dimuka dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 122 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	TA 2019 (Rp)	%	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	300.221.978,00	0,00	(21.635.260,0)	278.586.718,00	(7,21)	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
2	Dinas Tenaga Kerja	47.070.772,60	0,00	(47.070.772,6)	0,00	(100,00)	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM
3	Dinas Pekerjaan Umum	121.866.053,00	0,00	(121.866.053,0)	0,00	(100,00)	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Stadion
4	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	59.013.114,75	0,00	59.013.114,75	0,00	
5	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	491.975.455,14	0,00	(51.014.100,6)	440.961.354,53	(10,37)	Pajak Reklame Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM
6	RSUD Damai Beriman	10.800.000,00	0,00	(8.100.000,0)	2.700.000,00	(75,00)	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	570.895.921,80	131.520.787,96	0,00	702.416.709,76	23,04	Izin Trayek (Angkot & Taxi)
8	Dinas Perhubungan	876.062.397,26	0,00	(12.778.699,0)	863.283.698,26	(1,46)	Parkir di Tepi Jalan Umum - Berlangganan Pengujian Kendaraan Bermotor - Darat
9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0,00	27.918.257,35	0,00	27.918.257,35	0,00	Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa ATM
11	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu	75.691.173,70	129.449.278,76	0,00	205.140.452,46	171,02	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
JUMLAH		2.957.168.584,95	347.901.438,82	(312.198.634,4)	2.992.871.389,34	1,21	

5.5.5.1.3 Utang Belanja

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

Rp38.348.654.034,38

Rp38.755.732.114,57

Utang Belanja sebesar Rp38.348.654.034,38 merupakan kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan sampai periode TA 2019 berakhir. Utang Belanja terdiri atas:

1. Belanja jasa listrik, air, telpon, internet dan barang jasa lainnya pada beberapa OPD.
2. Utang tunjangan kinerja PNS, tambahan penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak dan Gaji Terusan
3. Utang jasa layanan pada BLUD; dan
4. Utang Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Kebudayaan

Rincian Utang Belanja OPD per 31 Desember 2019 dapat dilihat di **Lampiran 25** sedangkan Utang pada BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.5.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2018

Rp2.600.733.007,65

Rp5.579.882.635,65

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.600.733.007,65 merupakan utang atas *carry over* tunjangan profesi guru serta utang gaji pegawai Kementerian Agama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, utang jaminan pembongkaran reklame pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu dan utang jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan dan Permukiman. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 123 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	(+) (Rp)	(-) (Rp)	TA 2019 (Rp)	%	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	279.790.700,00	0,00	(165.686.360,00)	114.104.340,00	(59,22)	Tunjangan Penghasilan Guru dan pembayaran Gaji Pegawai Kemenag
2	Dinas Kesehatan	2.713.134.970,00	0,00	(2.713.134.970,00)	0,00	(100,00)	Utang Jamkesprov 2015
3	BPPDRD	79.342.298,00	0,00	(79.342.298,00)	0,00	(100,00)	Utang atas kelebihan pembayaran pajak
4	DPMPPT	1.970.875.417,65	0,00	(21.110.000,00)	1.949.765.417,65	(1,07)	Utang Jaminan Reklame
5	Disperkim	536.739.250,00	124.000,00	0,00	536.863.250,00	0,02	Utang Jaminan Rusunawa
JUMLAH		5.579.882.635,65	124.000,00	(2.979.273.628,00)	2.600.733.007,65	(53,39)	

5.5.6 EKUITAS

**Per 31 Desember 2019
Rp11.605.527.372.796,00**

**Per 31 Desember 2018
Rp11.027.467.902.228,40**

Ekuitas sebesar Rp11.605.527.372.796,00 terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional yang diperoleh dari penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa serta Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang berasal dari koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas antara lain disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Ekuitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penambahan sebesar Rp578.059.470.567,53. Penambahan tersebut terdiri dari Surplus/ Defisit LO sebesar Rp194.937.581.630,15 dan Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp383.121.888.937,36. Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar itu sendiri terdiri dari Koreksi Atas Pendapatan (Rp3.500.000,00), Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi tahun sebelumnya sebesar (Rp734.147.070,06) dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp383.859.536.007,42.

Tabel 124 Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	%
11.605.527.372.796,00	11.027.467.902.228,40	578.059.470.567,56	5,24
11.605.527.372.796,00	11.027.467.902.228,40	578.059.470.567,56	5,24

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Laporan Operasional (LO) akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut:

5.6 Pendapatan - LO**Tahun 2019**
Rp 2.485.040.619.753,66**Tahun 2018**
Rp2.272.392.933.726,35

Merupakan pendapatan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019. Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 125 Pendapatan LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	778.891.556.249,68	684.798.196.412,59	94.093.359.837,09	13,74
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.632.111.090.567,00	1.581.114.431.748,00	50.996.658.819,00	3,23
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	74.037.972.936,98	6.480.305.565,76	67.557.667.371,22	1.042,51
	Jumlah	2.485.040.619.753,66	2.272.392.933.726,35	212.647.686.027,31	9,36

5.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO**Tahun 2019**
Rp778.891.556.249,68**Tahun 2018**
Rp684.798.196.412,59

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp778.891.556.249,68 yang terdiri dari:

Tabel 126 Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	576.802.011.205,39	499.676.211.517,64	77.125.799.687,75	15,44
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	59.047.940.779,18	56.586.216.909,12	2.461.723.870,06	4,35
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	16.870.674.739,20	14.360.001.940,84	2.510.672.798,36	17,48
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	126.170.929.525,91	114.175.766.044,99	11.995.163.480,92	10,51
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	778.891.556.249,68	684.798.196.412,59	94.093.359.837,09	13,74

Dari daftar tabel di atas dapat dijelaskan rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LO dan yang mempengaruhinya, yaitu:

5.6.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO**Tahun 2019**
Rp576.802.011.205,39**Tahun 2018**
Rp499.676.211.517,64

Pendapatan Pajak Daerah adalah akumulator untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode

1 Januari 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp576.802.011.205,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)				2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	LO			
Pajak Hotel - LO	46.406.391.626,59	11.009.257.883,41	16.829.419.644,00	40.586.229.866,00	43.879.520.093,00	(3.293.290.227,00)	(7,51)
Pajak Restoran - LO	103.761.411.404,00	3.967.632.279,00	3.812.195.151,00	103.916.848.532,00	83.795.407.926,00	20.121.440.606,00	24,01
Pajak Hiburan - LO	25.849.329.228,00	852.150.317,00	1.021.264.697,10	25.680.214.847,90	24.543.989.721,00	1.136.225.126,90	4,63
Pajak Reklame - LO	9.722.192.805,00	5.408.084.872,89	5.673.899.889,28	9.456.377.788,61	9.817.345.462,74	(360.967.674,13)	(3,68)
Pajak Penerangan Jalan - LO	122.487.731.418,00	155.991.389,00	365.656.228,00	122.278.066.579,00	105.884.546.872,00	16.393.519.707,00	15,48
Pajak Parkir - LO	19.617.542.148,00	701.702.036,00	699.084.536,00	19.620.159.648,00	19.930.017.255,00	(309.857.607,00)	(1,55)
Pajak Air Tanah - LO	2.668.658.971,60	396.907.222,00	303.451.046,60	2.762.115.147,00	2.549.765.328,20	212.349.818,80	8,33
Pajak Sarang Burung Walet - LO	57.647.000,00	0,00	0,00	57.647.000,00	43.765.000,00	13.882.000,00	31,72
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	4.581.201.450,00	0,00	0,00	4.581.201.450,00	1.179.041.125,00	3.402.160.325,00	288,55
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	101.045.077.109,00	256.675.213.966,00	238.969.945.047,00	118.750.346.028,00	122.457.903.404,00	(3.707.557.376,00)	(3,03)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	129.039.009.318,88	73.795.000,00	0,00	129.112.804.318,88	85.594.909.330,70	43.517.894.988,18	50,84
Jumlah	565.236.192.479,07	279.240.734.965,30	267.674.916.238,98	576.802.011.205,39	499.676.211.517,64	77.125.799.687,75	15,44

Nilai Pendapatan Pajak Daerah (LO) diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah (LRA) sebesar Rp565.236.192.479,07 ditambah penyesuaian Piutang Pajak Tahun 2019 sebesar Rp279.111.307.455,16 penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp491.975.455,14 Koreksi Utang kepada Fihak Ketiga Rp79.341.248,00 dikurangi penyesuaian Piutang Pajak tahun sebelumnya Rp267.675.844.077,45 dan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp440.961.354,53 Secara total terlihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp77.125.799.687,75 atau 15,44% dibandingkan Tahun 2018.

5.6.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2019
Rp59.047.940.779,18

Tahun 2018
Rp56.586.216.909,12

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp59.047.940.779,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.564.679.301,00	1.008.000,00	850.000,00	1.564.837.301,00	1.443.565.575,00	121.271.726,00	8,40
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	13.814.485.083,00	900.018.338,00	95.065.000,00	14.619.438.421,00	13.550.376.724,00	1.069.061.697,00	7,89
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	2.363.973.000,00	876.062.397,26	863.283.698,26	2.376.751.699,00	2.100.483.495,57	276.268.203,43	13,15
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	5.509.391.220,00	6.336.727.784,00	4.208.605.766,00	7.637.513.238,00	6.256.900.597,10	1.380.612.640,90	22,07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.604.825.000,00	436.161.947,78	388.399.461,95	2.652.587.485,83	2.743.162.805,75	(90.575.319,92)	(3,30)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	1.721.343.833,33	1.787.574.798,96	1.501.611.290,12	2.007.307.342,17	1.993.885.043,57	13.422.298,60	0,67
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	198.032.200,00	0,00	0,00	198.032.200,00	195.353.400,00	2.678.800,00	1,37
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	693.494.400,00	249.100.000,00	29.892.000,00	912.702.400,00	745.307.200,00	167.395.200,00	22,46
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	6.626.130.771,54	1.032.076.478,70	944.450.803,70	6.713.756.446,54	6.519.032.486,56	194.723.959,98	2,99
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.380.500,00	(140.380.500,00)	0,00
Retribusi Terminal - LO	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	22.714.500,00	(12.214.500,00)	(53,77)
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	238.125.000,00	0,00	0,00	238.125.000,00	126.903.000,00	111.222.000,00	87,64
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	315.139.500,00	0,00	0,00	315.139.500,00	376.486.250,00	(61.346.750,00)	(16,29)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	468.932.500,00	0,00	0,00	468.932.500,00	526.225.000,00	(57.292.500,00)	(10,89)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	3.636.600.000,00	195.000.000,00	259.950.000,00	3.571.650.000,00	3.271.650.000,00	300.000.000,00	9,17
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	7.830.000,00	0,00	0,00	7.830.000,00	6.295.000,00	1.535.000,00	24,38
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	15.360.893.661,00	0,00	0,00	15.360.893.661,00	16.034.738.178,00	(673.844.517,00)	(4,20)
Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.879.000,00	33.879.000,00	0,00
Retribusi Izin Trayek - LO	95.280.000,00	26.422.885,67	24.451.622,27	97.251.263,40	124.072.023,16	(26.820.759,76)	(21,62)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	244.881.600,00	75.691.173,70	205.140.452,46	115.432.321,24	264.944.130,41	(149.511.809,17)	(56,43)
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	179.260.000,00	0,00	0,00	179.260.000,00	177.620.000,00	1.640.000,00	0,92
Jumlah	55.653.797.069,87	11.915.843.804,07	8.521.700.094,76	59.047.940.779,18	56.586.216.909,12	2.461.723.870,06	4,35

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah (LO) diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah (LRA) sebesar Rp55.653.797.069,87 ditambah penyesuaian Piutang Retribusi tahun berjalan sebesar Rp9.630.387.499,86 penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp2.285.456.304,21, koreksi saldo piutang atas retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada OPD BPBD sebesar Rp400.000,00 dikurangi Penyesuaian Piutang Retribusi tahun sebelumnya Rp5.972.390.059,96 penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp2.549.210.034,80 dan Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan tahun sebelumnya pada OPD Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp500.000,00. Secara total terlihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp2.461.723.870,06 atau 4,35% dibandingkan Tahun 2018.

5.6.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2019 Rp16.870.674.739,20	Tahun 2018 Rp14.360.001.940,84
--	---	---

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.870.674.739,20 merupakan pembagian laba (deviden) atas penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan pada PDAM dan Bankaltimara. Rincian pembagian laba dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 129 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD (PDAM)	9.236.586.822,40	6.884.333.478,00	2.352.253.344,40	34,17
2.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur	7.634.087.916,80	7.475.668.462,84	158.419.453,96	2,12
Jumlah		16.870.674.739,20	14.360.001.940,84	2.510.672.798,36	17,48

5.6.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	Tahun 2019 Rp126.170.929.525,91	Tahun 2018 Rp114.175.766.044,99
--	--	--

Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Pemerintah Daerah Kota Balikpapan adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 s.d. tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp126.170.929.525,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131 Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.063.156.318.488,00	1.096.230.492.809,00	(33.074.174.321,00)	(3,02)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	120.899.279.041,00	167.488.330.939,00	(46.589.051.898,00)	(27,82)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	448.055.493.038,00	317.395.608.000,00	130.659.885.038,00	41,17
Jumlah	1.632.111.090.567,00	1.581.114.431.748,00	50.996.658.819,00	3,23

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Dari rincian diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Transfer-LO menggambarkan kinerja Pendapatan Transfer di TA 2019, Pendapatan Transfer-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

5.6.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	Tahun 2019 Rp1.063.156.318.488,00	Tahun 2018 Rp1.096.230.492.809,00
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kota Balikpapan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp1.063.156.318.488,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan- LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Bagi Hasil Pajak	68.155.340.656,00	0,00	0,00	68.155.340.656,00	123.953.578.235,00	(55.798.237.579,00)	(45,02)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	456.723.178.388,00	0,00	0,00	456.723.178.388,00	469.470.265.663,00	(12.747.087.275,00)	(2,72)
Dana Alokasi Umum (DAU)	439.818.664.000,00	1.479.910.000,00	0,00 0,00	441.298.574.000,00	410.543.293.000,00	30.755.281.000,00	7,49
Dana Alokasi Khusus (DAK)	96.979.225.444,00	0,00	0,00	96.979.225.444,00	92.263.355.911,00	4.715.869.533,00	5,11
JUMLAH	1.061.676.408.488,00	1.479.910.000,00	0,00	1.063.156.318.488,00	1.096.230.492.809,00	(33.074.174.321,00)	(3,02)

Dari tabel di atas, pada pos Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.479.910.000,00 yang merupakan transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada BPJS Kesehatan. Adapun dana tersebut ditransfer sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.07/2019 Tahun 2019 untuk pembayaran selisih perubahan jaminan kesehatan penduduk yang terdaftar oleh pemerintah daerah.

5.6.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	Tahun 2019 Rp120.899.279.041,00	Tahun 2018 Rp167.488.330.939,00
----------------	---	--	--

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan pendapatan transfer yang terdiri dari Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2019.

**Tabel 133 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- Dana Penyesuaian- LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Dana Penyesuaian	120.899.279.041,00	167.488.330.939,00	(46.589.051.898,00)	(27,82)

Dana Penyesuaian merupakan Pendapatan Transfer yang terdiri dari Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru serta Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2019. Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.589.051.898,00 atau 27,82%. Hal ini disebabkan oleh berpindahnya akun Pendapatan BOS Pusat yang sebelumnya berada pada pos Dana Penyesuaian, dialihkan ke Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.6.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Tahun 2019 Rp448.055.493.038,00	Tahun 2018 Rp317.395.608.000,00
----------------	--	--	--

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 sebesar Rp448.055.493.038,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 134 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

Uraian	2019 (Rp)				2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	LO			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	298.759.062.038,00	17.371.977.000,00	24.625.546.000,00	291.505.493.038,00	266.566.196.000,00	24.939.297.038,00	9,36
Bantuan Keuangan Provinsi-LO	156.550.000.000,00	0,00	0,00	156.550.000.000,00	50.829.412.000,00	105.720.588.000,00	207,99
Jumlah	455.309.062.038,00	17.371.977.000,00	24.625.546.000,00	448.055.493.038,00	317.395.608.000,00	130.659.885.038,00	41,17

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA ditambah Piutang Tahun 2019 atas Dana Bagi Hasil Pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp17.371.977.000,00 dikurangi Pelunasan Piutang Bagi Hasil Tahun 2018 sebesar Rp24.625.546.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp130.659.885.038,00 atau 41,17% dibandingkan Tahun 2018. Hal ini ditunjang oleh meningkatnya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2019.

5.6.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Tahun 2019
Rp74.037.972.936,98

Tahun 2018
Rp6.480.305.565,76

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp74.037.972.936,98. Pendapatan Hibah terdiri Bantuan dari Pemerintah Pusat dalam program AusAID, Hibah Aset yang diterima oleh beberapa OPD dari kementerian/lembaga serta BOS Pusat. Hibah AusAID merupakan hibah dari APBN kepada Pemerintah Kota Balikpapan berupa sambungan air dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setelah PDAM melaksanakan kewajibannya, selanjutnya mengajukan permohonan penyaluran dana ke Kementerian Keuangan dilampiri laporan hasil verifikasi Kementerian PUPR, dan permohonan penyaluran dari kepala daerah. Ketika dinyatakan lengkap, Kementerian Keuangan selanjutnya mentransfer dana hibah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah yang kemudian disalurkan ke PDAM sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Balikpapan. Hibah aset diterima oleh beberapa OPD secara langsung dari Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan lainnya. Selanjutnya, BOS diterima secara langsung dari Pemerintah Provinsi ke rekening Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Setiap triwulan, sekolah-sekolah menyusun SP3B ke Dinas Pendidikan yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Setelah dinyatakan sesuai, BPKD menerbitkan SP2B sebagai dasar konsolidasian ke Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan.

Tabel 135 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	5.259.071.410,80	5.428.581.235,76	(169.509.824,96)	(3,12)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	3.927.390.063,00	834.846.730,00	3.092.543.333,00	370,43
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	295.009.600,00	128.236.600,00	166.773.000,00	130,05
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0,00	88.641.000,00	(88.641.000,00)	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	64.556.501.863,18	0,00	64.556.501.863,18	0,00
JUMLAH	74.037.972.936,98	6.480.305.565,76	67.557.667.371,22	1.042,51

5.7 BEBAN – LO

Tahun 2019
Rp2.290.103.038.123,51

Tahun 2018
Rp1.864.551.144.474,25

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode Tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja

modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 136 Beban - LO TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1.	Beban Operasi	2.285.088.344.004,51	1.863.830.469.818,25	421.257.874.186,26	22,60
2.	Beban Transfer	3.141.232.527,00	720.674.656,00	2.420.557.871,00	335,87
3.	Beban Luar Biasa	1.873.461.592,00	3.456.134.384,00	(1.582.672.792,00)	(45,79)
Jumlah Beban		2.290.103.038.123,51	1.868.007.278.858,25	422.095.759.265,26	22,60

Dari Tabel 136 terdapat selisih sebesar Rp3.456.134.384,00 pada nilai total Beban LO TA 2018. Selisih tersebut berasal dari nilai Beban Luar Biasa Tahun 2018 yang tidak termasuk dalam perhitungan total Beban LO pada Laporan Keuangan Tahun 2018.

5.7.1 Beban Operasi – LO

Tahun 2019
Rp2.285.088.344.004,51

Tahun 2018
Rp1.863.830.469.818,25

Beban Operasi Pemerintah Kota Balikpapan per 31 Desember 2019 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 137 Rincian Beban Operasi LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Pegawai - LO	749.792.529.225,34	30.367.351.291,27	31.271.105.337,10	748.888.775.179,51	734.319.809.837,79	14.568.965.341,72	1,98
Beban Persediaan	70.902.286.092,68	20.679.609.879,10	17.173.135.484,02	74.408.760.487,76	42.035.113.084,42	32.373.647.403,34	77,02
Beban Barang dan Jasa	606.623.910.060,95	2.665.378.884,30	15.724.454.487,16	593.564.834.458,09	554.332.328.898,39	39.232.505.559,70	7,08
Beban Pemeliharaan	89.655.256.822,47	970.915,06	9.671.432.632,14	79.984.795.105,39	47.258.370.604,94	32.726.424.500,45	69,25
Beban Perjalanan Dinas	80.760.171.635,87	0,00	0,00	80.760.171.635,87	64.774.798.862,12	15.985.372.773,75	24,68
Beban Subsidi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	25,00
Beban Hibah	114.721.353.514,00	11.252.203.159,59	0,00	125.973.556.673,59	68.336.760.377,00	57.636.796.296,59	84,34
Beban Bantuan Sosial	2.228.826.800,00	1.479.910.000,00	0,00	3.708.736.800,00	1.370.225.940,00	2.338.510.860,00	170,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	398.371.802.511,38	0,00	398.371.802.511,38	331.395.611.514,30	66.976.190.997,08	20,21
Beban Penyisihan Piutang	0,00	174.555.929.887,84	0,00	174.555.929.887,84	19.207.350.699,29	155.348.579.188,55	808,80
Beban Lain-lain	0,00	3.870.981.265,08	0,00	3.870.981.265,08	100.000,00	3.870.881.265,08	-
Jumlah Beban Operasi	1.715.684.334.151,31	643.244.137.793,62	73.840.127.940,42	2.285.088.344.004,51	1.863.830.469.818,25	421.257.874.186,26	22,60

Beban Pegawai-LO diperoleh dari saldo LRA dipengaruhi oleh penyesuaian utang tambahan penghasilan, utang Taspen dan insentif pemungutan pajak daerah. Penyesuaian utang tambahan penghasilan terdapat di seluruh OPD, utang Taspen terdapat di Dinas Pendidikan juga Dinas Kesehatan dan pemungutan pajak daerah terdapat di BPPDRD. Mengenai rincian nilai dan penjelasan lebih detail akan diuraikan melalui Tabel 138.

Beban Persediaan diperoleh dari saldo LRA yang dipengaruhi oleh saldo awal dan saldo akhir persediaan, serta persediaan hibah. Seluruh OPD memiliki persediaan baik awal maupun akhir, sementara Persediaan Hibah terdapat di OPD Dinas Kesehatan. Mengenai rincian nilai dan penjelasan lebih detail akan diuraikan melalui Tabel 139.

Beban Barang dan Jasa diperoleh dari Saldo LRA yang dipengaruhi oleh banyak variabel, yaitu penyesuaian utang tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, beban sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, koreksi pembebanan belanja, penyesuaian utang BOS, BLUD, dan JKN, reklasifikasi dari Belanja Modal dan seterusnya. Mengenai rincian nilai dan penjelasan lebih detail akan diuraikan melalui Tabel 140.

Beban Pemeliharaan diperoleh dari saldo LRA yang dipengaruhi oleh saldo Beban Dibayar Dimuka tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, serta beban pemeliharaan yang direklasifikasi dari/menjadi Aset tetap. Saldo Beban Dibayar Dimuka terdapat di OPD Disdukcapil, sementara reklasifikasi dari/menjadi Aset Tetap terdapat di OPD Disdik, DPU dan Sekretariat DPRD. Mengenai rincian nilai dan penjelasan lebih detail akan diuraikan melalui Tabel 141.

Beban Perjalanan Dinas, Beban Subsidi, Beban Hibah serta Beban Bantuan Sosial merupakan Beban LO yang berasal dari saldo LRA dan tidak dipengaruhi oleh penyesuaian apapun sehingga nilai Belanja LRA sama dengan nilai beban di LO.

Beban Penyusutan dan Amortisasi, merupakan beban taksiran atas penggunaan aset selama Tahun 2019, sementara Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain merupakan taksiran atau cadangan atas piutang yang mungkin tidak tertagih sehingga ketiga akun ini tidak berasal dari saldo LRA. Penambahan yang terjadi adalah murni nilai tahun berjalan.

5.7.1.1 Beban Pegawai – LO

Tahun 2019

Tahun 2018

Rp748.888.775.179,51

Rp734.319.809.837,79

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp748.888.775.179,51 dan Rp734.319.809.837,79. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNSD sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 138 Rincian Beban Pegawai LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	333.769.435.726,40	0,00	92.197.116,00	333.677.238.610,40	326.548.939.757,40	7.128.298.853,00	2,18
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	372.017.153.335,00	22.278.518.551,00	22.188.608.077,00	372.107.063.809,00	369.386.566.123,00	2.720.497.686,00	0,74

Uraian	2019 (Rp)				2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	LO			
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	15.403.600.000,00	0,00	0,00	15.403.600.000,00	15.610.090.000,00	(206.490.000,00)	(1,32)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	24.367.328.163,94	8.088.832.740,27	8.990.300.144,10	23.465.860.760,11	20.016.006.957,39	3.449.853.802,72	17,24
Uang Lembur - LO	4.235.012.000,00	0,00	0,00	4.235.012.000,00	2.758.207.000,00	1.476.805.000,00	53,54
Jumlah	749.792.529.225,34	30.367.351.291,27	31.271.105.337,10	748.888.775.179,51	734.319.809.837,79	14.568.965.341,72	1,98

Nilai Beban Pegawai-LO diperoleh dari Beban Pegawai-LRA sebesar Rp749.792.529.225,34 ditambah utang Tambahan Penghasilan tahun berjalan sebesar Rp22.278.518.551,00 utang insentif pemungutan pajak sebesar Rp8.088.832.740,27 dikurangi Penyesuaian Piutang Taspen, gaji Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp92.197.116,00 Utang Tambahan Penghasilan tahun sebelumnya sebesar Rp22.188.608.077,00 serta utang insentif pemungutan pajak sebesar Rp8.990.300.144,10. Beban Pegawai – LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan belanja pegawai terjadi saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar yang telah dibayarkan ditambah kewajiban tahun berjalan dikurangi beban tahun sebelumnya.

5.7.1.2 Beban Persediaan - LO

Tahun 2019

Tahun 2018

Rp74.408.760.487,76

Rp42.035.113.084,42

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp74.408.760.487,76 dan Rp42.035.113.084,42. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 139 Rincian Beban Persediaan LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)				2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	LO			
Beban Bahan Pakai Habis	28.847.347.523,00	2.094.019.585,50	2.363.751.770,50	28.577.615.338,00	20.908.713.359,22	7.668.901.978,78	36,68
Beban Persediaan Bahan/ Material	27.888.028.314,68	16.546.259.648,60	12.144.347.697,59	32.289.940.265,69	21.126.399.725,20	11.163.540.540,49	52,84
Beban Cetak dan Penggandaan	14.028.236.005,00	2.039.330.645,00	2.665.036.015,93	13.402.530.634,07	0,00	13.402.530.634,07	0,00
Beban Barang Alat Kesehatan	138.674.250,00	0,00	0,00	138.674.250,00	0,00	138.674.250,00	0,00
JUMLAH	70.902.286.092,68	20.679.609.879,10	17.173.135.484,02	74.408.760.487,76	42.035.113.084,42	32.373.647.403,34	77,02

Beban Persediaan-LO diperoleh dari Belanja Persediaan-LRA Tahun 2019 sebesar Rp70.902.286.092,68 ditambah penyesuaian saldo awal persediaan sebesar Rp15.140.940.305,30, hibah dari kementerian dan pihak lainnya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp5.538.669.573,80, dikurangi dengan penyesuaian saldo akhir persediaan sebesar Rp16.077.465.740,34 dan kapitalisasi ke Aset Tetap Jalan sebesar

Rp1.095.669.743,68. Perlu diketahui bahwa beban cetak dan penggandaan Tahun 2018 sebesar Rp11.666.396.459,00 tercantum dalam kelompok Beban Barang dan Jasa.

**5.7.1.3 Beban Barang dan Jasa-
LO**

**Tahun 2019
Rp593.564.834.458,09**

**Tahun 2018
Rp554.332.328.898,39**

Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp593.564.834.458,09 dan Rp554.332.328.898,39. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas di Pemerintah Kota Balikpapan. Beban barang dan jasa dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 140 Rincian Beban Barang dan Jasa- LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Jasa Kantor	80.813.494.142,00	1.829.981.078,22	1.279.447.149,85	81.364.028.070,37	80.287.115.546,84	1.076.912.523,53	1,34
Beban Premi Asuransi	3.853.830.250,00	0,00	0,00	3.853.830.250,00	4.323.026.325,00	(469.196.075,00)	(10,85)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	37.665.080.119,00	0,00	197.838.620,00	37.467.241.499,00	35.607.246.438,75	1.859.995.060,25	5,22
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666.396.459,00	(11.666.396.459,00)	(100,00)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.701.275.598,00	7.069.679,61	0,00	1.708.345.277,61	1.876.700.698,64	(168.355.421,03)	(8,97)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.534.210.800,00	0,00	0,00	1.534.210.800,00	1.738.086.300,00	(203.875.500,00)	(11,73)
Beban Sewa Alat Berat	3.506.807.662,37	0,00	3.506.807.662,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.027.655.863,00	0,00	0,00	6.027.655.863,00	6.541.719.214,00	(514.063.351,00)	(7,86)
Beban Makanan dan Minuman	76.857.075.952,95	0,00	393.522.593,95	76.463.553.359,00	59.276.232.271,00	17.187.321.088,00	29,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.593.180.599,00	0,00	0,00	2.593.180.599,00	1.321.154.100,00	1.272.026.499,00	96,28
Belanja Pakaian Kerja	6.219.117.310,00	0,00	0,00	6.219.117.310,00	4.780.825.320,00	1.438.291.990,00	30,08
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.753.910.850,00	0,00	0,00	3.753.910.850,00	4.002.686.447,00	(248.775.597,00)	(6,22)
Beban Jasa Konsultasi	4.080.407.720,00	0,00	0,00	4.080.407.720,00	2.134.090.260,00	1.946.317.460,00	91,20
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	195.525.000,00	195.525.000,00	0,00	15.099.400.445,00	(15.099.400.445,00)	(100,00)
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.893.870.024,56	0,00	4.893.870.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	200.378.203,00	0,00	0,00	200.378.203,00	122.305.909,00	78.072.294,00	63,83
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.565.661.423,00	0,00	0,00	5.565.661.423,00	4.990.991.515,49	574.669.907,51	11,51
Honorarium PNS	2.724.685.000,00	38.400.000,00	0,00	2.763.085.000,00	2.780.350.000,00	(17.265.000,00)	(0,62)
Honorarium Non PNS	173.327.214.180,35	0,00	1.396.204.255,51	171.931.009.924,84	160.839.229.278,00	11.091.780.646,84	6,90
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.723.740.000,00	0,00	0,00	14.723.740.000,00	4.273.100.000,00	10.450.640.000,00	244,60
Beban Pegawai BLUD RSKB Sayang Ibu	2.878.139.408,00	231.490.472,83	0,00	3.109.629.880,83	3.272.535.681,74	(162.905.800,91)	(4,98)
Beban Pegawai BLUD Puskesmas	8.553.657.986,00	0,00	102.930.723,60	8.450.727.262,40	8.704.506.893,30	(253.779.630,90)	(2,92)

Uraian	2019 (Rp)				2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	LO			
Beban Pegawai Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4.961.671.515,00	0,00	0,00	4.961.671.515,00	5.113.268.034,00	(151.596.519,00)	(2,96)
Beban Barang Dana Bos	49.219.198.898,00	0,00	59.337.235,00	49.159.861.663,00	46.754.906.887,00	2.404.954.776,00	5,14
Beban Barang KAPITASI JKN	3.322.794.319,31	0,00	91.498.628,14	3.231.295.691,17	2.193.044.680,33	1.038.251.010,84	47,34
Beban Jasa Berlangganan	304.988.598,00	57.695.770,64	0,00	362.684.368,64	250.791.234,23	111.893.134,41	44,62
Beban Pemeriksaan Laboratorium	471.234.584,00	0,00	0,00	471.234.584,00	334.332.385,00	136.902.199,00	40,95
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	7.019.951.371,80	0,00	2.713.134.970,00	4.306.816.401,80	5.162.620.999,00	(855.804.597,20)	(16,58)
Beban Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu	3.660.293.534,34	229.794.883,00	0,00	3.890.088.417,34	3.966.178.895,56	(76.090.478,22)	(1,92)
Beban Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00
Beban Barang Perlengkapan Kantor	49.490.000,00	0,00	0,00	49.490.000,00	5.300.000,00	44.190.000,00	833,8
Beban Barang Perlengkapan Dapur	211.304.360,00	0,00	0,00	211.304.360,00	15.222.000,00	196.082.360,00	1288,15
Beban Penyelesaian Perkara Hukum	212.000.000,00	0,00	0,00	212.000.000,00	94.500.000,00	117.500.000,00	124,3
Beban Kontribusi Lomba	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	30,00
Beban Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	2.644.834.250,00	0,00	0,00	2.644.834.250,00	948.753.750,00	1.696.080.500,00	178,8
Beban Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	20.260.713.983,20	0,00	4.000.000,00	20.256.713.983,20	13.159.738.133,00	7.096.975.850,20	53,93
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	4.771.475.038,76	0,00	167.079.129,79	4.604.395.908,97	4.422.274.400,49	182.121.508,48	4,12
Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Non PNS)	2.841.620.535,00	0,00	0,00	2.841.620.535,00	1.755.700.400,00	1.085.920.135,00	61,85
Beban bahan Perlengkapan Kamar	24.092.000,00	0,00	0,00	24.092.000,00	0,00	24.092.000,00	0,00
Beban Pengadaan Perlengkapan Penghias ruangan	13.095.000,00	0,00	0,00	13.095.000,00	0,00	13.095.000,00	0,00
Beban Pengadaan Alat-alat perbengkelan	9.150.250,00	0,00	0,00	9.150.250,00	0,00	9.150.250,00	0,00
Beban Jasa Perizinan	4.748.592,00	0,00	0,00	4.748.592,00	8.123.592,00	(3.375.000,00)	(41,55)
Beban Barang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	330.859.774,23	0,00	0,00	330.859.774,23	0,00	330.859.774,23	0,00
Beban Barang Pengadaan Buku/Kepustakaan	25.900.900,00	0,00	0,00	25.900.900,00	0,00	25.900.900,00	0,00
Beban Tim Pemandu Haji Daerah	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	7,69
Beban Belanja Pegawai BLUD RSUD	26.999.195.626,00	0,00	611.010.176,58	26.388.185.449,42	22.131.527.117,63	4.256.658.331,79	19,23
Beban Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	30.351.675.041,08	0,00	112.248.317,81	30.239.426.723,27	25.298.564.533,38	4.940.862.189,89	19,53
Beban Pegawai Dana BOS	5.853.018.530,00	0,00	0,00	5.853.018.530,00	8.899.782.754,00	(3.046.764.224,00)	(34,23)
Beban Pegawai BLUD Unit Pelaksana Teknis (UPT)	579.319.200,00	75.422.000,00	0,00	654.741.200,00	0,00	654.741.200,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD Unit Pelaksana Teknis (UPT)	801.751.069,00	0,00	0,00	801.751.069,00	0,00	801.751.069,00	0,00
Jumlah	606.623.910.060,95	2.665.378.884,30	15.724.454.487,16	593.564.834.458,09	554.332.328.898,39	39.232.505.559,71	7,08

Mengenai perbedaan antara saldo LRA dengan LO dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Beban Jasa Kantor**
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp80.813.494.142,00 ditambah penyesuaian utang tahun berjalan tagihan telepon Rp4.243.584,00, tagihan air Rp97.864.004,00, tagihan listrik Rp195.151.905,00, tagihan internet Rp5.203.777,00
Beban Dibayar Dimuka internet Tahun 2018 Rp1.527.517.808,22 dikurangi penyesuaian utang Tahun 2018 tagihan telepon Rp8.281.373,00, tagihan air Rp94.163.573,00, tagihan listrik Rp179.411.525,00, tagihan internet Rp4.142.810,00 dan Beban Dibayar Dimuka internet tahun berjalan Rp993.447.868,85 maka diperoleh saldo LO sebesar Rp81.364.028.070,37.
2. **Beban Perawatan Kendaraan Bermotor**
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp37.665.080.119,00 dikurangi penyesuaian pengakuan persediaan BBM yang bukan berasal dari beban persediaan di BPBD sebesar Rp187.901.020,00 dan penyesuaian utang pajak kendaraan bermotor Tahun 2018 sebesar Rp9.937.600,00.
3. **Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp1.701.275.598,00 ditambah Penyesuaian Beban Sewa Dibayar Dimuka di Dinas Kesehatan, Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Utara sebesar Rp7.069.679,61
4. **Beban Sewa Alat Berat** merupakan beban sewa alat untuk pekerjaan perbaikan jalan dan sekitarnya. Karena memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, seperti dapat menambah umur pemakaian, maka belanja sewa tersebut seluruhnya dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5. **Beban Makanan dan Minuman LO** Diperoleh dari belanja LRA sebesar Rp76.857.075.952,95 dikurangi kapitalisasi ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp393.522.593,95
6. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp195.525.000 merupakan persediaan akhir 2018 BPBD yang berisi Alat Pemadam Api Ringan yang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat dan telah tersalurkan kepada masyarakat penerima di Tahun 2019. Karena peristiwa ini memenuhi kriteria hibah, maka pembebanannya direklasifikasi ke beban hibah.
7. **Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp4.893.870.024,56 merupakan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Karena peristiwa ini memenuhi kriteria hibah, maka pembebanannya direklasifikasi ke beban hibah secara keseluruhan.
8. **Beban Honorarium PNS**
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp2.724.685.000,00 ditambah koreksi dari Belanja Modal berupa honor panitia pengadaan tanah sebesar Rp38.400.000,00.
9. **Beban Honorarium Non PNS**
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp173.327.214.180,35 dikurangi penyesuaian honorarium dari perhitungan alokasi biaya persediaan swakelola Disperkim sebesar Rp1.396.204.255,51.

10. Beban Pegawai BLUD RSKB Sayang Ibu
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp2.878.139.408,00 ditambah selisih penyesuaian utang Jasa Pelayanan Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp231.490.472,83.
11. Beban Pegawai BLUD Puskesmas
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp8.553.657.986,00 dikurangi selisih penyesuaian utang Jasa Pelayanan Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp102.930.723,60.
12. Beban Barang Dana BOS
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp49.219.198.898,00 dikurangi selisih penyesuaian utang barang/jasa yang berasal dari BOS Pusat Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp59.337.235,00.
13. Beban Barang Kapitasi JKN
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp3.322.794.319,31 dikurangi selisih penyesuaian beban persediaan sebesar Rp17.393.148,00 dan reklasifikasi beban barang jasa ke Aset Tetap sebesar Rp74.105.480,14. Beban Barang Kapitasi JKN merupakan beban yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.
14. Beban Jasa Berlangganan
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp304.988.598,00 ditambah selisih penyesuaian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2018 dengan tahun berjalan di Diskominfo sebesar Rp57.695.770,64.
15. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp7.019.951.371,80 dikurangi penyesuaian utang BPJS Dinas Kesehatan Tahun 2018 ke RS Kanujoso Djatiwibowo sebesar Rp2.713.134.970,00.
16. Beban Barang Dan Jasa BLUD RSKB Sayang Ibu
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp3.660.293.534,34 ditambah selisih penyesuaian utang barang/jasa Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp229.794.883,00.
17. Beban Jasa Tenaga Terampil/ Terlatih
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp20.260.713.983,20 dikurangi kapitalisasi ke aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.000.000,00.
18. Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp4.771.475.038,76 dikurangi selisih penyesuaian utang barang/jasa Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp167.079.129,79.
19. Beban Belanja Pegawai BLUD RSUD
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp26.999.195.626,00 dikurangi selisih penyesuaian utang Jasa Pelayanan Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp611.010.176,58.
20. Beban Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp30.351.675.041,08 dikurangi selisih penyesuaian utang barang/jasa Tahun 2018 dengan tahun berjalan sebesar Rp112.248.317,81.
21. Beban Pegawai BLUD Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Beban LO diperoleh dari Belanja LRA sebesar Rp579.319.200,00 ditambah utang jasa pelayanan tahun berjalan sebesar Rp75.422.000,00.

**5.7.1.4 Beban Pemeliharaan-
LO**

**Tahun 2019
Rp79.984.795.105,39**

**Tahun 2018
Rp47.258.370.604,94**

Beban Pemeliharaan TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp79.984.795.105,39 dan Rp47.258.370.604,94. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Untuk memperoleh gambaran mengenai Beban Pemeliharaan – LO, tabel berikut akan memberikan informasi yang terjadi selama Tahun 2019.

Tabel 141 Rincian Beban Pemeliharaan- LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Pemeliharaan Tanah	6.744.100,00	0,00	0,00	6.744.100,00	0,00	6.744.100,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.904.522.152,80	970.915,06	197.159.819,67	9.708.333.248,19	9.394.313.828,93	314.019.419,26	3,34
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.072.733.924,10	0,00	2.689.610.591,44	27.383.123.332,66	15.309.225.365,00	12.073.897.967,66	78,87
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31.393.050.920,74	0,00	1.723.785.086,00	29.669.265.834,74	11.280.407.156,00	18.388.858.678,74	163,02
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	55.857.837,48	0,00	0,00	55.857.837,48	0,00	55.857.837,48	0,00
Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Sampah/Akhir	50.009.500,00	0,00	0,00	50.009.500,00	192.877.500,00	(142.868.000,00)	(74,07)
Beban Pemeliharaan Alat Ukur	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan/bangunan listrik	944.720.430,58	0,00	0,00	944.720.430,58	900.053.850,00	44.666.580,58	4,96
Beban Pemeliharaan komputer dan jaringan	2.411.911.050,00	0,00	31.375.000,00	2.380.536.050,00	2.357.319.300,00	23.216.750,00	0,98
Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi	33.200.000,00	0,00	0,00	33.200.000,00	76.027.050,00	(42.827.050,00)	(56,33)
Beban Bahan dan Jasa Kalibrasi	234.573.000,00	0,00	0,00	234.573.000,00	230.937.000,00	3.636.000,00	1,57
Beban Pemeliharaan Taman-Taman	798.932.838,52	0,00	0,00	798.932.838,52	784.021.190,00	14.911.648,52	1,90
Beban Pemeliharaan Software/Aplikasi	606.009.030,00	0,00	0,00	606.009.030,00	744.786.100,00	(138.777.070,00)	(18,63)
Beban Pemeliharaan Media Pengumuman/Promosi	214.643.875,00	0,00	0,00	214.643.875,00	7.128.000,00	207.515.875,00	2.911,28
Beban Pemeliharaan Meubelair	295.948.720,00	0,00	0,00	295.948.720,00	197.061.250,00	98.887.470,00	50,18
Beban Pemeliharaan Jembatan	679.534.729,18	0,00	0,00	679.534.729,18	692.564.000,00	(13.029.270,82)	(1,88)
Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan	181.715.600,00	0,00	0,00	181.715.600,00	251.735.000,00	(70.019.400,00)	(27,81)
Beban Pemeliharaan Instalasi Air	116.837.549,00	0,00	0,00	116.837.549,00	256.681.000,00	(139.843.451,00)	(54,48)
Beban Pemeliharaan PJU	3.788.694.635,00	0,00	0,00	3.788.694.635,00	3.723.996.595,00	64.698.040,00	1,74
Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan	122.404.183,00	0,00	0,00	122.404.183,00	4.675.000,00	117.729.183,00	2.518,27
Beban Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636.420,00	(146.636.420,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki (Trotoar)	6.318.452.135,03	0,00	5.029.502.135,03	1.288.950.000,00	0,00	1.288.950.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bermain di Luar	4.471.000,00	0,00	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Lisensi Software - LO	9.370.000,00	0,00	0,00	9.370.000,00	9.240.000,00	130.000,00	1,41
Beban Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	615.000.085,04	0,00	0,00	615.000.085,04	371.848.000,00	243.152.085,04	65,39
Beban Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola	500.565.527,00	0,00	0,00	500.565.527,00	81.702.000,00	418.863.527,00	512,67

Uraian	2019 (Rp)				2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)	LO			
Beban Pemeliharaan Akuarium	193.754.000,00	0,00	0,00	193.754.000,00	245.135.000,00	(51.381.000,00)	(20,96)
Beban Pemeliharaan Alat Kesenian	67.100.000,00	0,00	0,00	67.100.000,00	0,00	67.100.000,00	0,00
Jumlah	89.655.256.822,47	970.915,06	9.671.432.632,14	79.984.795.105,39	47.258.370.604,93	32.726.424.500,46	69,25

Beban Pemeliharaan LO diperoleh dari Belanja Pemeliharaan LRA Tahun 2019 sebesar Rp89.655.256.822,47 ditambah penyesuaian saldo Beban Dibayar Dimuka tahun sebelumnya di Disdukcapil sebesar Rp970.915,06 dikurangi penyesuaian saldo Beban Dibayar Dimuka Tahun berjalan sebesar Rp1.494.819,67 dan reklasifikasi dari/ke Aset Tetap pada OPD Disdik, DPU dan Sekretariat DPRD sebesar Rp3.507.129.677,44 reklasifikasi ke Beban Hibah di Dinas PU sebesar Rp6.162.808.135,03. Dengan demikian, nilai Beban Pemeliharaan LO diperoleh sebesar Rp79.984.795.105,39, meningkat Rp32.726.424.500,46 atau 69,25% dibandingkan Tahun 2018.

5.7.1.5 Beban Perjalanan Dinas- LO **Tahun 2019** **Tahun 2018**
Rp80.760.171.635,87 **Rp64.774.798.862,12**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp80.760.171.635,87 dan Rp64.774.798.862,12. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 142 Beban Perjalanan Dinas - LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	80.760.171.635,87	64.774.798.862,12	15.985.372.773,75	24,68

5.7.1.6 Beban Subsidi - LO **Tahun 2019** **Tahun 2018**
Rp1.000.000.000,00 **Rp800.000.000,00**

Beban Subsidi Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp800.000.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk mensubsidi operasional bus sekolah yang dikelola Perusda Kota Balikpapan.

Tabel 143 Beban Subsidi - LO TA 2019 dan TA 2018

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
Beban Subsidi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	25,00

5.7.1.7 Beban Hibah - LO **Tahun 2019** **Tahun 2018**
Rp125.973.556.673,59 **Rp68.336.760.377,00**

Jumlah Beban Hibah Pemerintah Kota Balikpapan untuk Tahun 2019 sebesar Rp125.973.556.673,59 yang terdiri atas beban hibah untuk kelompok, beban hibah

kepada organisasi kemasyarakatan dan beban hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar. Rincian beban hibah Tahun 2019 dan 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 144 Rincian Beban hibah TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	12.376.500.000,00	5.089.395.024,56	0,00	17.465.895.024,56	8.517.000.000,00	8.948.895.024,56	105,07
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	79.706.040.860,00	6.162.808.135,03	0,00	85.868.848.995,03	44.691.717.751,00	41.177.131.244,03	92,14
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	22.638.812.654,00	0,00	0,00	22.638.812.654,00	15.128.042.626,00	7.510.770.028,00	49,65
Jumlah	114.721.353.514,00	11.252.203.159,59	0,00	125.973.556.673,59	68.336.760.377,00	57.636.796.296,59	84,34

Beban Hibah kepada kelompok masyarakat - LO diperoleh melalui perhitungan Beban –LRA sebesar Rp12.376.500.000,00 ditambah koreksi Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp5.080.395.024,56 sehingga beban LO menjadi Rp17.465.895.024,56. Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga merupakan beban yang dilaksanakan di OPD pengelola, namun direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai penunjang capaian kinerja kegiatan yang bersangkutan. Adapun barang yang diserahkan tersebut antara lain gerobak celeng dan tempat sampah di Kec. Balikpapan Kota sebesar Rp129.000.000,00 program SPGRM di kelurahan sebesar Rp2.373.240.090,00, bantuan bahan makanan pokok sebesar Rp81.000.000,00, APAR sebesar Rp198.000.000,00, alat keamanan sebesar Rp13.314.400,00 dll. Sedangkan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga diantaranya berupa alat KB sebesar Rp310.095.500,00, pemberian kendaraan untuk operasional LVRI sebesar Rp231.000.000,00, rehab Posyandu/Poskamling sebesar Rp199.878.000,00 dll. Terdapat pula penyesuaian Beban Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat berupa APAR sebesar Rp195.525.000,00. Sementara Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan bertambah Rp6.162.808.135,03 yang berasal dari beban pemeliharaan yang dilaksanakan di Dinas PU untuk memperbaiki lingkungan kantor instansi vertikal yang ada di Kota Balikpapan.

5.7.1.8 Beban Bantuan Sosial - LO

Tahun 2019

Tahun 2018

Rp3.708.736.800,00

Rp1.370.225.940,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.708.736.800,00 dan Rp1.370.225.940,00. Beban tersebut merupakan beban untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Terdapat penambahan sebesar Rp1.479.910.000,00 merupakan transfer dari RKUN ke BPJS Kesehatan sesuai amanat PMK Nomor 166 Tahun 2019 dimana dana tersebut diperuntukkan untuk pembayaran selisih kenaikan tarif BPJS terhadap peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan (PBI).

Tabel 145 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.228.826.800,00	1.479.910.000,00	0,00	3.708.736.800,00	1.092.093.800,00	2.616.643.000,00	239,60
Beban Bantuan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	278.132.140,00	(278.132.140,00)	(100,00)
Jumlah	2.228.826.800,00	1.479.910.000,00	0,00	3.708.736.800,00	1.370.225.940,00	2.338.510.860,00	170,67

5.7.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Tahun 2019

Rp398.371.802.511,38

Tahun 2018

Rp331.395.611.514,30

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp398.371.802.511,38 dan Rp331.395.611.514,30. Semua jenis aset tetap dan aset tak berwujud mengalami kenaikan secara total sebesar Rp66.976.190.997,08 atau 20,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan seiring penambahan aset Pemerintah Kota Balikpapan yang diperoleh dari pengadaan, hibah dan hasil inventarisasi.

Tabel 146 Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi TA 2019 dan 2018

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.178.348.846,77	81.753.548.669,57	31.424.800.177,20	38,44
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.699.816.050,34	76.934.372.386,58	1.765.443.663,76	2,29
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	178.671.907.332,77	161.814.241.803,33	16.857.665.529,44	10,42
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	626.271.401,00	0,00	626.271.401,00	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	27.195.458.880,50	10.893.448.654,82	16.302.010.225,68	149,65
	Jumlah	398.371.802.511,38	331.395.611.514,30	66.976.190.997,08	20,21

5.7.1.10 Beban Penyisihan Piutang - LO

Tahun 2019
Rp174.555.929.887,84

Tahun 2018
Rp19.207.350.699,29

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp174.555.929.887,84 dan Rp19.207.350.699,29 merupakan beban penyisihan atas Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya. Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 147 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak	161.319.556.619,60	20.294.126.947,80	141.025.429.671,80	694,91
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.835.538.631,77	676.797.356,21	2.158.741.275,56	318,96
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.582.819.477,19	(1.794.746.419,51)	9.377.565.896,70	(522,50)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	86.859.885,00	2.731.090,00	84.128.795,00	3.080,41
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	2.420.920,00	(13.257.590,50)	15.678.510,50	(118,26)
Beban Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	2.542.544.559,18	0,00	2.542.544.559,18	0,00
Beban Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	186.189.795,10	41.699.315,29	144.490.479,81	346,51
Jumlah	174.555.929.887,84	19.207.350.699,29	155.348.579.188,55	808,80

5.7.1.11 Beban Lain-lain- LO

Tahun 2019
Rp3.870.981.265,08

Tahun 2018
Rp100.000,00

Jumlah Beban Lain-lain Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.870.981.265,08 dan Rp100.000,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap (dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi) dan beban penyisihan investasi dana bergulir. Rincian Beban Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 148 Rincian Beban Lain-lain TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Dana Bergulir	3.870.981.265,08	0,00	3.870.981.265,08	0,00
Beban Lain-lain	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100)
Jumlah	3.870.981.265,08	100.000,00	3.870.881.265,08	-

5.7.2. Beban Transfer - LO**Tahun 2019****Tahun 2018****Rp3.141.232.527,00****Rp720.674.656,00**

Jumlah Beban Transfer Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp3.141.232.527,00 dan Rp720.674.656,00. Beban Transfer merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi bencana alam di Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat serta untuk Partai Politik pada TA 2019.

Tabel 149 Rincian Beban Lain-lain TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.141.232.527,00	720.674.656,00	420.557.871,00	58,36
Jumlah	3.141.232.527,00	720.674.656,00	2.420.557.871,00	335,87

5.7.2. Beban Luar Biasa**Tahun 2019****Tahun 2018****Rp1.873.461.592,00****Rp3.456.134.384,00**

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp1.873.461.592,00 dan Rp3.456.134.384,00. Terdapat koreksi atas nilai Beban Luar Biasa sebesar Rp7.753.438,00 yang berasal dari pemusnahan obat kedaluwarsa di RSKB-SI. Beban Luar Biasa merupakan beban yang timbul akibat rehabilitasi dan bantuan atas bencana yang terjadi di Kota Balikpapan selama Tahun 2019, yaitu bencana kebakaran di Jl. Sulawesi Kelurahan Karang Rejo, bencana longsor di Kelurahan Klandasan Ulu, serta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dan PBB.

Tabel 150 Rincian Beban Luar Biasa TA 2019 dan TA 2018

Uraian	2019 (Rp)			LO	2018 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	LRA	Mutasi (+)	Mutasi (-)				
Beban Luar Biasa	1.865.726.154,00	7.735.438,00	0,00	1.873.461.592,00	3.456.134.384,00	(1.582.672.792,00)	(45,79)

5.9.1 SURPLUS/DEFISIT - LO**Tahun 2019****Tahun 2018****Rp194.937.581.630,15****Rp404.385.654.868,10**

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp194.937.581.630,15 mengalami penurunan sebesar (Rp209.448.073.237,95) atau menurun sebesar (51,79%) dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun 2018 sebesar Rp404.385.654.868,10.

E. LAPORAN ARUS KAS

Penyajian laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

5.8 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Rp748.825.150.838,92	Rp717.597.496.613,93

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp748.825.150.838,92 menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dimana arus masuk kas adalah sebesar Rp2.469.516.443.671,23 dan arus keluar kas sebesar Rp1.720.691.292.832,31

Adapun rincian arus kas dari aktivitas operasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 151 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Hasil Pajak Daerah	565.236.192.479,07	474.455.854.717,30	90.780.337.761,77
Penerimaan Hasil Retribusi Daerah	55.653.797.069,87	55.054.750.772,39	599.046.297,48
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.870.674.739,20	14.360.001.940,84	2.510.672.798,36
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.314.527.952,91	102.488.274.054,57	23.826.253.898,34
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	68.155.340.656,00	123.953.578.235,00	(55.798.237.579,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	456.723.178.388,00	469.470.265.663,00	(12.747.087.275,00)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	439.818.664.000,00	410.543.293.000,00	29.275.371.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	96.979.225.444,00	92.263.355.911,00	4.715.869.533,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	185.455.780.904,18	167.488.330.939,00	17.967.449.965,18
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	298.759.062.038,00	266.019.978.000,00	32.739.084.038,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	-300.000.000,00
Penerimaan Dana Bantuan dari Propinsi	156.550.000.000,00	50.829.412.000,00	105.720.588.000,00
Penerimaan Dana Tunjangan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.469.516.443.671,23	2.230.227.095.233,10	239.289.348.438,13
Arus Kas Keluar			-

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk			
Pembayaran Belanja Pegawai	749.792.529.225,34	726.387.818.545,85	23.404.710.679,49
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	847.941.624.611,97	711.557.984.716,32	136.383.639.895,65
Pembayaran Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	114.721.353.514,00	68.336.760.377,00	46.384.593.137,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.228.826.800,00	1.092.093.800,00	1.136.733.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	3.141.232.527,00	998.806.796,00	2.142.425.731,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	1.865.726.154,00	3.456.134.384,00	(1.590.408.230,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	1.720.691.292.832,31	1.512.629.598.619,17	208.061.694.213,14
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	748.825.150.838,92	717.597.496.613,93	31.227.654.224,99

Jumlah arus kas masuk pada aktivitas operasi berbeda dengan realisasi pendapatan di LRA karena penjualan aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp11.995.000,00 yang tercatat pada Lain-lain PAD yang Sah disajikan ke dalam arus kas aktivitas investasi. Penjualan aset tetap tersebut merupakan penjualan atas pelelangan bongkaran gedung Puskesmas Pembantu Kariangau dan gedung ABK (Puskesmas Damai).

5.9 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan **Per 31 Desember 2019** **Per 31 Desember 2018**
(Rp716.625.273.179,42) **(Rp607.831.051.920,58)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi berjumlah sebesar (Rp716.625.273.179,42) yang didapat selisih arus kas masuk dari penjualan aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp11.995.000,00 dengan jumlah arus kas keluar dari realisasi belanja modal dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp716.637.268.179,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Peralatan dan mesin	0,00	509.526.000,00	(509.526.000,00)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	11.995.000,00	0,00	11.995.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	11.995.000,00	509.526.000,00	(497.531.000,00)
Arus Kas Keluar			

Perolehan Tanah	13.023.016.543,24	55.810.737.585,00	(42.787.721.041,76)
Perolehan Peralatan dan mesin	92.286.750.125,68	83.075.215.847,10	9.211.534.278,58
Perolehan Gedung dan Bangunan	136.068.318.925,39	106.275.034.611,15	29.793.284.314,24
Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	415.921.306.815,97	328.086.131.679,59	87.835.175.136,38
Perolehan Aset Tetap Lainnya	29.376.833.846,74	33.474.330.857,74	(4.097.497.011,00)
Perolehan Aset Lainnya	1.094.455.100,00	1.619.127.340,00	(524.672.240,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.866.586.822,40	0,00	28.866.586.822,40
Jumlah Arus Keluar Kas	716.637.268.179,42	608.340.577.920,58	108.296.690.258,84
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(716.625.273.179,42)	(607.831.051.920,58)	(108.794.221.258,84)

5.10 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp0,00 (Rp17.359.333.478,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 menunjukkan tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pendanaan.

5.11 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2018
Rp54.000,00 Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris berjumlah sebesar Rp54.000,00 yang didapat selisih arus kas masuk dari penerimaan IWP, Taperum, PPh dan Penerimaan Lain-lain sebesar Rp24.567.073.998,00 dengan jumlah arus kas keluar sebesar Rp24.567.019.998,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 153 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
Arus Kas Masuk			
Penerimaan IWP	23.270.036.332,00	22.487.506.983,00	782.529.349,00
Penerimaan Taperum	433.589.213,00	440.202.381,00	(6.613.168,00)
Penerimaan PPh	863.394.453,00	125.534.987,00	737.859.466,00
Penerimaan Lain lain	54.000,00	0,00	54.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	24.567.073.998,00	23.053.244.351,00	1.513.829.647,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran IWP	23.270.036.332,00	22.487.506.983,00	782.529.349,00
Pengeluaran Taperum	433.589.213,00	440.202.381,00	(6.613.168,00)
Pengeluaran PPh	863.394.453,00	125.534.987,00	737.859.466,00
Pengeluaran Lain-lain	0,00	0,00	0,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (transito)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Jumlah Arus Keluar Kas	24.567.019.998,00	23.053.244.351,00	1.513.775.647,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	54.000,00	0,00	54.000,00

Dari arus kas bersih masing-masing aktivitas diatas dapat diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun 2019 dan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 154 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	748.825.150.838,92	717.597.496.613,93
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(716.625.273.179,42)	(607.831.051.920,58)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(17.359.333.478,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	54.000,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	32.199.931.659,50	92.407.111.215,35
Saldo Awal Kas di BUD	291.631.786.428,55	198.234.445.532,00
Saldo Akhir Kas	323.831.718.088,05	290.641.556.747,35
Saldo Akhir Kas terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	272.604.485.686,69	243.865.606.301,90
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.170.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	140.669.256,00
Kas di BLUD dan kas lainnya	51.227.232.401,36	47.627.840.870,37
Saldo Akhir Kas	323.831.718.088,05	291.635.286.428,27

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.14.1 EKUITAS AWAL	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Rp11.027.467.902.228,40	Rp7.810.087.982.897,83

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp11.027.467.902.228,40 yang merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2018.

5.14.2 SURPLUS (/DEFISIT) LO	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Rp194.937.581.630,15	Rp404.385.654.868,10

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp194.937.581.630,15. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.14.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
	Rp383.121.888.937,36	Rp2.812.994.264.462,52

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut:

**Tabel 155 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
TA 2019 dan 2018**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
1.	Koreksi atas Pendapatan	(3.500.000,00)	0,00
2.	Koreksi atas Beban	0,00	102.637.425,00
3.	Koreksi Penyajian Aset Tetap Tahun Lalu	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	(734.147.070,06)	23.435.690.993,00
5.	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
6.	Koreksi Ekuitas Tahun Sebelumnya	383.859.536.007,42	2.789.455.936.044,52
Jumlah		383.121.888.937,36	2.812.994.264.462,52

Penjelasan terkait koreksi ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

Koreksi ekuitas atas pendapatan dilakukan karena pada Tahun 2018, Dinas Kesehatan telah mengakui menerima pendapatan atas dana titipan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang harus diserahkan kepada Bidan Jejaring. Karena sifatnya hanya dana titipan, maka tidak seharusnya dana tersebut diakui sebagai Pendapatan.

Koreksi ekuitas dari penyusutan dan amortisasi tahun sebelumnya terjadi karena kurang catat pada akun akumulasi penyusutan sehingga perlu dilakukan koreksi pada Tahun 2019. Berikut rincian OPD beserta nilai koreksi yang dilakukan:

**Tabel 156 Rincian Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan
Amortisasi Tahun Sebelumnya Tahun 2019**

No.	OPD	Nilai Koreksi
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	(174.011.429,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum	(560.135.641,06)
Jumlah		(734.147.070,06)

Koreksi Ekuitas Tahun Sebelumnya dilakukan akibat banyaknya peristiwa akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pergerakan Kas, Piutang, Persediaan, Aset

Tetap, dan lainnya. Gambaran sebagaimana pergerakan tersebut dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 157 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun Sebelumnya Tahun 2019

No.	Uraian	Nilai Koreksi (Rp)	Penjelasan
1	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	2.889.554.485,25	Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan bahwa Penyusutan dilakukan selama 1 Tahun, maka untuk aset tetap yang diperoleh Tahun 2019, sejak 2 Januari 2019 telah disusutkan.
2	Barang dibawah kapitalisasi	(12.261.127.363,96)	Dilakukan untuk Barang-barang yang diperoleh melalui Belanja Modal namun tidak memenuhi sayarat kapitalisasi Aset Tetap.
3	Aset ditemukan (hasil inventarisasi)	157.987.085.450,00	Dilakukan untuk mengakui nilai Aset Tetap dari hasil inventarisasi.
4	Penyesuaian Mutasi Aset antar OPD	(68,27)	Dilakukan untuk perpindahan aset tetap antar OPD. Rp68,27 merupakan selisih saldo awal Aset Tetap pada Dinas PU.
5	Aset Hibah	1.753.880.556,00	Dilakukan untuk mencatat Aset Tetap yang diperoleh dari Hibah
6	Penghapusan aset tetap	(4.605.440.880,11)	Dilakukan untuk mengkoreksi Aset yang dihapus
7	Penyesuaian Saldo Awal Piutang	(1.190.000,00)	Dilakukan untuk mengkoreksi Piutang dari FKTP yang sebelumnya Non BLUD menjadi BLUD.
8	Penyesuaian Penyisihan Piutang Tahun 2018	152.790.443.319,92	Dilakukan untuk menyesuaikan Penyisihan Piutang Tahun sebelumnya.
9	Penyesuaian Persediaan	(116.515.199,76)	Dilakukan untuk mengkoreksi persediaan awal 2019 yang berasal dari Hibah yang diterima pada Tahun 2018 pada Dinas Kesehatan
10	Pemusnahan Obat Kedaluwarsa	(4.359.773,00)	Dilakukan untuk menghapus obat kedaluwarsa pada RSKB-Sayang Ibu
11	Pengakuan karena perubahan kebijakan akuntansi	16.604.166.398,40	Dilakukan karena perubahan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan sebagai tindak lanjut penerapan PMDN Nomor 108 Tahun 2016
12	Koreksi pengurangan Tarif Retribusi Tahun 2018	(152.854.523,39)	Dilakukan sebagai tindak lanjut pengurangan tarif Retribusi Pemeriksaan APAR di BPBD
13	Koreksi Saldo Awal Piutang	(400.000,00)	Koreksi atas kelebihan pengakuan Piutang Tahun 2018 di BPBD
14	Penilaian Kembali Aset Tetap	35.622.798.999,00	Dilakukan untuk mencatat nilai aset hasil penilaian kembali pada OPD BPKD yang sebelumnya bernilai 0
15	Penyesuaian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	221.860.370,69	Penyesuaian bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada OPD BPKD.
16	Penyesuaian penyisihan bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(15.609.256,89)	Penyesuaian penyisihan Bagian Lancar TPA Tahun 2018
17	Penyesuaian saldo TPA Rumah Dinas Gol. III	8.687.480.219,38	Penyesuaian saldo TPA Rumah Dinas Gol. III karena kesalahan pencatatan
18	Belanja Barang/ jasa yang dikapitalisasi ke AT	258.456.565,00	Dilakukan untuk mencatat Kapitalisasi Aset Tetap yang berasal dari belanja Barang/ Jasa.
19	Kapitalisasi ke aset induk yang extracomptable	(120.895.000,00)	Dilakukan untuk mencatat Belanja Modal yang ketika digabung ke aset induk termasuk aset ekstrakomptabel
20	Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka	168.936.825,60	Dilakukan karena perpindahan UPT Pengelolaan Gedung yang sebelumnya di Dinas PU berpindah ke BPKD sebesar Rp121.866.053. Selanjutnya saldo tersebut dialihkan ke BPKD dengan mengkoreksi ke Ekuitas pada Dinas PU. Kemudian Peralihan Retribusi IMTA yang sebelumnya dikelola Dinas Ketenagakerjaan dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp47.070.772,60. Saldo tersebut dialihkan dengan mengkoreksi Ekuitas pada Dinas Ketenagakerjaan.
21	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.700.215.500,00	Koreksi lebih catat Akumulasi Amortisasi ATB di Diskominfo dan Bappeda Litbang.
22	Koreksi Saldo Awal Belanja dibayar dimuka	(0,02)	Koreksi lebih catat Belanja dibayar Dimuka pada OPD Diskominfo dan Disdukcapil
23	Penyesuaian saldo Dana Bergulir	38.786.769,75	Penyesuaian saldo Dana Bergulir
24	Penyesuaian Penyisihan Dana Bergulir	3.956.233.493,95	Penyesuaian Penyisihan Dana Bergulir Tahun sebelumnya dengan mendebet penyisihan Tahun 2018 pada Ekuitas
25	Koreksi saldo awal PDAM	(88.278.000,00)	Dilakukan untuk mengkoreksi kelebihan catat Ekuitas sesuai Laporan Hasil Audit PDAM Tahun 2018.
26	Laba BUMD	5.262.508.370,15	Dilakukan untuk mencatat Laba Perusda Manuntung Sukses dan PDAM Tahun 2019.

No.	Uraian	Nilai Koreksi (Rp)	Penjelasan
27	Penyesuaian Saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya	20.521.519,37	Dilakukan untuk Penyesuaian Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan Jaminan atas pinjaman kredit Usaha mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang disimpan pada Bankaltimara
28	Kurang Catat Aset Tetap	13.680.902.047,07	Dilakukan setelah audit terinci, ditemukan beberapa aset tetap yang belum tercatat sehingga dilakukan pencatatan kembali
29	Lebih Catat Aset Tetap	(1.167.139.675,71)	Dilakukan setelah pemeriksaan BPK, ditemukan beberapa aset tetap yang sama tercatat 2 kali sehingga dilakukan eliminasi.
30	Lebih Saji Laba BUMD	(1.250.485.141,00)	Dilakukan setelah mendapat laporan keuangan Audited yaitu PDAM dan Perusda dimana Laba yang dilaporkan sebelumnya lebih besar dari hasil audited.
Total		383.859.536.007,42	

5.12 EKUITAS	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
AKHIR	Rp11.605.527.372.796,00	Rp11.027.467.902.228,40

Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp11.605.527.372.796,00 jika dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp11.027.467.902.228,40 mengalami kenaikan sebesar Rp578.059.470.567,51.

PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

5.13 JAMINAN PEMELIHARAAN

Pada Tahun 2019, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang fisiknya telah selesai 100% dan telah dibayarkan 100% keuangannya dengan jaminan pemeliharaan berupa Garansi Bank yang diserahkan oleh pihak ketiga pelaksana pekerjaan. Jaminan Pemeliharaan tersebut berakhir melewati Tahun 2019. Rincian Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 158 Rincian Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank TA 2019

No.	OPD	Nilai Jaminan Pemeliharaan (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	20.535.664.469,18
2.	Dinas Kesehatan Kota	854.870.881,28
3.	Dinas Perumahan dan Permukiman	461.594.002,05
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.445.244.140,91
5.	Dinas Lingkungan Hidup	106.116.599,32
Jumlah		23.403.490.092,74

5.14 DAMPAK PANDEMI COVID-19

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan telah mempertimbangkan peristiwa setelah tanggal pelaporan, khususnya dampak ketidakpastian yang mungkin timbul dari pandemi Covid-19 di masa depan terhadap posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas. Dampak ketidakpastian tersebut antara lain berupa:

- a. Potensi ketertagihan piutang pemerintah daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi Covid-19 termasuk estimasi atas dampak terhadap penyisihan piutang tersebut.
- b. Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban, khususnya kewajiban jangka pendek apakah terganggu akibat adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2020 sebagai dampak penanganan pandemik Covid-19.
- c. Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang tidak dilanjutkan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, termasuk yang terkait dengan eskalasi harga yang telah dilakukan atas proyek tersebut.
- d. Rencana Program Penanganan Krisis di tingkat pemerintah daerah dan dampaknya terhadap posisi dan pengelolaan keuangan.

5.15 KONTINJENSI

Terdapat 3 (tiga) gugatan perdata oleh masyarakat kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas kepemilikan aset tanah.

Tabel 159 Daftar Perkara Gugatan Perdata Pemerintah Kota Balikpapan

No	Objek Perkara	Nomor Perkara/Penggugat	Nilai Gugatan (Rp)	Keterangan
1	Taman Bekapai	Baharuddin Machmud, SH	-	Eksekusi Ganti Rugi
2	Rumah Susun Jl. Siaga	46/Pdt.G/2017/PN.Bpp Hj. Sadariyah	18.900.000.000,00	Putus NO
3	SDN 008 / SDN 010 Balikpapan Selatan	Jel Sion	-	Eksekusi Ganti Rugi

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2019 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan OPD dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan penerapan belanja daerah yang berpinsip pada pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SAP.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2019 ini, Pemerintah Kota Balikpapan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.